

YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

**PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN STIMULANT PERUMAHAN
SWADAYA (BSPS) DALAM PENYEDIAAN RUMAH BANTUAN DI DESA
KOTO PERAMBAHAN KECAMATAN KAMPA KABUPATEN KAMPAR**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)
Bidang Ilmu Sosial Program Studi Administrasi Publik
Pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau*



Rozi Alpendra
NPM : 167110858

PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU

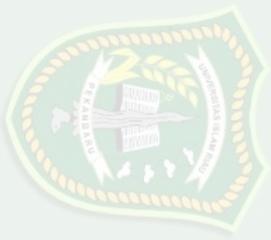
2022

ISLAM RIAU

DOKUMEN INI ADALAH ARSIP MILIK :

PERPUSTAKAAN SOEMAN HS

UNIVERSITAS ISLAM RIAU



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING

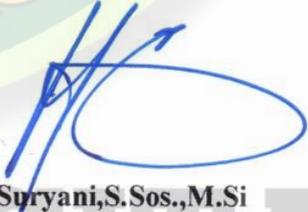
Nama : Rozi alpendra
NPM : 167110858
Program Studi : Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.I)
Judul Penelitian : Pelaksanaan Program Bantuan Stimulant Perumahan Swadaya (BSPS) dalam Penyediaan Rumah Bantuan di Desa Koto Perambahan Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar

Format sistematika dan pembahasan masing-masing materi dalam usulan penelitian ini telah dipelajari dan dinilai relative telah memenuhi ketentuan-ketentuan normatif dan kriteria metode ilmiah, oleh karena itu dinilai layak serta dapat disetujui untuk diseminarkan.

Turut Menyetujui
Program Studi Administrasi Publik

Pekanbaru, 30 juni 2022.
Pembimbing


Lilis Suryani, S.Sos., M.Si


Lilis Suryani, S.Sos., M.Si

UNIVERSITAS
ISLAM RIAU

DOKUMEN INI ADALAH ARSIP MILIK :

PERPUSTAKAAN SOEMAN HS

UNIVERSITAS ISLAM RIAU



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PENGUJI

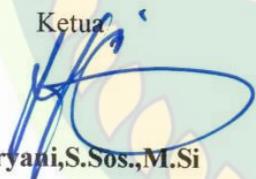
Nama : Rozi Alpendra
Npm : 167110858
Program Studi : Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (1)
Judul Penelitian : Pelaksanaan Program Bantuan Stimulant Perumahan Swadaya (BSPS) dalam penyediaan Rumah Bantuan di Desa Koto Perambahan Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar

Naskah skripsi ini secara keseluruhan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan metode penelitian ilmiah oleh karena itu Tim Penguji Konferehensif Fakulltas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana.

Pekanbaru, 30 juni 2022

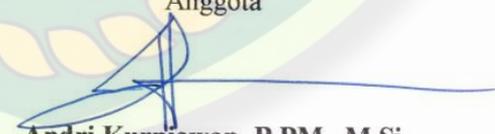
Ketua

Sekretaris


Lilis Suryani, S.Sos., M.Si


Herman, S.Sos., M.Si

Anggota


Andri Kurniawan, B.PM., M.Si

Mengetahui
Wakil Dekan 1,


Indra Safri, S.Sos., M.Si

UNIVERSITAS
ISLAM RIAU

DOKUMEN INI ADALAH ARSIP MILIK :

PERPUSTAKAAN SOEMAN HS

UNIVERSITAS ISLAM RIAU



**KEPUTUSAN DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU
NOMOR : 1143/UIR-FS/KPTS/2022**

TENTANG

**TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

Menimbang

- : a. Bahwa untuk mengevaluasi tingkat kebenaran penerapan kaidah dan metode penelitian ilmiah dalam naskah Skripsi Mahasiswa maka dipandang perlu untuk diuji dalam forum ujian komprehensif.
- b. Bahwa Tim Penguji dimaksud perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.

Mengingat

- : 1. UU Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional
- 2. PP Nomor: 60 Tahun 1999 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi
- 3. SK. Mendiknas RI Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.
- 4. SK Rektor UIR Nomor: 141/UIR/KPTS/2009 tentang Kurikulum Baru Fisipol UIR
- 5. SK Rektor UIR Nomor: 391/UIR/KPTS/2020, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana UIR masa bakti 2020-2024.

Memperhatikan

- : Rekomendasi Ketua Jurusan/Ketua Program Studi dan Wakil Dekan Bidang Akademik (WD.I) tentang Usulan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- : **KEPUTUSAN DEKAN FISIPOL TENTANG TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA**

- 1. Dosen Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa atas nama yang tersebut dibawah ini :

Nama	: Rozi Alpendra
N P M	: 167110858
Program Studi	: Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan	: Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi	: Pelaksanaan Program Bantuan Stimulant Perumahan Swadaya (BSPS) Dalam Penyediaan Rumah Bantuan Di Desa Koto Perambahan Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar

Struktur Tim :

- | | |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Lilis Suriani, S.Sos., M.Si. | Sebagai Ketua merangkap Penguji |
| 2. Andri Kurmiawan, B.PM., M.Si | Sebagai Sekretaris merangkap Penguji |
| 3. Herman, S.Sos., M.Si.. | Sebagai Anggota merangkap Penguji |
- 2. Tim Penguji melaksanakan tugas dan mengisi serta menandatangani berkas ujian sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Fakultas;
 - 3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 20 Oktober M
24 Rabiul awal H
DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU,



DR. SYAHRUL AKMAL LATIF., M.Si
NPK-080102337

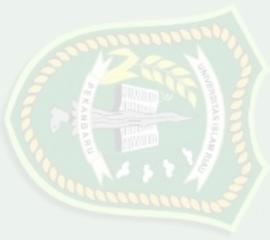
Tembusan :

- 1. Rektor UIR
- 2. Ka. Biro Keuangan UIR
- 3. Wakil Dekan I FISIPOL UIR
- 4. Ketua Prodi administrasi Publik FISIPOL UIR

Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin

DOKUMEN INI ADALAH ARSIP MILIK :
PERPUSTAKAAN SOEMAN HS
UNIVERSITAS ISLAM RIAU

UNIVERSITAS ISLAM RIAU



**UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

BERITA ACARA UJIAN KONPREHENSIF SKRIPSI

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Nomor: 1143/UIR-Fs/Kpts/2022 tanggal 19 Oktober 2022 maka dihadapan Tim Penguji pada hari ini, Kamis tanggal, 20 Oktober jam 09.00 – 10.00 Wib, bertempat di ruang sidang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru telah dilaksanakan ujian konprehensif skripsi atas mahasiswa:

N a m a : Rozi Alpendra
NPM : 167110858
Program Studi : Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Pelaksanaan Program Bantuan Stimulant Perumahan Swadaya (BSPS) Dalam Penyediaan Rumah Bantuan Di Desa Koto Perambahan Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar

Nilai Ujian : Angka : " 80 " ; Huruf : " B " ⁺
Keputusan Hasil Ujian : Lulus / Tidak Lulus / Ditunda
Tim Penguji :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Liis Suriani, S.Sos., M.Si.	Ketua	1.
2.	Andri Kumiawan, B.PM., M.Si	Sekretaris	2.
3.	Herman, S.Sos., M.Si..	Anggota	3.
4.		Notulen	4.

Pekanbaru, 20 Oktober 2022

Wakil Dekan,



Indra Safri, S.Sos, M.Si

Wakil Dekan I Bid. Akademik

**UNIVERSITAS
ISLAM RIAU**

DOKUMEN INI ADALAH ARSIP MILIK :

PERPUSTAKAAN SOEMAN HS

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Rozi Alpendra
 Npm : 167110858
 Program Studi : Administrasi Publik
 Jenjang Pendidikan : Strata Satu (1)
 Judul Penelitian : Pelaksanaan Program Bantuan Stimulant Perumahan Swadaya (BSPS) dalam penyediaan Rumah Bantuan di Desa Koto Perambahan Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar

Naskah Skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh Mahasiswa bersangkutan sesuai dengan koreksi dan masukan Tim Penguji dan dinilai telah memenuhi persyaratan administratif dan akademis, oleh karena itu dapat disahkan sebagai sebuah Karya Ilmiah.

Pekanbaru, 30 Juni 2022

An. Tim Penguji
Sekretaris

Ketua,

Lilis Suryani, S.Sos., M.Si

Hermap, S.Sos., M.Si

Turut Menyetujui

Wakil Dekan I

Indra Safri, S.Sos., M. Si

Ketua Program Studi

Lilis Suryani, S.Sos., M.Si

DOKUMEN INI ADALAH ARSIP MILIK :

PERPUSTAKAAN SOEMAN HS

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin

KATA PENGANTAR

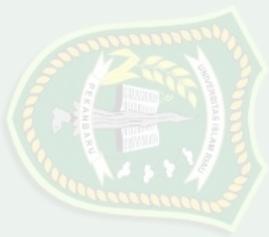
Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Alhamdulillahirobbil'alamin, puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT karena atas rahmat dan hidayah-Nya serta nikmat islam yang telah memberikan kesehatan, kemudahan dan kekuatan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan usulan penelitian yang berjudul **“Implementasi Program Bantuan Stimulant Perumahan Swadaya (BSPS) dalam Penyediaan Rumah Bantuan Di Desa Koto Perambahan Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar”**.

Kemudian shalawat dan salam penulis haturkan untuk junjungan alam Baginda Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli'ala tsaidina Muhammad Wa'ala ali tsayyidina Muhammad, Assalamu'alaika Ya Rasulullah. Yang telah memberikan suri tauladan serta pengajarannya, sehingga terbukalah berbagai hikmah ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi umat manusia hingga akhir zaman.

Dalam penyelesaian Usulan penelitian ini, penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari semua pihak yang berkompeten dan berdedikasi demi kesempurnaan Usulan Penelitian ini, dan tak lupa pula penulis ingin menyampaikan ribuan terimah kasih kepada semua pihak yang berpartisipasi dalam penulisan ini, terkhususnya kepada:

**UNIVERSITAS
ISLAM RIAU**





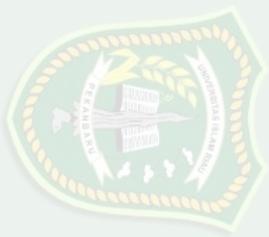
1. Bapak **Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH.,MCL.**, selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah menyediakan fasilitas dan memberikan kesempatan kepada penulis dalam menimba ilmu pada lembaga pendidikan yang beliau pimpin.
2. Bapak **Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si.** selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
3. Ibu **Lilis Suryani, S.Sos.,M.Si.**, selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
4. Ibu **Lilis Suryani, S.Sos.,M.Si.**, selaku dosen pembimbing yang telah banyak membantu dalam memberikan waktu. Bimbingan dan arahan kepada penulis dalam penulisan usulan penelitian ini
5. Bapak **Eko Handriyan, S.Sos.,M.Si.**, selaku Sekretaris Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau khususnya pada Program Studi Administrasi Publik, yang dalam hal ini tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang mana telah mendidik dan mengarahkan serta memberikan dorongan serta arahan yang baik sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan usulan penelitian ini.
7. Seluruh Staf, Karyawan/Karyawati Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah membantu penulis menyelesaikan

DOKUMEN INI ADALAH ARSIP MILIK :

PERPUSTAKAAN SOEMAN HS

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

ISLAM RIAU



segala urusan administrasi mengenai keperluan penulis yang berhubungan dengan penyusunan usulan penelitian ini.

8. Kepada keluarga saya tercinta dan seluruh saudara-saudara yang senantiasa memberikan motivasi dorongan dan juga senantiasa mendoakan agar penulis selalu diberikan kemudahan dalam setiap urusannya
9. Kepada orang terkasih, sahabat, teman dan rekan-rekan yang selalu membantu penulis dalam memahami ilmu-ilmu serta membantu penulis untuk lebih bersemangat dalam menyelesaikan penelitian ini.

Akhir kata penulis berharap semoga Usulan Penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan dan semoga menjadi bahan referensi bagi peneliti selanjutnya. Dalam penulisan Usulan penelitian ini penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan juga kesalahan. Oleh karena itu besar harapan penulis agar kiranya semua pihak yang membaca Usulan penelitian ini agar memberikan kritik dan masukan yang bersifat membangun, sehingga penulis bisa berkesempatan untuk melakukan perbaikan sebaik mungkin.

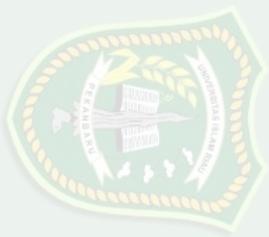
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekanbaru, 20 Oktober 2022
Penulis,

UNIVERSITAS
Rozi Alpendra
ISLAM RIAU

DAFTAR ISI

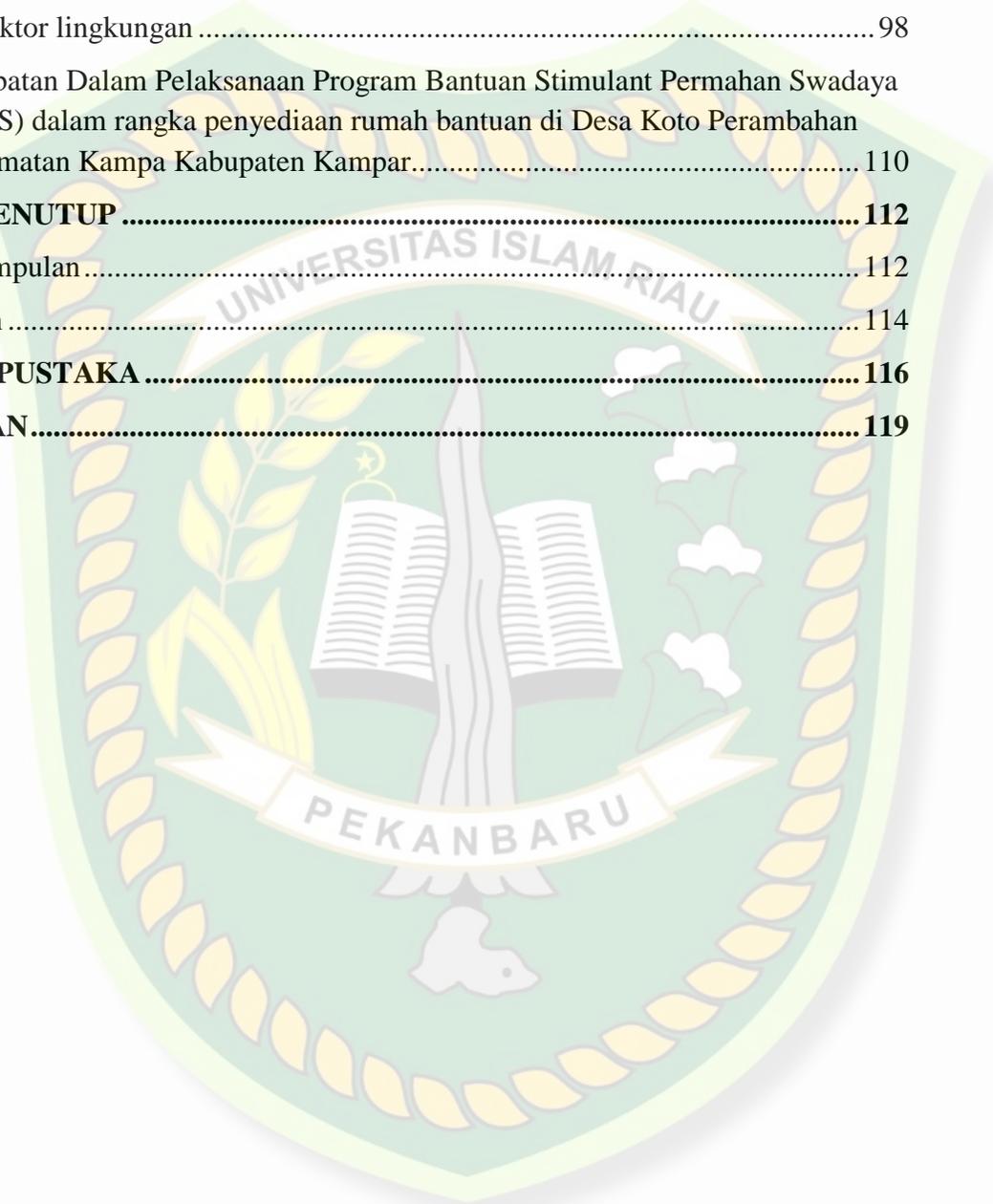
PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING.....	i
PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH.....	xvi
ABSTRAK.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	15
C. Tujuan Penelitian.....	16
BAB II STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR.....	18
A. Studi Kepustakaan.....	18
1. Konsep Administrasi.....	18
2. Konsep Organisasi.....	21
3. Konsep Manajemen.....	23
4. Konsep kebijakan.....	24
5. Konsep Implementasi.....	26
6. Konsep Manajemen Sumber Daya Manusia.....	36
7. Konsep Pelaksanaan Program.....	38
8. Program Rumah Bantuan.....	41
9. Konsep Program Bantuan Stimulant Perumahan Swadaya.....	43
B. Kerangka Pikir.....	44



C. Hipotesis	45
D. Konsep Operasional.....	45
E. Operasional Variabel.....	46
F. Teknik Pengukuran.....	47
BAB III METODE PENELITIAN	51
A. Tipe Penelitian.....	51
B. Lokasi Penelitian	51
C. Populasi Dan Sampel.....	52
D. Teknik Penarikan Sampel.....	53
E. Jenis Dan Sumber Data.....	54
F. Teknik Pengumpulan Data.....	55
G. Teknik Analisis Data	56
H. Jadwal Waktu Penelitian.....	59
I. Rencana Sistematika Laporan Penelitian.....	59
BAB IV DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN	61
A. Gambaran Umum Desa Koto Perambahan.....	61
B. Latar Belakang (BSPS) Desa Koto Perambahan	68
C. Profil (BSPS) Desa Koto Perambahan	71
D. Kader-Kader (BSPS)	71
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	74
A. Identitas Responden.....	74
1. Jenis Kelamin	74
2. Umur Responden	76
3. Pendidikan Responden	78
B. Pembahasan Pelaksanaan Program Bantuan Stimulat Perumahan Swadaya (BSPS) dalam Penyediaan Rumah Bantuan di Desa Koto Perambahan Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar.....	81
a. Kebijakan yang dilaksanakan	82
b. Kelompok sasaran.....	89



c. Organisasi Pelaksana.....	94
d. Faktor lingkungan.....	98
C. Hambatan Dalam Pelaksanaan Program Bantuan Stimulant Permahan Swadaya (BSPS) dalam rangka penyediaan rumah bantuan di Desa Koto Perambahan Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar.....	110
BAB VI PENUTUP	112
A. Kesimpulan.....	112
B. Saran	114
DAFTAR PUSTAKA	116
LAMPIRAN.....	119

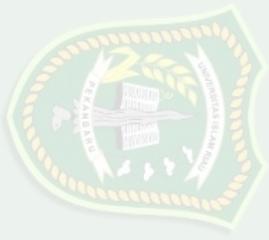


DOKUMEN INI ADALAH ARSIP MILIK :

PERPUSTAKAAN SOEMAN HS

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

UNIVERSITAS ISLAM RIAU



DAFTAR GAMBAR

- Gambar II. 1: Kerangka Pikir Penelitian Tentang Implementasi Program Bantuan Stimulant Perumahan Swadaya (BSPS) dalam Penyediaan Rumah Bantuan di Desa Koto Perambahan Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar..... 44
- Gambar III. 1: Komponen Dalam Analisis Data Model Miles dan Huberman (sugiyono, 2016)..... 58

DOKUMEN INI ADALAH ARSIP MILIK :

PERPUSTAKAAN SOEMAN HS

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

**UNIVERSITAS
ISLAM RIAU**



DAFTAR TABEL

Tabel I. 1: Jumlah dusun yang terdata dan yang tidak terdata untuk mendapatkan rumah bantuan pada tahun 2019 – 2020 di Desa Koto Perambahan Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar.....	11
Tabel I.2: jumlah Masyarakat yang berpenghasilan tetap tetapi mendapatkan bantuan rumah Program BSPS pada tahun 2019-2020 di Desa Koto Perambahan Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar.....	15
Tabel II. 1: Tabel Operasional Variabel Analisis Pelaksanaan Program Bantuan Stimulant Perumahan Swadaya (BSPS) dalam Penyediaan Rumah Bantuan di Desa Koto Perambahan Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar.....	46
Tabel III. 1: Tabel Populasi dan Sampel Tentang Pelaksanaan Program Bantuan Stimulant Perumahan Swadaya (BSPS) dalam Penyediaan Rumah Bantuan di Desa Koto Perambahan Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar.....	53
Tabel III. 2 : Jadwal dan waktu Kegiatan Penelitian Mengenai Pelaksanan program bantuan stimulant perumahan swadaya (BSPS) dalam rangka penyediaan Rumah Bantuan di Desa Koto Perambahan Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar	59
Tabel V. 1: Distribusi Jumlah Responden Berdasarkan Jenis Kelamin Pelaksana Program Bantuan Stimulant Perumahan swadaya (BSPS) di Desa Koto Perambahan	74
Tabel V. 2: Distribusi Responden Menurut Status Petugas Pelaksana Program Bantuan Stimulant Perumahan swadaya (BSPS) di Desa Koto Perambahan.....	75
Tabel V. 3: Distribusi Responden Menurut Jenis Kelamin Kepala Keluarga Penerima Bantuan Rumah di Desa Koto Perambahan.....	75
Tabel V. 4: Distribusi Responden Berdasarkan Umur Petugas Pelaksanan Program Bantuan Stimulant Perumahan swadaya (BSPS) di Desa Koto Perambahan.....	77
Tabel V. 5. Distribusi Responden Menurut Umur Berdasarkan Status Pegawai pada Pelaksana Program Bantuan Stimulant Perumahan swadaya (BSPS) di Desa Koto Perambahan.....	77
Tabel V. 6. Distribusi Responden Menurut Umur Kepala Keluarga Penerima Bantuan di Desa Koto Perambahan	78
Tabel V. 7: Distribusi Responden Menurut Jenjang Pendidikan Pejabat Pelaksana Program Bantuan Stimulant Perumahan swadaya (BSPS) di Desa Koto Perambahan.....	79
Tabel V. 8: Distribusi Responden Menurut Pendidikan Berdasarkan Status Pegawai Pelaksana Program Bantuan Stimulant Perumahan swadaya (BSPS) di Desa Koto Perambahan.....	80



Tabel V. 9: Distribusi Responden Menurut Jenjang Pendidikan Kepala Keluarga Penerima Bantuan di Desa Koto Perambahan	80
Tabel V. 10: Distribusi Tanggapan Responden Petugas Tentang Pelaksanaan Program Bantuan stimulant perumahan swadaya (BSPS) dalam rangka Penyediaan Rumah Bantuan di Desa Koto Perambahan Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar.....	83
Tabel V. 11: Distribusi Tanggapan Responden Masyarakat Penerima Rumah Bantuan Tentang Kebijakan Yang Dilaksanakan Program Bantuan Stimulant Perumahan Swadaya (BSPS) di Desa Koto Perambahan Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar.....	87
Tabel V. 12: Distribusi Tanggapan Responden Petugas Tentang kelompok sasaran Program Bantuan stimulant perumahan swadaya (BSPS) dalam rangka Penyediaan Rumah Bantuan di Desa Koto Perambahan Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar.....	90
Tabel V. 13: Distribusi Tanggapan Responden Masyarakat Penerima Rumah Bantuan Tentang kelompok sasaran Program Bantuan stimulant perumahan swadaya (BSPS) dalam rangka Penyediaan Rumah Bantuan di Desa Koto Perambahan Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar.....	92
Tabel V. 14: Distribusi Tanggapan Responden Petugas Tentang Organisasi Pelaksana Program Bantuan stimulant perumahan swadaya (BSPS) dalam rangka Penyediaan Rumah Bantuan di Desa Koto Perambahan Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar.....	94
Tabel V. 15: Distribusi Tanggapan Responden Masyarakat Penerima Rumah Bantuan Tentang Organisasi Pelaksana Program Bantuan Stimulant Perumahan Swadaya (BSPS) dalam rangka Penyediaan Rumah Bantuan di Desa Koto Perambahan Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar.....	96
Tabel V. 16: Distribusi Tanggapan Responden Petugas Tentang Faktor Lingkungan Program Bantuan stimulant perumahan swadaya (BSPS) dalam rangka Penyediaan Rumah Bantuan di Desa Koto Perambahan Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar.....	98
Tabel V. 17: Distribusi Tanggapan Responden Masyarakat Penerima Rumah Bantuan Tentang Faktor Lingkungan Program Bantuan stimulant perumahan swadaya (BSPS) dalam rangka Penyediaan Rumah Bantuan di Desa Koto Perambahan Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar.....	101
Tabel V. 18: Rekapitulasi Tanggapan Petugas Penerima Rumah Bantuan Tentang Bantuan stimulant perumahan swadaya (BSPS) dalam rangka Penyediaan Rumah Bantuan di Desa Koto Perambahan Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar.....	103



Tabel V. 19: Rekapitulasi Tanggapan masyarakat Penerima Rumah Bantuan Tentang Bantuan stimulant perumahan swadaya (BSPS) dalam rangka Penyediaan Rumah Bantuan di Desa Koto Perambahan Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar..... 107



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

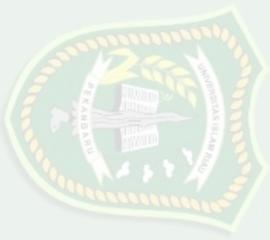
DOKUMEN INI ADALAH ARSIP MILIK :

PERPUSTAKAAN SOEMAN HS

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I: Dokumentasi Wawancara Penelitian Tentang Pelaksanaan Program Bantuan Stimulant Perumahan Swadaya (BSPS) dalam Penyediaan Rumah Bantuan di Desa Koto Perambahan Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar.....	119
Lampiran II: Dokumentasi Dengan Petugas Program Bantuan Stimulant Perumahan Swadaya (BSPS) dalam Penyediaan Rumah di Desa Koto Perambahan Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar.....	121
Lampiran III: Daftar Kusisioner untuk Petugas Program Bantuan Stimulant Perumahan Swadaya (BSPS) dalam Penyediaan Rumah Bantuan di Desa Koto Perambahan Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar.	129
Lampiran IV: Daftar Kusisioner untuk Masyarakat Tentang Pelaksanaan Program Bantuan Stimulant Perumahan Swadaya (BSPS) dalam Penyediaan Rumah Bantuan di Desa Koto Perambahan Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar.	136
Lampiran V: Daftar Wawancara untuk Petugas Program Bantuan Stimulant Perumahan Swadaya (BSPS) dalam Penyediaan Rumah Bantuan di Desa Koto Perambahan Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar.	143
Lampiran VI: Daftar Nama Responden Petugas Program Bantuan Stimulant Perumahan Swadaya (BSPS) dalam Penyediaan Rumah di Desa Koto Perambahan Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar.....	147
Lampiran VII: Daftar Nama Masyarakat Penerima Rumah Bantuan Program Bantuan Stimulant Perumahan Swadaya (BSPS) dalam Penyediaan Rumah Bantuan di desa Koto Perambahan Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar.	148
Lampiran VIII: Surat Keputusan Dekan Fisipol Universitas Islam Riau Tentang Penetapan Dosen Pembimbing.	151
Lampiran IX: Surat Keterangan Riset/Pra Riset Dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.....	152
Lampiran X: Surat Riset dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Islam Riau untuk Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Wilayah Riau	153
Lampiran XI: Surat Izin Penelitian dari Desa Koto Perambahan Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar.....	154
Lampiran XII: Sertifikat Baca Al-Qur'an	156



PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian konferehensif Usulan Penelitian yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rozi Alpendra
NPM : 167110858
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Implementasi Program Bantuan Stimulant Perumahan Swadaya (BSPS) dalam Penyediaan Rumah Bantuan di Desa Koto Perambahan Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar.

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian Usulan Konferehensif ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya nyatakan :

1. Ujian Konferehensif ini adalah benar hasil karya sendiri (tidak ada unsur plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacuh pada kaedah-kaedah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah.
2. Keseluruhan persyaratan administrasi, akademi, dan keuangan yang melekat pada ini adalah benar-benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas.
3. Apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara sah saya bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan yang ada pada butir 1 dan butir 2 tersebut diatas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil Ujian Konferehensif yang telah saya ikuti dan serta sanksi lain sesuai dengan ketentuan dari fakultas dan universitas serta Hukum Negara Republik Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 30 juni 2022.

Pernyataan,



Rozi Alpendra

UNIVERSITAS ISLAM RIAU



PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN STIMULANT PERUMAHAN SWADAYA (BSPS) DALAM PENYEDIAAN RUMAH BANTUAN DI DESA KOTO PERAMBAHAN KECAMATAN KAMPA KABUPATEN KAMPAR

ABSTRAK

ROZI ALPENDRA

Kata Kunci : Program Stimulant, Perumahan Swadaya Layak Huni

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menjelaskan pelaksanaan program bantuan stimulant perumahan swadaya (BSPS) dalam penyediaan rumah di Desa Koto Perambahan Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar. Bantuan Stimulant Perumahan Swadaya (BSPS) adalah fasilitas pemerintah, yang merupakan sejumlah bantuan yang diberikan kepada orang-orang yang berpenghasilan rendah. Sementara itu, kekuatan pembangunannya adalah membangun perumahan karena inisiatif dan usaha masyarakat sesuai dengan individu atau kelompok, termasuk perbaikan, pemulihan, pembangunan rumah baru dan lingkungan. Teori yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 4 teori yaitu : kebijakan yang dilaksanakan, kelompok sasaran, organisasi pelaksana dan factor lingkungan. Dalam mengumpulkan data penelitian menggunakan teknik survey deskriptif dengan pendekatan metode kuantitatif. Penelitian ini ini menarik dan menetapkan sejumlah sampel dari populasi yang dijadikan sumber data dan informasi, dimana sampel tersebut ditarik atau ditetapkan dari sejumlah populasi penelitian, dan mengutamakan alat pengumpulan data daftar kusioner dan daftar pedoman wawancara sebagai alat dasar untuk menjelaskan variabel penelitian dengan tujuan untuk memaparkan menjelaskan, dan menggambarkan kenyataan yang ada. Hasil penelitian ini menunjukkan pelaksanaan Program Bantuan Stimulant Perumahan Swadaya dalam penyediaan rumah layak huni di Desa Koto Perambahan Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar belum berjalan Optimal. Termasuk kurangnya partisipasi dan kesadaran masyarakat serta kurangnya pengetahuan tentang program BSPS. Selain itu, dalam tahap pembangunan yang harus dilakukan dalam gotong royong dengan kelompok yang telah ditentukan tetapi pada kenyataannya masih dilakukan secara individual.



IMPLEMENTATION OF THE STIMULANT HOUSING ASSISTANCE PROGRAM FOR THE PROVISION OF ASSISTANT HOUSING IN KOTO PERAMBAHAN VILLAGE, KAMPA DISTRICT, KAMPAR REGENCY

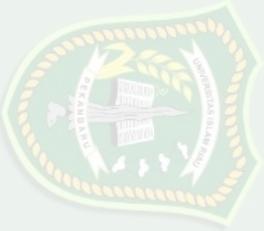
ABSTRACT

ROZI ALPENDRA

Keywords: Stimulant Program, Self-Helpful Housing

This study aims to analyze and explain the implementation of the self-help housing stimulant assistance program (BSPS) in the provision of house in Koto Perambahan Village, Kampa District, Kampar Regency. Self-help Housing Stimulant Assistance (BSPS) is a government facility, which is a number of assistance provided to people with low incomes. Meanwhile, its development strength is building housing because of community initiatives and efforts according to individuals or groups, including repair, restoration, construction of new houses and the environment. The theory used in this study consists of 4 theories, namely: implemented policies, target groups, implementing organizations and environmental factors. In collecting research data using a descriptive survey technique with a quantitative method approach. This study draws and sets a number of samples from the population that are used as sources of data and information, where the samples are drawn or determined from a number of research populations, and prioritizes data collection tools, questionnaire lists and interview guide lists as basic tools to explain research variables with the aim of explaining explain, and describe the reality that exists. The results of this study indicate that the implementation of the Self-Help Housing Stimulant Assistance Program in providing suitable housing in Koto Perambahan Village, Kampa District, Kampar Regency has not run optimally. This includes the lack of public participation and awareness as well as the lack of knowledge about the BSPS program. In addition, in the development stage, it must be done in mutual cooperation with a group that has been determined but in reality it is still done individuall

**UNIVERSITAS
ISLAM RIAU**



BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan Negara Kesatuan yang dijalankan oleh Pemerintah Negara Indonesia guna untuk mencapai tujuan Negara Indonesia yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, pada alinea ke-4 (empat) yang berbunyi: Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Republic Indonesia yang melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk Memajukan Kesejahteraan Umum, Mencerdaskan Kehidupan Bangsa, dan ikut Melaksanakan Ketertiban Dunia yang Berdasarkan Kemerdekaan, Perdamaian Abadi dan Keadilan Social, maka disusun Kemerdekaan Indonesia dalam Undang-Undang Dasar Negara Indonesia.

Permasalahan Kemiskinan yang cukup Kompleks Membutuhkan Intervensi semua pihak secara bersama dan Terkoordinasi. Penduduk Miskin dari tahun ketahun mengalami Peningkatan, ini dapat dilihat dari segi Kuantitas atau jumlah Masyarakat, baik di Desa maupun di Kota.

Keputusan menteri pekerjaan umum dan perumahan rakyat nomor 115 /KPTS/M/2022 tentang besaran nilai dan lokasi bantuan stimulant perumahan swadaya tahun anggaran 2022 bahwa melaksanakan ketentuan pasal 10 dan pasal 16 ayat(2) peraturan menteri pekerjaan umum dan perumahan rakyat nomor

07/PRT/M/2018 tentang bantuan stimulant perumahan swadaya, perlu menetapkan keputusan menteri pekerjaan umum dan perumahan rakyat tentang besaran nilai dan lokasi bantuan stimulant perumahan swadaya tahun anggaran 2022. Peraturan Daerah Provinsi Riau sebagaimana diamanatkan dalam Pembentukan UU nomor 4 tahun 2016 dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau dan Peraturan Gubernur Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau, maka Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau mempunyai tugas dan fungsi “Menyelenggarakan fungsi Perumusan Kebijakan, Pelaksanaan Kebijakan Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan, Pelaksanaan Administrasi pada Sekretariat, Bidang Perumahan Bidang Kawasan Permukiman Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum dan Bidang Pertanahan serta Menyelenggarakan Kewenangan yang dilimpahkan Pemerintah kepada Gubernur sesuai dengan Peraturan Perundang Undangan”. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau merupakan perangkat Daerah yang membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan tugas Pemerintah Daerah berdasarkan Azas Otonomi Daerah dan tugas Pembantuan pada ruang lingkup Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Disamping tugas tersebut juga mempunyai Kewenangan melaksanakan Dekonsentrasi yang dilimpahkan oleh Pemerintah kepada Gubernur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Sebagai pertanggungjawaban Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau atas kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2017 maka disusunlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah



(LAKIP), yang disusun berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku antara lain:

- a) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
- b) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- c) Permenpan Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Revisi atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2017 ini memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan sebagai penjabaran dari rencana program/kegiatan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan yang mengidikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Tolak ukur pencapaian sasaran kinerja tahun anggaran 2017. dapat dilihat dengan membandingkan capaian kinerja (*performance results*) tahun 2017 dengan Rencana Kerja (*performance plan*) tahun 2017. Dengan analisis capaian kinerja terhadap realisasi kinerja akan memungkinkan diidentifikasinya sejumlah kinerja (*performa grip*) bagi perbaikan kinerja dimasa yang akan datang.

Adapun Laporan Akuntabilitas Kinerja bermanfaat untuk:

1. Sebagai bahan evaluasi Akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan;
2. Penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang;
3. Penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang;
4. Penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.



Berdasarkan Peraturan Gubernur Riau Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, Serta Tata Kerja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau, adalah sebagai berikut:

1. Kedudukan

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris daerah.

2. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Riau Tentang rincian Tugas, dan tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Menyebutkan Bahwa Dinas Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan mempunyai tugas dan fungsi :

- a) Penyelenggaraan perumusan kebijakan dan pelaksanaan tugas pada Sekretariat, Bidang Perumahan, Bidang Kawasan Permukiman, Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum dan Bidang Pertanahan;
- b) Penyelenggaraan pelaksanaan kebijakan pada Sekretariat, Bidang Perumahan, Bidang Kawasan Permukiman, Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum dan Bidang Pertanahan;
- c) Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan pada Sekretariat, Bidang Perumahan, Bidang Kawasan Permukiman, Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum dan Bidang Pertanahan;
- d) Pelaksanaan administrasi pada Sekretariat, Bidang Perumahan, Bidang Kawasan Permukiman, Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum dan Bidang Pertanahan;
- e) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.



DOKUMEN INI ADALAH ARSIP MILIK :

PERPUSTAKAAN SOEMAN HS

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

ISLAM RIAU

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi diatas Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau dipimpin oleh seorang kepala dinas.

3. Susunan Organisasi

Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur dengan didukung oleh Struktur Organisasi sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat
 - a. Subbagian Perencanaan Program
 - b. Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Brang Milik Daerah.
 - c. Subbagian Umum dan Kepegawaian
3. Bidang Perumahan
 - a. Seksi Perencanaan dan Pengendalian Perumahan
 - b. Seksi Penyediaan dan Rehabilitasi Perumahan
 - c. Seksi Pendataan dan Sertifikasi Penyelenggara Perumahan
4. Bidang Kawasan Permukiman
 - a. Seksi Perencanaan dan Pengendalian Kawasan Permukiman
 - b. Seksi Infrastruktur Permukiman Kawasan Strategis
 - c. Seksi Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman
5. Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum
 - a. Seksi Perencanaan Teknis Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum
 - b. Seksi Pelaksanaan dan Pemberdayaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum
 - c. Seksi Monitoring dan Evaluasi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum
6. Bidang Pertanahan
 - a. Seksi Perencanaan dan Pengadaan Tanah
 - b. Seksi Sengketa Tanah
 - c. Seksi Ganti Rugi Tanah

4. Tata Kerja Dinas Perumahan

Setiap unsur dilingkungan Dinas Perumahan dan kawasan Permukiman dalam melaksanakan tugas dan fungsi harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan



Sinkronisasi baik dalam lingkungan Dinas Perumahan dan kawasan permukiman sendiri maupun dalam hubungan antar Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan perangkat Daerah atau Lembaga lain yang terkait.

Ditingkat kabupaten, Bupati membentuk tim koordinasi Kabupaten yang terdiri dari dinas cipta karya dan tata ruang kabupaten Kampar, BAPPEDA (Badan Perencanaan dan pembangunan Daerah)kabupaten Kampar dan tingkat yang lainnya. Secara fisik bangunan, masih banyak ditemui daerah-daerah di kabupaten Kampar yang mana pemukiman penduduknya membangun rumah sebagai tempat tinggal yang tidak sesuai dengan standar bangunan yang sehat dan layak hui, hal ini diakibatkan salah satunya adalah factor ekonomi dan ketidakmampuan masyarakat itu sendiri kabupaten Kampar dengan luas wilayah 11.289,28 KM persegi dengan jumlah penduduk hingga pertahun 2009 adalah sebanyak 679.285 jiwa dan tergolong miskin sebanyak 24.966 rumah tangga (sumber : SK Bupati No : 414 / BKPPM / 276 / 2009).

Dalam peraturan menteri Perumahan Rakyat Tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Bantuan stimulant perumahan swadaya yang selanjutnya disingkat BPSPS adalah bantuan pemerintah bagi masyarakat berpenghasilan rendah agar dapat mendorong dan meningkatkan keswadayaan dalam peningkatan kualitas rumah dan pembangunan rumah beserta sarana prasarana dan utilitas umum. Bantuan stimulant perumahan sawadaya adalah program pemerintah untuk masyarakat berpenghasilan

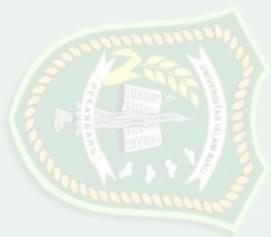


rendah yang disingkat MBR. Masyarakat berpenghasilan rendah merupakan masyarakat yang mempunyai ketrbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah dalam memperoleh rumah. BPS pada prinsipnya berupaya mendorong prakarsa dan upaya masyarakat agar memiliki kemampuan untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi sendiri pembangunan rumahnya secara swadaya. Hal ini diperuntukkan bagi rumah tidak layak huni menjadi rumah yang layak huni. Terkait program Rumah Bantuan, telah dikeluarkan instruksi oleh Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah.

Program rumah bantuan ini dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin khususnya dan masyarakat pedesaan pada umumnya melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat. Dengan demikian, kegiatan ekonomi, social dan budaya masyarakat pedesaan semakin bertumbuh dang berkembang.

Program rumah bantuan ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat Desa Koto Perambahan Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar, melalui cara :

1. Menyediakan rumah yang sederhana sehat bagi masyarakat miskin pedesaan.
2. Meningkatkan peran serta masyarakat, mulai dari tahap perencanaan, pengawasan dan pengendalian pemamfaatan serta pemeliharaan.
3. Memberi peluang kerja bagi masyarakat pedesaan dan sekaligus dapat meningkatkan pendapatan masyarakat melalui keterlibatan masyarakat dalam kegiatan kontrksi.
4. Mendorong terlaksananya penyelenggaraan pembangunan perumahan baik masyarakat maupun pemerintah yang lebih vcerdas, jujur, bertanggung jawab, transparan dan akuntabel.



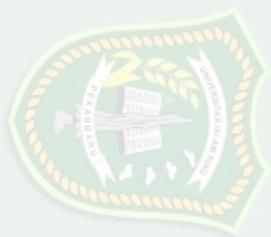
ISLAM RIAU

Untuk masyarakat yang menjadi sasaran penerima rumah bantuan harus sesuai dengan keputusan menteri pemukiman dan prasarana wilayah nomor 24/KPTS/M/2003 tentang pengadaan perumahan dan pemukiman dengan dukungan fasilitas subsidi perumahan, butir pertama “pengaturan tentang kelompok sasaran penerima subsidi perumahan dalam rangka kepemilikan/pembelian dan pembangunan /perbaikan rumah sederhana sehat (RS sehat/RSH) untuk masyarakat berpenghasilan rendah.

Sementara untuk kriteria masyarakat penerima rumah bantuan di dusun yang ada di desa Koto Perambahan kecamatan kampa kabupaten Kampar adalah sebagai berikut:

1. Data KK sangat miskin yang memiliki rumah tidak layak huni atau belum memiliki rumah yang selanjutnya akan dievaluasi dengan identifikasi lokasi
2. Memilih rumah yang tidak layak huni (atap rumbia, dinding kulit kayu, rumah reot dan lain-lain) atau belum memiliki rumah
3. Memiliki tanah sendiri atau hibah, bila tidak memiliki tanah, harus ada surat tidak ada tidak ada permasalahan masalah status tanah dari kepala desa
4. Usia lanjut (60 tahun keatas) yang masih memiliki tanggung jawab keluarga (anak dibawah umur 13 tahun)
5. Janda yang masih memiliki tanggungan keluarga (anak-anak dibawah umur 13 tahun)
6. Keluarga lengkap atau duda dengan tanggungan banyak (anak-anak dibawah umur 13 tahun)
7. Kepala keluarga cacat tetap dan memiliki tanggungan keluarga (anak-anak dibawah umur 13 tahun)
8. masyarakat berpenghasilan rendah atau tidak berpenghasilan tetap

Dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah kabupaten Kampar dalam proses Pelaksanaan Program Rumah Bantuan ini, mulai dari proses



perencanaan hingga proses onitring dan evaluasi, diharapkan Program Rumah Bantuan ini bisa mencapai sasaran yg tepat.

Pelaksanaan Program Rumah Bantuan di Desa Koto Perambahan Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar berlaku dilaksanakan sejak tahun 2019 lalu. Ketidakmampuan masyarakat miskin untuk mendapat rumah yang layak dan terjangkau serta memenuhi standar lingkungan pemukiman yang responsive (aman, sehat, harmonis dan berkelanjutan). Hal ini disebabkan karena terbatasnya akses terhadap sumber daya kunci termasuk informasi, terutama yang berkaitan dengan pertahanan dan pembiayaan perumahan.

Sedangkan desa Koto Perambahan yang menjadi objek penelitian ini terdiri dari 5 dusun diantaranya :

1. Dusun jawi-jawi
2. Dusun padang Tengah
3. Dusun perambahan
4. Dusun kampung panjang
5. Dusun padang merbau barat
6. Dusun padang merbau timur

Dalam program Bantuan Stimulant Perumahan Swadaya ini (BSPS) berdasarkan lokasi yang telah ditetapkan Menteri dan data calon penerima rumah bantuan, BP2P dibantu Satker dan PPK melakukan pembentukan tim pelaksana kegiatan atau orang yang bertanggung jawab yang terdiri atas :

1. Staf pendukung





Pembentukan staf pendukung dilakukan berdasarkan analisis kebutuhan PPK yang disetujui kasatker dan kepala BP2P .

2. Tim konsultan Provinsi

Tim konsultan Provinsi merupakan Konsultan perorangan atau badan hukum yang ditunjuk melalui seleksi konsultan berdasarkan kualifikasi Tenaga Ahli yang diperlukan PPK berdasarkan kerangka acuan kegiatan. Konsultan Provinsi melakukan kontrak dengan PPK.

3. Tim verifikasi

Tim verifikasi dibentuk melalui keputusan kepala BP2P dengan susunan organisasi terdiri atas ketua, sekretaris, dan anggota. Ketua dan sekretaris berasal dari unsur BP2P, sedangkan anggota berasal dari unsur BP2P, unsur OPD yang membidangi perumahan dan kawasan pemukiman kabupaten atau kota, dan unsur desa atau kelurahan. Ketua tim verifikasi BP2P diperankan oleh kasih wilayah BP2P, dalam hal diperlukan, tim verifikasi dapat ditambahkan dari unsur kecamatan dan OPD yang melaksanakan urusan perencanaan, urusan pemberdayaan masyarakat, dan urusan social, tokoh masyarakat, dan aparat keamanan dan penegak hukum.

4. Fasilitator

Perekrutan fasilitator oleh BP2P dibantu Satker dan PPK dilakukan berdasarkan kualifikasi yang dipersyaratkan sesuai syarat dan ketentuan dalam panduan teknis atas TFL dan Korkab.

**UNIVERSITAS
ISLAM RIAU**

DOKUMEN INI ADALAH ARSIP MILIK :

PERPUSTAKAAN SOEMAN HS

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Tabel I. 1: Jumlah dusun yang terdata dan yang tidak terdata untuk mendapatkan rumah bantuan pada tahun 2019 – 2020 di Desa Koto Perambahan Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar.

NO	NAMA DUSUN	JUMLAH RUMAH YG TERDATA	JUMLAH YANG MENDAPATKAN	JUMLAH YANG BELUM MENDAPATKAN
1	DUSUN JAWI-JAWI	41	17	24
2	DUSUN KP.PANJANG	34	11	23
3	DUSUN PERAMBAHAN	37	13	24
4	DUSUN PADANG MERBAU TIMUR	22	4	18
5	DUSUN PADANG MERBAU BARAT	24	6	18
6	DUSUN PADANG TENGAH	17	2	15
	TOTAL	175	53	122

Sumber: Data Olahan Penulis 2022

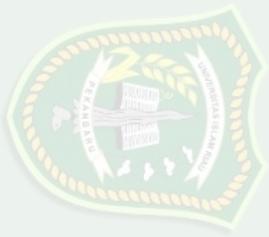
Dari tabel 1.1 menunjukkan bahwa pelaksanaan program bantuan stimulant perumahan swadaya (BSPS) dalam penyediaan rumah bantuan didesa Koto Perambahan kecamatan kampa kabupaten kampar. Pada tahun 2019-2020 pihak desa mendata jumlah penyediaan rumah bantuan di desa Koto Perambahan sebanyak 175 rumah yang terletak di 6 dusun yaitu dusun jawi-jawi, dusun kp. Panjang, dusun perambahan, dusun padang merbau timur, dusun padang merbau barat, dan dusun

ISLAM RIAU

padang tengah dan disini jumlah rumah bantuan yang sudah disiapkan atau yg telah disediakan dari desa Koto Perambahan kecamatan kampa kabupaten Kampar sebanyak 53 unit, dan pihak desa sudah menyediakan 53 unit yang sudah mendapatkan rumah bantuan dan 122 yang belum mendapatkan rumah bantuan yang terdapat di 6 dusun yaitu dusun jawi-jawi, dusun kp. Panjang, dusun perambahan, dusun padang merbau timur, dusun padang merbau barat, dan dusun padang tengah di Desa Koto Perambahan.

Dari data diatas dapat menunjukkan bahwa jumlah masyarakat yang terdata disetiap dusun khususnya di Desa Koto Perambahan sebanyak 175 dan jumlah rumah bantuan yang telah di siapkan Desa Koto Perambahan sebanyak 53 unit rumah pada tahun 2019-2020, disini jumlah yang belum mendapatkan rumah bantuan sebanyak 122 unit rumah. bagi masyarakat yang terdata belum mendapatkan rumah bantuan akan menunggu giliran untuk mendapatkan jatah rumah bantuan pada tahun depan dikarenakan keterbatasan dana/anggaran dari pemerintah. dana yang dikeluarkan oleh pihak Desa Koto Perambahan lebih kurang ± Rp 927.000.000 hanya bisa membangun sebanyak 53 unit rumah, bagi yang belum mendapatkan rumah bantuan sebanyak 122 rumah akan menunggu gilirannya masing-masing pada tahun depan.

Disini program BPS di Desa Koto Perambahan mengeluarkan dana Rp 17.500.000 / unit, yang mana (bahan = 15.000.000, upah tukang = 2.500.000). Dana yang diberikan kepada masyarakat dalam bentuk uang sebesar Rp 17.500.000 dengan



syarat harus mempunyai tanah atas nama dia sendiri untuk bisa membangun rumah bantuan di Desa Koto Perambahan.

Dilapangan, penulis jumpai berbagai fenomena yang menarik bagi penulis untuk dijadikan sebagai bahan penelitian, diantaranya:

1. Masih ada janda yang memiliki tanggungan (anak dibawah umur 13 tahun) yang belum mendapatkan rumah layak huni sedangkan janda tersebut termasuk kedalam kategori yang akan mendapatkan rumah layak huni, pada tahun 2019-2020 dari data yang didapatkan ada sebanyak 14 janda yang belum mendapatkan rumah layak huni di 6 dusun yang ada di Desa Koto Perambahan Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar. Berikut Jumlah janda disetiap dusun yg belum mendapatkan rumah layak huni :

- Dusun jawi-jawi = 3
- Dusun kp. Panjang = 1
- Dusun perambahan = 2
- Dusun padang merbau barat = 4
- Dusun padang merbau timur = 4
- jumlah = 14

2. Kepala keluarga cacat tetap dan memiliki tanggungan keluarga (anak dibawah umur 13 tahun dan istri) yang belum mendapatkan rumah layak huni. Dan pada tahun 2019-2020 terdata ada 8 kepala keluarga cacat tetap yang belum mendapatkan rumah layak huni di Desa Koto Perambahan



Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar. Berikut Jumlah kepala keluarga cacat tetap disetiap dusun yang belum mendapatkan rumah layak huni:

- Dusun jawi jawi = 4
- Dusun kp panjang = 1
- Dusun perambahan = 2
- Dusun padang tengah = 1
- Jumlah = 8

3. Adanya masyarakat yang memiliki penghasilan tetap dan mendapatkan rumah layak huni sedangkan masyarakat tersebut tidak termasuk kategori orang yang akan mendapatkan rumah layak huni. Pada tahun 2019-2020 terdata bahwa ada 5 orang yang mendapatkan rumah layak huni di Desa Koto Perambahan Kecamatan kampa Kabupaten Kampar, sedangkan masyarakat tersebut berpenghasilan tetap dan tidak termasuk untuk mendapatkan rumah layak huni. Jumlah masyarakat yg berpenghasilan tetap disetiap dusun yg mendapatkan rumah layak huni:

- Dusun perambahan = 3
- Dusun kp panjang = 1
- Dusun padang tengah = 1
- Jumlah = 5

**UNIVERSITAS
ISLAM RIAU**



DOKUMEN INI ADALAH ARSIP MILIK :

PERPUSTAKAAN SOEMAN HS

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Dari pernyataan diatas bisa dilihat pekerjaan masyarakat yang berpenghasilan tetap tersebut dari tabel dibawah ini :

Tabel I. 2:jumlah Masyarakat yang berpenghasilan tetap tetapi mendapatkan bantuan rumah Program BSPS pada tahun 2019-2020 di Desa Koto Perambahan Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar.

NO	PEKERJAAN	GAJI/BULAN	JUMLAH
1	SECURITY	Rp. 2.700.000/BULAN	3
2	GURU HONORER	Rp. 800.000/BULAN	1
3	KARYAWAN PT SWASTA	Rp. 1.800.000/BULAN	1

Sumber : Data Olahan Penulis 2022

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa masyarakat yang berpenghasilan tetap mendapatkan rumah bantuan atau rumah layak huni sedangkan masyarakat tersebut tidak ternasuk kedalam sasaran suatu program tersebut atau tidak termasuk kedalam kategori orang-orang yang akan mendapatkan rumah layak huni di Desa Koto Perambahan Kecamatan kampa Kabupaten Kampar.

B. Rumusan Masalah

Dalam Pengamatan Penulis, Pelaksanaan Program Rumah Bantuan di Desa Koto Perambahan Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar, Masih Belum Terpenuhi. Hal ini ditandai dengan masih adanya Anggota Masyarakat yang masih Menempati Rumah tidak Layak Huni (dibawa standar rumah sehat) di Desa-Desa yang ada di kecamatan kampa kabupaten Kampar.

1. Bagaimana analisis pelaksanaan bantuan stimulant perumahan swadaya (BSPS) dalam penyediaan rumah bantuan di Desa Koto Perambahan Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar.
2. Apa saja faktor penghambat dalam pelaksanaan Bantuan Stimulant Perumahan Swadaya (BSPS) dalam penyediaan rumah bantuan di Desa Koto Perambahan Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar.

C. Tujuan Penelitian

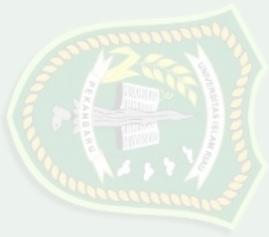
a. Tujuan Penelitian

Dari beberapa permasalahan yang telah penulis paparkan maka dirumuskan tujuan dari penelitian diantaranya sebagai berikut :

1. Menganalisis dan menjelaskan pelaksanaan program bantuan stimulant perumahan swadaya (BSPS) dalam penyediaan rumah bantuan di Desa Koto Perambahan Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar.
2. Mengetahui dan menjelaskan faktor penghambat buruknya pelaksanaan program bantuan stimulant perumahan swadaya (BSPS) dalam penyediaan rumah bantuan di Desa Koto Perambahan Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar.

b. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis yaitu penelitian ini diharapkan mempunyai memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu administrasi public, khususnya yang berkaitan dengan kajian perencanaan disuatu instansi pemerintahan.



2. Kegunaan Praktis, yaitu diharapkan agar penelitian bisa digunakan sebagai bahan masukan bagi Desa Koto Perambahan dalam melaksanakan perencanaan
3. Secara Akademis, penelitian ini diharapkan menjadi dsar sebagai peneliti selanjutnya, dan dapat memberikan informasi berupa masukan atau bahan dan data sekunder bagi kalangan Akademis.



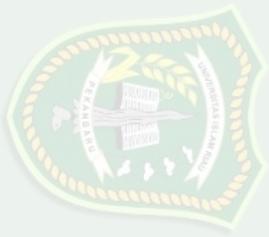
**UNIVERSITAS
ISLAM RIAU**

DOKUMEN INI ADALAH ARSIP MILIK :

PERPUSTAKAAN SOEMAN HS

UNIVERSITAS ISLAM RIAU





BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

A. Studi Kepustakaan

1. Konsep Administrasi

Zulkifli (2009:32) memandang administrasi sebagai suatu proses, aktivitasnya diawali oleh menetapkan suatu kebijakan, dan selanjutnya kebijakan tersebut dilaksanakannya melalui proses kerjasama dari sekelompok orang untuk mencapai sasaran atau sejumlah tujuan tertentu yang ditetapkan.

Dalam studi administrasi, tujuan yang dimaksud itu adalah tujuan ideal (teoritis) setiap organisasi, yaitu menciptakan efektivitas dan efisiensi dalam seluruh bidang kegiatan organisasi. Di Indonesia kita mengenal dan memahami “administrasi” dari dua bahasa yang berbeda dengan makna yang berbeda pula. Yang pertama administrative dari bahasa belanda yang dikenal sejak awal masuknya pengaruh system administrasi klasik. Administrasi dalam arti sempit adalah berupa kegiatan pencantatan, pengolahan,, pengumpulan, pemberian nomor atau kode surat, pengetikan, penggandaan, penyimpanan, pengiriman, informasi yang diterima atau yang dikeluarkan oleh organisasi atau institusi. Administrasi dalam arti luas, yakni proses (rangkaiian) kegiatan usaha kerjasama kelompok orang secara terorganisasi mencapai tujuan yang ditetapkan, Menurut Syafri (2012:11) ada 8 unsur-unsur administrasi, yaitu:

UNIVERSITAS
ISLAM RIAU



a. Organisasi.

Organisasi merupakan unsur utama bagi kelompok orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu karena organisasi merupakan wadah pengelompokan orang dan pembagian tugas dan sekaligus tempat berlangsung berbagai aktivitas (proses) bagi pencapaian tujuan. Organisasi menjadi titik utama dalam pelaksanaan sebuah kegiatan karena merupakan tempat untuk pelaksanaan tujuan tersebut.

b. Manajemen

Manajemen merupakan proses pencapaian tujuan melalui orang lain. Didalam manajemen ada aktivitas menggerakkan kelompok orang yang merupakan bagian dari organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

c. Komunikasi

Komunikasi merupakan suatu proses penyampaian pesan (informasi) dari seseorang kepada orang lain melalui saluran/media. Komunikasi dilakukan secara sadar terhadap suatu peristiwa, diterima akal, secara berurutan (sistematis), tahapan akan menyatu/menunjukkan korelasi terhadap peristiwa yang dialami oleh pendengar.

d. Kepegawaian

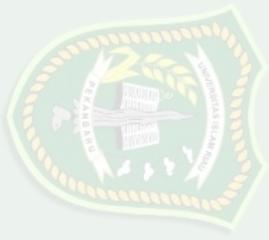
Sekelompok orang yang tergabung dalam proses kerja sama suatu organisasi hanya akan menjadi kumpulan orang yang tidak bermanfaat apabila tidak melakukan pekerjaan apapun. Pegawai harus melakukan aktivitas yang berkaitan dengan kegiatan yang menjadi sasaran perusahaan.

UNIVERSITAS
ISLAM RIAU

DOKUMEN INI ADALAH ARSIP MILIK :

PERPUSTAKAAN SOEMAN HS

UNIVERSITAS ISLAM RIAU



e. Keuangan

Setiap tujuan yang ingin diraih memerlukan sejumlah uang. Keuangan dalam administrasi berkaitan dengan pembiayaan dalam usaha kerja sama pencapaian tujuan.

f. Pembekalan

Pembekalan merupakan sejumlah barang kebutuhan/peralatan yang diperlukan dalam pencapaian tujuan rangkaian aktivitas merencanakan, mengadakan, mengatur pemakaian, penyimpanan, pengendalian, perawatan, dan penghapusan barang-barang yang merupakan bagian kegiatan dalam administrasi.

g. Tata Usaha

Tata usaha adalah kegiatan pencatatan, pengolahan, pengumpulan, pemberian nomor/kode surat, pengetikan, penggandaan, penyimpanan, pengiriman, berbagai informasi yang diterima yang dikeluarkan oleh suatu organisasi/institusi dalam upaya kerja sama untuk mencapai tujuan tertentu.

h. Hubungan Masyarakat

Hubungan masyarakat adalah suatu upaya menjaga eksistensi melalui pencapaian hubungan baik dan dukungan masyarakat sekeliling terhadap usaha kerja sama yang sedang dilakukan tersebut. Dari pendapat Syafri (2012:11). dapat disimpulkan bahwa administrasi adalah rangkaian kegiatan kerjasama yang dilakukan untuk mencapai sasaran ataupun tujuan yang telah ditetapkan bersama-sama dengan sekelompok orang yang terlibat didalamnya.

**UNIVERSITAS
ISLAM RIAU**

DOKUMEN INI ADALAH ARSIP MILIK :

PERPUSTAKAAN SOEMAN HS

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

2. Konsep Organisasi

Organisasi berasal dari bahasa Yunani yaitu “orgonon” dan istilah latin “organum” yang dapat berarti alat, bagian, anggota atau badan. Organisasi adalah sarana atau alat mencapai tujuan. Oleh karena itu dikatakan organisasi adalah wadah atau wahana, kegiatan orang-orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan. Dalam wadah kegiatan itu setiap orang harus bekerja sama untuk mencapai tujuan. Dalam wadah kegiatan itu setiap orang harus jelas tugas wewenang dan tanggung jawabnya, hubungan dan tata kerjanya. Pengertian yang demikian disebut organisasi bersifat statis, karena sekedar hanya melihat pada strukturnya. Disamping itu terdapat pengertian organisasi yang bersifat dinamis. Dalam pengertian ini organisasi dilihat dari sudut dinamikanya, aktivitas atau tindakan daripada tata hubungan yang terjadi dalam organisasi itu, baik yang bersifat formal maupun informal. (Sufian:2018).

Organisasi bukanlah sekedar kumpulan orang dan sekedar pembagian kerja, karena pembagian kerja hanyalah salah satu azaz organisasi. Salah satu azaz tidaklah dapat menjadi pengertian, atau dengan kata lain arti sebagian tidak dapat menjadi arti keseluruhan. Untuk pengertian organisasi yang berarti pembagian kerja lebih tepat dinamakan pengorganisasian. Dalam ensiklopedi administrasi, pengorganisasian diartikan sebagian rangkaian aktivitas menyusun suatu kerangka yang menjadi wadah suatu atau segenap kegiatan usaha yang harus dilaksanakan untuk menetapkan dan menyusun jalinan hubungan kerja antara ketiga macam pandangan para pendapat ahli, dengan demikian diantara ketiga macam pandangan tentang pengertian organisasi,



pandangan yang tepat adalah yang menganggap organisasi sebagai suatu sistem kerjasama, sistem hubungan, dan sistem sosial.

Pada tulisan lainnya, umumnya diberikan batasan bahwa organisasi adalah kumpulan orang-orang yang menundukkan diri pada kepentingan bersama, mengadakan interaksi dan kerjasama secara teratur hingga mencapai tujuan bersama dalam rangka memenuhi kebutuhan dan mengatasi keterbatasan kemampuan pribadi anggotanya masing-masing. Jadi titik berat dalam pengamatan organisasi adalah pada kelompok orang, bagaimanapun bentuknya dan bukan pada proses kegiatannya. Dengan rumusan-rumusan yang tersebut diatas kami simpulkan bahwa pada dasarnya organisasi adalah :

- a. Sekumpulan orang-orang, yaitu orang-orang yang merasa dirinya lemah, mempunyai keterbatasan-keterbatasan kemampuan akan tetapi berkehendak untuk memenuhi kebutuhannya yang dicita-citakan oleh masing-masing pribadinya.
- b. Orang-orang ini berkumpul untuk mengisi kekurangan masing-masing, saling mempengaruhi, hingga keterbatasan-keterbatasan dapat mereka atasi serta lebih memudahkan pemenuhan kebutuhannya, karena itu setiap orang jelas tugas dan wewenangnya.
- c. Karena mereka hidup berkelompok-kelompok maka masing-masing harus memikirkan kebutuhan seluruh anggota kelompok dan tidak hanya terpaku pada kebutuhan pribadi saja.
- d. Dalam rangka memenuhi kebutuhan kelompok itulah masing-masing harus tunduk pada kepentingan bersama, ketentuan-ketentuan yang mengatur kerjasama dan interaksinya.

UNIVERSITAS
ISLAM RIAU

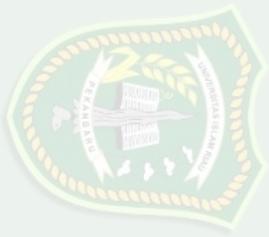


3. Konsep Manajemen

Manajemen berasal dari kata kerja “to manage” yang berarti menangani, mengendalikan, menguasai, mengurus, menyelesaikan sesuatu. Manajer adalah seseorang yang disertai tugas memimpin atau mengurus suatu tugas, lembaga, usaha dan sebagainya. Manajemen juga sebagai ilmu dan seni. Kemudian, manajemen sebagai proses khas yang menggerakkan organisasi adalah sangat penting, karena tanpa manajemen yang efektif tidak akan ada usaha yang akan berhasil cukup lama. Tercapainya tujuan organisasi baik tujuan ekonomis, sosial, dan politik, untuk sebagian besar tergantung kepada komponen para manajer organisasi yang bersangkutan. Manajemen memberikan efektifitas pada usaha manusia. (Sufian:2018)

Fungsi manajemen klasik secara tradisional menurut Hendri Fayol (dalam Sufian:2018) meliputi:

- a. Merencanakan (planning) Merencanakan adalah menentukan sasaran organisasi dan sarana untuk mencapainya. Meskipun suatu perencanaan disusun untuk mencapai tujuan, namun suatu rencana hendaknya juga membawa manfaat. Maksudnya, hasil rencana diperoleh sesuai, atau setidaknya mampu mendekati batasan keinginan yang dirumuskan dalam rencana. Kemudian pencapaiannya diharapkan melalui pelaksanaan yang efisien dan efektif, serta berdaya guna kepada pembuatnya ataupun kepada organisasi. Oleh karena itu maka dibutuhkan perencanaan yang baik. Artinya suatu perencanaan yang dibuat haruslah memperhatikan faktor perumusan penentuan tujuan, kemampuan perencanaan, perumusan rencana, teknis pendataan, atau sifat atau nilai rencana. Agar rencana yang disusun itu benar-benar akurat, maka perencanaan harus juga mendalami teknik-teknik penyusunan rencana yang baik.
- b. Mengorganisasikan (organizing) Mengorganisasikan adalah menetapkan dimana keputusan akan dibuat, siapa yang akan melaksanakan tugas dan pekerjaan, serta siapa yang akan bekerja untuk siapa. Tujuan organisasi harus dirumuskan secara jelas. Tujuan yang telah dirumuskan dengan jelas



akan memudahkan untuk dijadikan pedoman dalam menetapkan haluan organisasi, pemilihan bentuk organisasi, pembentukan struktur organisasi, penentuan macam pekerjaan yang akan dilakukan, dan kebutuhan pejabat. Tujuan yang terumus dengan jelas haruslah diketahui serta diyakini oleh setiap pejabat dalam organisasi sejak dari pucuk pimpinan sampai dengan pegawai yang kedudukannya paling rendah. Karena hanya pejabat yang mengetahui serta meyakini tujuan organisasinya akan dapat bekerja dengan sungguh-sungguh, dapat saling menyumbangkan idenya, pengalamannya, kecakapannya, daya kreasinya, demi tercapainya tujuan yang telah ditentukan.

- c. **Memimpin (leading)** Memimpin adalah memberi inspirasi dan motivasi kepada karyawan untuk berusaha keras mencapai sasaran organisasi. Seorang pemimpin yang baik adalah seorang yang tidak melaksanakan sendiri tindakan-tindakan yang bersifat operasional, tetapi mengambil keputusan, menentukan kebijaksanaan dan menggerakkan orang lain untuk melaksanakan keputusan yang telah diambil sesuai dengan kebijaksanaan yang telah digariskan.
- d. **Mengendalikan (controlling)** Mengendalikan adalah mengawasi kemajuan pencapaian sasaran dan mengambil tindakan koreksi bilamana dibutuhkan.

4. Konsep kebijakan

Menurut Dunn (2003:17) Kebijakan adalah suatu daftar pilihan tindakan yang paling berhubungan yang disusun oleh instansi atau pejabat pemerintah antara lain dalam bidang pertanian, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan, pengendalian kriminalitas, dan pembangunan perkotaan.

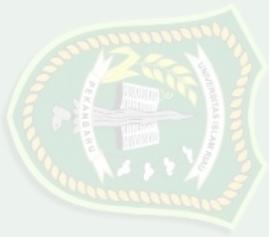
Menurut Dye (2007:17) Kebijakan adalah segala sesuatu yang dikerjakan atau tidak dikerjakan oleh pemerintah, mengapa suatu kebijakan harus dilakukan dan apakah manfaat bagi kehidupan bersama harus menjadi pertimbangan yang holistic agar kebijakan tersebut mengandung manfaat yang besar bagi warganya dan berdampak kecil, dan sebaiknya tidak menimbulkan persoalan yang merugikan. Walaupun demikian pasti ada yang diuntungkan dan ada yang dirugikan, disinilah



letaknya pemerintah harus bijaksana dalam menetapkan suatu kebijakan. Dapat disimpulkan bahwa kebijakan adalah serangkaian pilihan yang mempunyai hubungan satu sama lain. Didalam pilihan itu juga termasuk keputusan untuk mengerjakan atau tidak mengerjakan itu semua termasuk dengan manfaat dan kerugiannya.

Menurut Ealau dan Pewitt (1973:34) Kebijakan adalah sebuah ketetapan yang berlaku diarahkan oleh perilaku yang konsisten dan berulang baik dari yang membuat atau yang melaksanakan kebijakan tersebut. Menurut Timus (1974:256) Kebijakan adalah sebagai prinsip-prinsip yang mengatur tindakan dan diarahkan pada tujuan tertentu.

Pelaksanaan kebijakan adalah sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/ pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Rangkaian implementasi kebijakan dapat diamati dengan jelas yaitu dimulai dari program, ke proyek dan ke kegiatan. Model tersebut mengadaptasi mekanisme yang lazim dalam manajemen, khususnya manajemen sektor publik. Kebijakan diturunkan berupa program-program yang kemudian diturunkan menjadi proyek-proyek, dan akhirnya berwujud pada kegiatan-kegiatan, baik yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat maupun kerjasama pemerintah dengan masyarakat. Implementasi kebijakan merupakan tahap yang krusial dalam proses kebijakan publik. Suatu program kebijakan harus diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan (Budi Winarno, 2012:146).



5. Konsep Implementasi

Tahapan penting dari suatu kebijakan adalah implementasi selalu dianggap merupakan dari apa saja yang telah diputuskan oleh suatu instansi pemerintah (pengambil keputusan). Dengan begitu implementasi merupakan tahapan suatu kebijakan yang di harapkan dapat dilaksanakan secara maksimal dan mencapai tujuan kebijakan itu dibuat. Sedangkan menurut Palton dan Sawich dalam tangklisan (2003:29) menyatakan bahwa implementasi berkaitan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan untuk merealisasikan program, dimana pada posisi ini eksekutif mengatur cara mengorganisir, menginterpretasikan dan menerapkan kebijakan yang telah diseleksi. Implementasi merupakan tahapan penting yang harus dilakukan agar suatu keputusan yang telah diambil dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Namun suatu kebijakan sebelum benar-benar diimplementasikan hendaknya terlebih dahulu disosialisasikan agar tidak adanya alasan seseorang implementator untuk mengingkari mengenai berlakunya suatu kebijakan yang telah dibuat dan dijalankan. Menurut Rian Nugroho (2003:46) Implementasi adalah pelaksanaan dari kebutuhan juga berbentuk perintah atau keputusan, atau putusan pengadilan, proses pelaksanaan berlangsung setelah sejumlah tahapan pengesahan undang-undang, dan kemudian output dalam bentuk pelaksanaan keputusan kebijakan korektif yang bersangkutan. Implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Pengertian-pengertian di atas memperlihatkan bahwa kata implementasi bermuara pada aktivitas, adanya aksi,



tindakan, atau mekanisme suatu sistem. Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. Dalam konteks implementasi kurikulum pendekatan-pendekatan yang telah dikemukakan diatas memberikan tekanan pada proses, suatu aktivitas yang digunakan untuk mentransfer ide/gagasan, program atau harapan-harapan yang dituangkan dalam bentuk kurikulum desain (tertulis) agar dilaksanakan sesuai dengan desain tersebut. Nurdin dan Usman (2002) memandang implementasi sebagai bagian dari program kurikulum. Proses implementasi dilakukan dengan mengikuti perkembangan dan mengadopsi program-program yang sudah direncanakan dan sudah diorganisasikan bentuk kurikulum desain. Jadi implementasi merupakan berbagai pelaksanaan berbagai aturan yang harus dilakukan demi mencapai hasil yang diharapkan yang berdampak baik kepada kehidupan kedepannya. Menurut Hanifah Harsono (2002:67) Implementasi adalah suatu proses untuk melaksanakan kebijakan menjadi tindakan kebijakan dari politik ke dalam administrasi. Pengembangan kebijakan dalam rangka penyempurnaan suatu program. Implementasi mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan, tindakan ini berusaha untuk mengubah keputusan-keputusan tersebut menjadi pola-pola operasional serta berusaha mencapai perubahan-perubahan besar atau kecil sebagaimana yang telah diputuskan sebelumnya. Implementasi pada hakikatnya juga upaya pemahaman apa yang seharusnya terjadi setelah sebuah program dilaksanakan. Implementasi kebijakan



tidak hanya melibatkan instansi yang bertanggungjawab untuk pelaksanaan kebijakan tersebut, namun juga menyangkut jaringan kekuatan politik, ekonomi, dan sosial. Pengertian-pengertian di atas memperlihatkan bahwa kata implementasi bermuara pada aktivitas, adanya aksi, tindakan, atau mekanisme suatu sistem. Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. Oleh karena itu, implementasi tidak berdiri sendiri tetapi dipengaruhi oleh obyek berikutnya yaitu kurikulum. Dalam kenyataannya, implementasi kurikulum menurut Fullan, merupakan proses untuk melaksanakan ide, program atau seperangkat aktivitas baru dengan harapan orang lain dapat menerima dan melakukan perubahan. Dalam konteks implementasi kurikulum pendekatan-pendekatan yang telah dikemukakan di atas memberikan tekanan pada proses, suatu aktivitas yang digunakan untuk mentransfer ide/gagasan, program atau harapan-harapan yang dituangkan dalam bentuk kurikulum desain (tertulis) agar dilaksanakan sesuai dengan desain tersebut. Masing-masing pendekatan itu mencerminkan tingkat pelaksanaan yang berbeda. Dalam kaitannya dengan pendekatan yang dimaksud, Nurdin dan Usman (2004) menjelaskan bahwa pendekatan pertama, menggambarkan implementasi itu dilakukan sebelum penyebaran (desiminasi) kurikulum desain. Kata proses dalam pendekatan ini adalah aktivitas yang berkaitan dengan penjelasan tujuan program, mendeskripsikan sumber-sumber baru dan mendemonstrasikan metode pengajaran yang digunakan. Pendekatan kedua, menurut Nurdin dan Usman (2002) menekankan pada fase penyempurnaan.



Kata proses dalam pendekatan ini lebih menekankan pada interaksi antara pengembang dan guru (praktisi pendidikan). Pengembang melakukan pemeriksaan pada program baru yang direncanakan, sumber-sumber baru, dan memasukkan isi/materi baru ke program yang sudah ada berdasarkan hasil uji coba di lapangan dan pengalaman-pengalaman guru. Interaksi antara pengembang dan guru terjadi dalam rangka penyempurnaan program, pengembang mengadakan lokakarya atau diskusi-diskusi dengan guru-guru untuk memperoleh masukan. Implementasi dianggap selesai manakala proses penyempurnaan program baru dipandang sudah lengkap. Sedangkan pendekatan ketiga, Nurdin dan Usman (2002) memandang implementasi sebagai bagian dari program kurikulum. Proses implementasi dilakukan dengan mengikuti perkembangan dan men gadopsi program-program yang sudah direncanakan dan sudah diorganisasikan dalam bentuk kurikulum desain (dokumentasi).

Van Meter dan Van Horn dalam Wahab (2014:135) mengemukakan bahwa Implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individual/pejabat-pejabat atau kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan. Dalam melakukan aktifitasnya pemerintah melakukan dua macam tindakan, yaitu tindakan biasa (feitelijkehandeligen) dan tindakan hokum (rechtshandeli-ngen). Dalam kajian hokum , yang terpenting dikemukakan adalah tindakan dalam kategori kedua, rechtshandelingen. Tindakan hukum pemerintah adalah tindakan yang dilakukan oleh badan atau pejabat tata usaha negara dalam rangka melaksanakan urusan



pemerintahan. Tindakan pemerintah atau pun pejabat-pejabat dalam pembuatan kebijakan memiliki beberapa unsur yaitu sebagai berikut:

1. Perbuatan itu dilakukan oleh aparat pemerintah (bertuurs-organen) dengan prakarsa dan tanggung jawab sendiri
2. Perbuatan tersebut dilaksanakan dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan
3. Perbuatan tersebut dilaksanakan sebagai sarana untuk menimbulkan akibat hukum dibidang hukum administrasi
4. Perbuatan yang bersangkutan dilakukan dalam rangka pemeliharaan
5. kepentingan Negara dan rakyat Dunn (2003:109) menyatakan bahwa pelaksanaan atau implementasi dari suatu kebijakan atau program merupakan rangkaian pilihan yang kurang lebih berhubungan dengan (termasuk keputusan untuk bertindak) yang dibuat oleh badan dan pejabat pemerintah yang diformulasikan dalam bidang-bidang baik kesehatan, kesejahteraan sosial, ekonomi, administrasi, dan lain-lain.

Mazmanian dan Paul A. Sabatier dalam Wahab (2014: 135) mengatatakan bahwa: “Implementasi memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian utama implementasi kebijakan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijakan publik yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian”

Kemudian menurut Riplay dan Fraklin dalam Winarno (2008:145) mengatakan bahwa: “Implementasi kebijakan adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan, atau suatu jenis keluaran yang nyata. Istilah implementasi menunjuk pada sejumlah kegiatan yang mengikuti pernyataan maksud tujuan-tujuan program dan hasil yang diinginkan oleh para pejabat pemerintah”.



Menurut Meter dan Horn (dalam Subarsono, 2011: 99) ada lima variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi, yakni standar dan sasaran kebijakan, sumberdaya, komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas, karakteristik agen pelaksana dan kondisi sosial, ekonomi dan politik.

Model pendekatan topdown yang dirumuskan oleh Donald Van Metter dan Van Horn sebagaimana yang disebut dengan a Model of the Policy Implementation.

Dalam teori ini ada lima variabel yang mempengaruhi kinerja suatu kebijakan, yaitu:

1. Sumber daya Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat terbantu dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan proses implementasi. Tetapi diluar sumber daya manusia, sumber daya lain yang perlu diperhitungkan juga adalah sumber daya financial dan sumber daya waktu. Ketiga sumber daya ini akan saling mendukung dalam implementasi sebuah kebijakan.
2. Karakteristik Agen Pelaksana Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan informal yang akan terlibat pengimplementasian kebijakan publik. Hal ini sangat penting karena kinerja implementasi akan sangat banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksananya. Selain itu, cakupan atau luas wilayah implementasi kebijakan perlu juga diperhitungkan manakala hendak menentukan agen pelaksana. Semakin luas cakupan implementasi kebijakan, maka seharusnya semakin besar pula agen yang dilibatkan.
3. Sikap / Kecenderungan para Pelaksana Sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana akan sangat banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi oleh karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul persoalan dan permasalahan yang mereka rasakan. Tetapi kebijakan yang akan diimplementasikan adalah kebijakan “Dari atas” yang sangat mungkin para pengambil keputusannya tidak pernah mengetahui bahkan tidak menyentuh kebutuhan, keinginan, atau permasalahan yang warga ingin selesaikan.
4. Komunikasi Antar Organisasi dan Aktvitas Pelaksana Koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan. Semakin baik koordinasi komunikasi di antara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka asumsi kesalahan-kesalahan akan sangat kecil untuk terjadi.



5. Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik Hal terakhir yang perlu juga diperhatikan guna menilai kinerja implementasi kebijakan dalam perspektif yang ditawarkan adalah sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan yang telah ditetapkan. Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi biang keladi dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan tersebut.

Dalam upaya untuk mengefektifkan implementasi kebijakan menurut Smith (dalam Tachjan, 2006:37) berpendapat bahwa :

Dalam proses implementasi ada empat variabel yang perlu diperhatikan. Keempat variabel tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan satu kesatuan yang saling mempengaruhi dan berinteraksi secara timbal balik. Oleh karena itu, terjadi ketegangan (tensions) yang bisa menyebabkan timbulnya protes-protes, bahkan aksi fisik, dimana hal ini menghendaki penegakan institusi-institusi baru untuk mewujudkan sasaran kebijakan tersebut. Ketegangan-ketegangan itu juga bisa menyebabkan perubahan-perubahan dalam institusi-institusi ini

Keempat variabel dari implementasi kebijakan publik dari Smith Tahjan (2006;37-38) dimaksud dijelaskan sebagai berikut yaitu :

1. Program (kebijakan) yang dilaksanakan, yakni proses pelaksanaan kebijakan berdasarkan tujuan yang digagas oleh rumus kebijakan untuk mendorong, mempengaruhi dan merangsang target group untuk melaksanakannya.
2. Kelompok sasaran, yaitu kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan diharapkan menerima manfaat dari kebijakan. Serta adanya dampak



perubahan atau peningkatan yang dipengaruhi oleh kebijakan dan diharapkan dapat mengadopsi pola-pola interaksi sebagaimana yang diharapkan oleh rumus kebijakan.

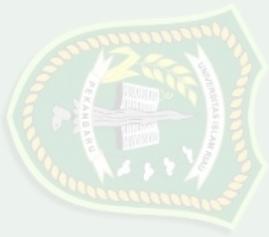
3. Organisasi pelaksana, yaitu badan-badan pelaksana atau unit-unit birokrasi pemerintah baik organisasi atau perorangan, yang bertanggung jawab dari mulai proses pengelolaan, pelaksanaan dan pengawasan dari proses implementasi kebijakan.
4. Faktor lingkungan, yakni unsur-unsur dalam lingkungan yang mempengaruhi atau dipengaruhi oleh implementasi kebijakan.

Model ini proses implementasi kebijakan publik dari perspektif perubahan social politik. Dilakukan terhadap kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk mengadakan perubahan atau perbaikan pada kelompok sasaran (berdimensi target grup).

Sedangkan menurut George C. Edward III dalam Agustino (2016:136) terdapat empat variabel yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan. Keempat variabel tersebut saling berhubungan satu sama lain.

1. Komunikasi

Komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan kebijakan publik. Implementasi yang efektif terjadi apabila pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Terdapat tiga indikator yang dipakai untuk mengukur keberhasilan variabel komunikasi diatas, yaitu:



- a. Transmisi; penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula.
- b. Kejelasan; komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan (street level bureaucrats) haruslah jelas dan tidak membingungkan (tidak ambigu).
- c. Konsistensi; perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu kebijakan haruslah konsisten (untuk diterapkan dan dijalankan).

2. Sumber Daya

Sumber daya merupakan hal penting dalam mengimplementasikan kebijakan. Indikator sumber daya terdiri dari beberapa elemen, yaitu: staf atau sumber daya manusia, informasi, wewenang, dan fasilitas. Tanpa adanya fasilitas maka implementasi tidak akan berhasil.

3. Disposisi atau sikap pelaksana kebijakan adalah faktor penting dalam pendekatan mengenai pelaksanaan kebijakan publik. Jika pelaksanaan kebijakan ingin efektif, maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga memiliki kemampuan untuk melaksanakannya. Hal penting yang perlu dicermati pada variabel disposisi adalah efek disposisi, pengaturan birokrasi (staffing the bureaucracy), dan insentif.
4. Struktur Birokrasi Dua karakteristik, menurut Edward III, yang dapat mendongkrak kinerja struktur birokrasi atau organisasi kearah lebih baik adalah:

- a. Membuat SOP yang lebih fleksibel. SOP adalah suatu prosedur atau aktivitas terencana rutin yang memungkinkan para pelaksana melaksanakan kegiatan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
- b. Melaksanakan fragmentasi tujuannya untuk penyebaran tanggung jawab dan berbagai aktivitas, kegiatan, atau kegiatan pada beberapa unit kerja sesuai dengan bidangnya masing-masing

Pelaksanaan merupakan aktivitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk

melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya mulai dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan, suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah program atau kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah yang

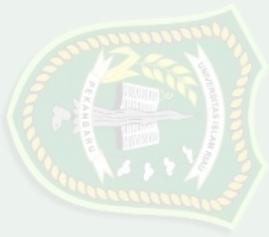


strategis maupun operasional atau kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan semula (Abdullah syukur, 2007:40).

Dari pengertian yang dikemukakan diatas dapatlah ditarik suatu kesimpulan bahwa pada dasarnya pelaksanaan suatu program yang telah ditetapkan oleh pemerintah harus sejalan dengan kondisi yang ada, baik itu dilapangan maupun diluar lapangan. Yang mana dalam kegiatannya melibatkan beberapa unsur dengan usaha-usaha dan didukung oleh alat-alat penunjang factor-faktor yang dapat menunjang program pelaksanaan sebagai berikut (Abdullah Syukur, 2007:40) :

1. Komunikasi, merupakan suatu program yang dapat dilaksanakan dengan baik apabila jelas dari pelaksana. Hal ini menyangkut proses penyampaian informasi, kejelasan informasi dan konsisten informasi yang disampaikan.
2. Sumber daya (*Resouces*), dalam hal ini meliputi empat komponen yaitu terpenuhinya jumlah staff dan kualitas mutu, informasi yang diperlukan guna untuk pengambilan keputusan atau kewenangan yang cukup guna melaksanakan tugas sebagai tanggung jawab dan fasilitas yang dibutuhkan dalam pelaksanaan.
3. Disposisi, sikap dan komitmen dari para pelaksanaan terhadap program khususnya dari mereka yang menjadi implementasi program khususnya dari mereka yang menjadi implementer program.
4. Sumber Birokrasi, yaitu SOP (Standar Operating Procedures), yang mengatur tata aliran dalam pelaksanaan program, jika hal ini tidak sulit dalam mencapai hasil yang memuaskan, karena penyelesaian khususnya tanpa pola yang baku.

Keempat factor diatas, dipandang mempengaruhi keberhasilan suatu proses implementasi, namun juga adanya keterkaitan dan saling mempengaruhi antar suatu factor yang satu dengan factor yang lain. Selain itu dalam proses implementasi



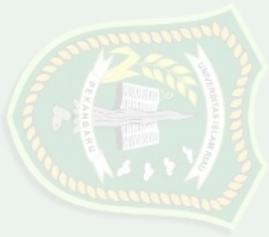
sekurang-kurangnya terdapat tiga unsur penting yang mutlak yaitu: (Abdullah Syukur, 2007: 41)

1. Adanya program (kebijaksanaan) yang dilaksanakan.
2. Kelompok masyarakat yang menjasi sasaran suatu program perubahan dan peningkatan
3. Unsur pelaksanaan baik organisasi maupun perorangan yang bertanggung jawab dalam pengolaan dan pelaksana dan pengawasan dari proses implementasi tersebut

Dari berbagai defenisi diatas dapat diketahui bahwa implementasi kebijakan menyangkut minimalnya ada tiga hal, yaitu: adanya tujuan dan sasaran kebijakan, adanya aktivitas pencapaian tujuan, serta adanya hasil dari kegiatan tersebut. Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan dalam suatu proses dinamis mewujudkan tujuan yang mengakibatkan pelaksana kebijakan melakukan aktivitas atau kegiatan secara terarah berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan sehingga pada akhirnya akan mewujudkan suatu hasil dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri.

6. Konsep Manajemen Sumber Daya Manusia

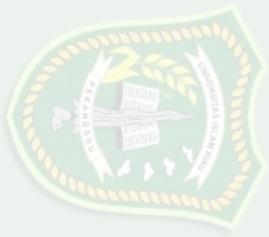
Sumber daya manusia merupakan sumber daya yang terdapat didalam organisasi, meliputi semua orang yang melakukan aktivitas. Pentingnya unsur manusia sebagai sumber daya yang cukup potensial, yang perlu dikembangkan sedemikian rupa sehingga mampu memberikan kontribusi yang maksimal bagi organisasi dan bagi pengembangan dirinya, karena itulah manusia perlu dimanajemen. Dalam sebuah perusahaan karyawan adalah sumber daya utama yang



dituntut untuk memberikan pelayanan terbaik kepada konsumen dan memberikan kinerja yang optimal sehingga konsumen merasa terlayani dengan baik dan merasa puas. Karena jika konsumen merasa tidak puas dapat melakukan complain yang dapat merusak citra perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa sumber daya manusia sangat berpengaruh terhadap kesuksesan perusahaan dalam mencapai tujuannya. Sumber daya manusia mempunyai fungsi mengelola input yang dimiliki perusahaan secara maksimal untuk mendapatkan hasil yang diharapkan sebuah perusahaan.

Oleh karena itu, perusahaan sebisa mungkin membuat para karyawan dapat melaksanakan pekerjaannya dalam keadaan yang tenang dan nyaman, tanpa ada ketegangan dan kecemasan yang dirasakan. Kondisi ini bukan hanya menyangkut keadaan fisik saja, melainkan juga berhubungan dengan hubungan social dengan orang lain dan suasana psikologis ditempat kerja. Dengan suasana kerja atau lingkungan kerja yang menyenangkan akan membuat karyawan bekerja secara optimal.

Menurut Hasibuan (2012;10) manajemen sumber daya manusia adalah ilmu dan seni mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien membantu terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat. Sedangkan definisi yang dikemukakan Kiggundu (dalam Faustino, 2003;4) manajemen sumber daya manusia adalah pengembangan dan pemanfaatan personil (pegawai) bagi pencapaian yang efektif mengenai sasaran-sasaran dan tujuan-tujuan individu, organisasi, masyarakat, nasional, dan internasional.





7. Konsep Pelaksanaan Program

Sebagai dasar pemikiran untuk mengungkapkan permasalahan yang akan dibahas dalam penyusunan penelitian ini, maka terlebih dahulu mendefinisikan pelaksanaan dan program, agar lebih jelas mengenai pengertian pelaksanaan program itu sendiri. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (1997: 308), pelaksanaan berasal dari kata laksana yang artinya menjalankan atau melakukan suatu kegiatan.

Sedangkan John L. Herman yang dikutip oleh Farida (2008: 9) mengemukakan defenisi program sebagai “segala sesuatu yang dilakukan oleh seseorang dengan harapan mendatangkan hasil atau pengaruh.” Lebih lengkap lagi, Hasibuan (2006; 72) juga mengungkapkan bahwa program adalah, suatu jenis rencana yang jelas dan konkret karena di dalamnya sudah tercantum sasaran, kebijaksanaan, prosedur, anggaran, dan waktu pelaksanaan yang telah ditetapkan.

Menurut Smith Tachjan 2006 : 37-38 implementasi adalah proses pelaksanaan kebijakan dari perspektif perubahan social politik, dengan tujuan untuk mengadakan perubahan atau perbaikan dalam masyarakat sebagai kelompok sasaran (berdimensi target group).

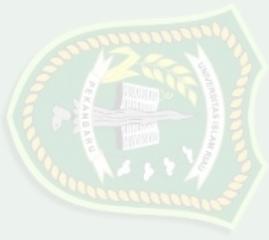
Selain itu, defenisi program juga termuat dalam Undang-Undang RI nomor 25 tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional< menyatakan bahwa:

UNIVERSITAS
ISLAM RIAU

Program adalah instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi oleh masyarakat. Pelaksanaan/implementasi kebijakan pada dasarnya adalah cara agar sebuah kebijakan yang telah ditetapkan bisa mencapai tujuan, tidak lebih dan tidak kurang untuk mangimplementasikan kebijakan public ada 2 pilihan langka yang dapat digunakan :

1. Langsung mengimplementasikan dalam bentuk program
2. Melalui formulasi kebijakan derivate atau turunan dari kebijakan publik.

Sehubung dengan kata implementasi diatas, Presman Wildavsky (1978 dikutip dari Tachjan 2006:24) mengemukakan bahwa, "*implementation as to cary out, accomplish, fulfill, produce, complete*". Maksudnya membawa, menyelesaikan, mengisi, menghasilkan. Selanjutnya, mereka juga mengatakan bahwa pembuat kebijakan seharusnya tidak menjanjikan hal-hal yang tidak dapat dipenuhi karena implementasi kebijakan membutuhkan sistem control dan komunikasi top-down serta sumber daya yang dapat menjalankan tugas implementasi tersebut. jika sistem tidak mengizinkan kondisi seperti itu, sebaiknya pembuat kebijakan mengatasi janji pada tingkat yang bisa dipenuhi dalam proses implementasi. Menurut Grindle (dalam sujiono 2008:31)



“implementasi kebijakan sesungguhnya bukan sekedar berhubungan dengan mekanisme penjabaran atau operasional dari keputusan politik kedalam prosedur-prosedur rutin lewat saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu, yaitu menyangkut masalah konflik, keputusan dan siapa yang akan memperoleh dari suatu kebijakan”

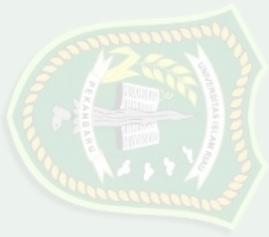
Selanjutnya menurut Harsono (dalam Nugroho 2004:67) mengemukakan bahwa implementasi adalah suatu proses untuk melaksanakan kebijakan menjadi kebijakan tindakan dari politik kedalam administrasi. Pengembangan kebijakan dalam rangka menyempurnakan suatu program.

Sementara itu menurut George C. Edwards III dalam bukunya yang berjudul *implementing public policy* yang diterbitkan pada tahun 1980 (1980, dikutip dari tachjan,2006:25) mengemukakan bahwa proses implementasi sebagai:

“...the state of policy making between the establishment of apolicy (such as the passage of a legislative act, the insuing of anexecutive order, the handing down of a judicial decision, or the promulgation of a regulatory rule) and the consequences of the policy for the peple whom it effect.

Menurut Edwards, implementasi diartikan sebagai tahapan dakam proses kebijaksanaan, yang berada diantara tahapan penyusunan kebijaksanaan dan hasil atau konsekuensi yang ditimbulkan oleh kebijaksanaan (output, outcome). Aktivitas implementasi menurutnya terdiri atas perencanaan, pendanaan, pengorganisasian, pengangkatan dan pemecatan karyawan, negosiasi, dan lain-lain.

Dalam proses pelaksanaan program yang sesungguhnya dapat berhasil, kurang berhasil, ataupun gagal sama sekali apabila ditinjau dari wujud hasil yang dicapai atau

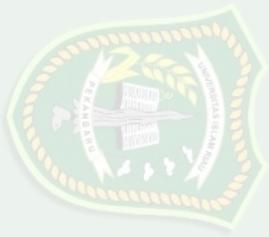


outcomes. Karena dalam proses tersebut turut bermain dan terlihat berbagai unsur yang berpengaruh bersifat mendukung maupun menghambat pencapaian sasaran suatu program. Berdasarkan beberapa defenisi tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan pelaksanaan program adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh individu maupun kelompok berbentuk pelaksanaan kegiatan yang didukung kebijaksanaan, prosedur, dan sumber daya dimaksudkan membawa suatu hasil untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

8. Program Rumah Bantuan

Menurut Sulisty, Mudji, (2013) rumah merupakan kebutuhan dasar manusia. Yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan saran pembinaan keluarga. Pada hakikatnya setiap warga masyarakat membutuhkan perumahan yang layak huni, namun dalam kenyataannya pemenuhan kebutuhan rumah layak huni tersebut menjadi masalah bagi sebagian masyarakat. Masalah kemiskinan merupakan masalah social yang masih banyak dialami oleh penduduk/masyarakat Desa Koto Perambahan Kecamatan Kampa Kabupaten Kampa. Berdasarkan kriteria yang digunakan BPS (Badan Pusat Statistik), untuk mengukur kemiskinan bahwa kondisi rumah yang tidak layak huni merupakan ciri utama membedakan keluarga miskin dan keluarga tidak miskin.

Atas dasar pemikiran tersebut diatas, penyebab rumah tidak layak huni atau pemugaran rumah tidak layak huni dapat memberikan kontribusi terhadap upaya penurunan angka kemiskinan. Program bantuan rumah layak huni (Barulahu) yang di



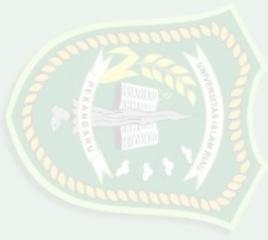
gagas oleh pemerintah kabupaten Kampar merupakan menyederhanakan dari 14 kriteria yang digunakan BPS menjadi 4 kriteria diantaranya : kondisi rumah tidak permanen dan rusak, dinding dan atap terbuat dari bahan yang mudah rusak, lantai yang masih tanah, serta keluarga yang belum memiliki tempat tinggal. Dengan demikian angka tersebut diatas tidak serta merta akan mendapatkan pelayanan secara keseluruhan, namun secara selektif akan digunakan kriteria yang lebih sederhana namun lebih tepat sasaran.

Sedangkan tujuan atau sasaran dari program rumah layak huni ini adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar terutama perumahan sebagai tempat tinggal, melalui peningkatan sejahtera social masyarakat dan perbaikan/rehabilitas rumah tidak layak huni, sehingga keluarga miskin dapat menempati rumah yang layak huni dalam lingkungan yang sehat dan sejahtera.

Sasaran program bantuan rumah layak huni ini adalah keluarga rumah tangah miskin dengan kriterianya adalah :

1. Masyarakat desa Koto Perambahan kecamatan kampa labupaten Kampar yang memiliki KTP dan sudah menetap secara terus menerus minimal 3 tahun.
2. Kepala keluarga yang tidak memiliki penghasilan dan tidak dapat memenehi kebutuhan dasar secara layak.
3. Status tanah atau rumah yang ditempati adalah milik sendiri dengan dibuktikan dengan surat kepemilikan yang syah.
4. Atap rumah dalam kondisi rusak atau terbuat dari daun, dinding rumah dalam kondisi rusak atau tidak layak dan lantai dalam keadaan rusak atau kondisi lantai dari tanah.





9. Konsep Program Bantuan Stimulant Perumahan Swadaya

Bantuan Stimulant Perumahan Swadaya salah satu kegiatan terbesar di Indonesia yang dilakukan oleh masyarakat diberbagai lokasi. Masyarakat tentu saja merupakan dasar utama dalam penyelenggaraan rumah swadaya. Rumah-rumah yang dibangun secara individual tersebut kemudian dapat membentuk pemukiman yang tumbuh dan berkembang secara incremental dengan pola pertumbuhan yang tidak teratur. Keterbatasan kemampuan social ekonomi masyarakat mengakibatkan semakin bertumbuhnya jumlah rumah tidak layak huni. Program Bantuan Stimulant Perumahan Swadaya dari pemerintah bagi penyelenggaraan rumah swadaya merupakan salah satu kegiatan yang bertujuan mengantisipasi masalah perumahan. Bagi masyarakat penerima rumah bantuan diharapkan sebuah komitmen untuk memanfaatkan bantuan ini dengan sebaik-baiknya sesuai tujuannya dan diharapkan nantinya akan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat penerima rumah bantuan tersebut.

Proses pendampingan kepada masyarakat penerima rumah bantuan untuk pembangunan dan peningkatan kualitas rumah oleh SKPD kabupaten atau kota merupakan proses yang sangat penting dalam mendorong partisipasi masyarakat demi keberhasilan program pemerintah untuk memberikan rumah yang layak huni bagi masyarakat.

**UNIVERSITAS
ISLAM RIAU**

DOKUMEN INI ADALAH ARSIP MILIK :

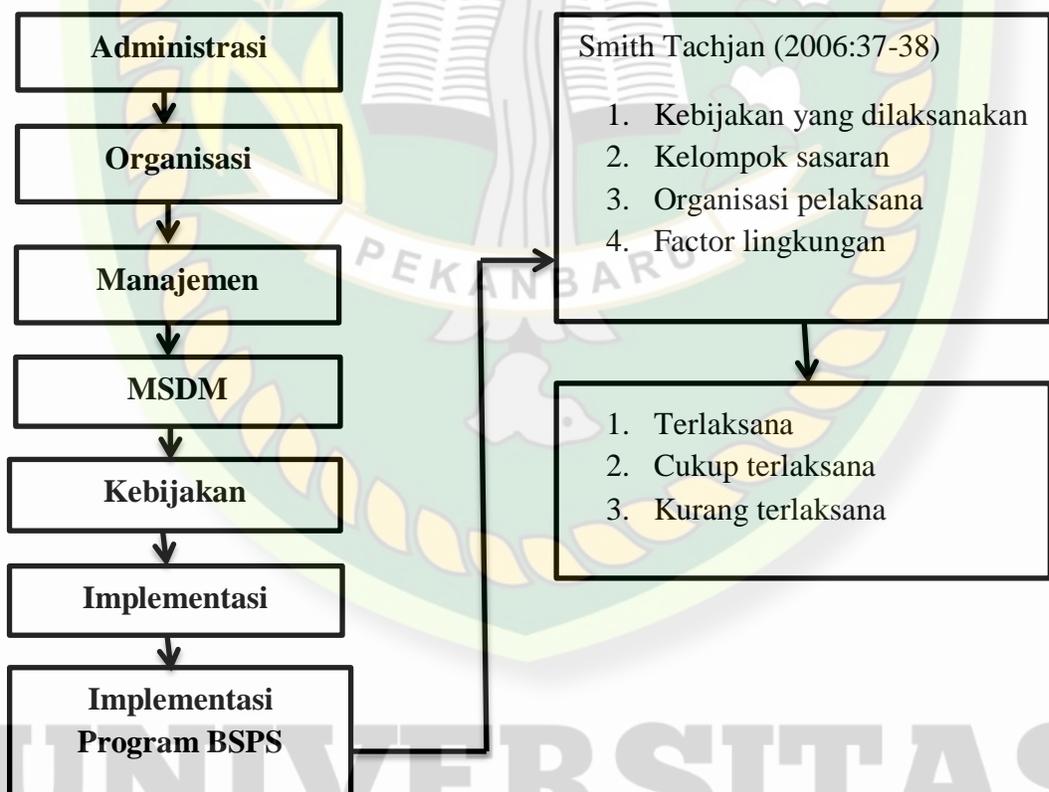
PERPUSTAKAAN SOEMAN HS

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Dalam melakukan pendampingan didalam masyarakat, tenaga pendamping masyarakat perlu memiliki beberapa pemahaman dan kemampuan, antara lain pemahaman tentang tahapan pedampingan dalam penyelenggaraan rumah swadaya, salah satunya adalah pedampingan dalam pembangunan dan pembangunan rumah swadaya.

B. Kerangka Pikir

Gambar II. 1: Kerangka Pikir Penelitian Tentang Analisis Pelaksanaan Program Bantuan Stimulant Perumahan Swadaya (BSPS) dalam Penyediaan Rumah Bantuan di Desa Koto Perambahan Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar.



Sumber : Data Olahan Penulis 2022

ISLAM RIAU



C. Hipotesis

Diduga pelaksanaan dari Program Bantuan Stimulant Perumahan Swadaya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang belum mendapatkan rumah layak huni didesa Koto Perambahan kecamatan kampa kabupaten Kampar belum maksimal

D. Konsep Operasional

Konsep operasional adalah bagaimana suatu variable diukur, kemudian dapat juga berfungsi untuk keragaman pengertian dalam pengolahan serta analisis data. Maka dari itu dalam penulisan ini akan menggunakan beberapa konsep operasional yang dinilai dapat memberikan arahan didalam penyusunan karya ilmiah ini. Agar dapat menghindari kesalahpahaman inilah beberapa konsep atau istilah sebagai berikut:

1. Administrasi adalah kerja sama sejumlah manusia dalam hal yang rasional diselenggarakan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.
2. Organisasi adalah suatu proses rangkaian sistem yang terbentuk atas keinginan.
3. Manajemen adalah suatu cara atau mekanisme kerja untuk mencapai tujuan.
4. Pelaksanaan/implementasi adalah pelaksanaan suatu kebijakan atau undang-undang yang melibatkan berbagai factor, program, organisasi, prosedur dalam upaya untuk meraih tujuan yang telah ditetapkan.
5. Sumber daya manusia merupakan sumber daya yang terdapat didalam organisasi, meliputi semua orang yang melakukan aktivitas.
6. Kebijakan adalah suatu daftar pilihan tindakan yang paling berhubungan yang disusun oleh instansi atau pejabat pemerintah antara lain dalam bidang pertanahan, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan, pengendalian kriminalitas, dan pembangunan perkotaan.
7. pelaksanaan berasal dari kata laksana yang artinya menjalankan atau melakukan suatu kegiatan.
8. Program Rumah Bantuan ini adalah suatu peninggalan kesejahteraan masyarakat miskin khususnya terhadap masyarakat Desa melalui



pemberdayaan Rumah Bantuan Stimulant untuk Mengurangi Rumah yang tidak layak huni atau masyarakat yang tidak memiliki tempat tinggal.

E. Operasional Variabel

Berikut dibawah ini yang dapat dilihat pada tabel operasional variabel dalam Analisis Pelaksanaan Bantuan Stimulant Perumahan Swadaya (BSPS) Penyediaan Rumah Bantuan di Desa Koto Perambahan Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar adalah sebagai berikut:

Tabel II. 1: Tabel Operasional Variabel Analisis Pelaksanaan Program Bantuan Stimulant Perumahan Swadaya (BSPS) dalam Penyediaan Rumah Bantuan di Desa Koto Perambahan Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar.

Konsep	Variabel	Indikator	Item yang dinilai	Skala Pengukuran
1	2	3	4	5
Implementasi adalah proses pelaksanaan kebijakan dari persfektif perubahan social politik, dengan tujuan untuk mengadakan perubahan atau perbaikan dalam	Pelaksanaan Program Rumah Bantuan di Desa Koto Perambahan Kecamatan Kampa kabupaten Kampar	1. Kebijakan yang dilaksanakan	1. Partisipasi masyarakat penerima rumah bantuan terhadap kegiatan BSPS 2. Ketersediaan dana atau anggaran 3. Keterlibatan masyarakat 4. Transparansi pihak desa	Terlaksana Cukup Terlaksana Kurang Terlaksana
		2. Kelompok Sasaran	1. Adanya dampak perubahan terhadap masyarakat penerima rumah bantuan 2. Observasi petugas	Terlaksana Cukup Terlaksana Kurang Terlaksana



masyarakat sebagai kelompok sasaran (berdimensi target group) menurut smith (tachjan:37-38)	3. Organisasi pelaksana	1. Mengadakan pengamatan perkembangan terhadap peserta atau masyarakat yg menerima rumah 2. Membuat pencatatan dan pelaporan kegiatan	Terlaksana Cukup Terlaksana Kurang Terlaksana
	4. Faktor lingkungan	1. Adanya dukungan dari pihak desa 2. Melibatkan mitra kerja	Terlaksana Cukup Terlaksana Kurang Terlaksana

Sumber : Data Olahan Penulis 2022

F. Teknik Pengukuran

Teknik Pengukuran yang digunakan terhadap pelaksanaan variable dan indikator dalam penelitian ini adalah menggunakan persentase, diklasifikasikan dalam tiga kategori yaitu Terlaksana, Cukup Terlaksana, dan Kurang Terlaksana.

Adapun Pengukuran indikator variabel penelitian ini adalah Sebagai berikut :

Terlaksana : Apabila seluruh indikator penelitian terealisasi dengan baik dan total skor seluruh jawaban responden untuk keseluruhan indikator variable 67%-100%

Cukup Terlaksana : Apabila seluruh sub indikator penelitian terealisasi dengan baik dan skor dari seluruh jawaban responden untuk keseluruhan indikator variable 34%-66%



Kurang Terlaksana : Apabila seluruh sub indikator penelitian terealisasi tidak cukup baik dan skor dari seluruh jawaban responden keseluruhan indikator variable 0%-33%

Selanjutnya setiap indikator dapat dilakukan pengukuran sebagai berikut:

1. Adanya Kebijakan yang dilaksanakan, dikatakan :

Terlaksana : Apabila seluruh sub indikator penelitian terealisasi dengan baik dan total skor seluruh jawaban responden untuk keseluruhan indikator variable 67%-100%

Cukup Terlaksana : Apabila seluruh sub indikator penelitian terealisasi dengan baik dan skor dari seluruh jawaban responden untuk keseluruhan indikator variable 34%-66%

Kurang Terlaksana : Apabila seluruh sub indikator penelitian terealisasi tidak cukup baik dan skor dari seluruh jawaban responden keseluruhan indikator variable 0%-33%

2. Adanya Kelompok Sasaran, dikatakan :

Terlaksana : Apabila seluruh sub indikator penelitian terealisasi dengan baik dan total skor seluruh jawaban responden untuk keseluruhan indikator variable 67%-100%

**UNIVERSITAS
ISLAM RIAU**



Cukup Terlaksana : Apabila seluruh sub indikator penelitian terealisasi dengan baik dan skor dari seluruh jawaban responden untuk keseluruhan indikator variable 34%-66%

Kurang Terlaksana : Apabila seluruh sub indikator penelitian terealisasi tidak cukup baik dan skor dari seluruh jawaban responden keseluruhan indikator variable 0%-33%

3. Adanya Organisasi Pelaksana, dikatakan :

Terlaksana : Apabila seluruh sub indikator penelitian terealisasi dengan baik dan total skor seluruh jawaban responden untuk keseluruhan indikator variable 67%-100%

Cukup Terlaksana : Apabila seluruh sub indikator penelitian terealisasi dengan baik dan skor dari seluruh jawaban responden untuk keseluruhan indikator variable 34%-66%

Kurang Terlaksana : Apabila seluruh sub indikator penelitian terealisasi tidak cukup baik dan skor dari seluruh jawaban responden keseluruhan indikator variable 0%-33%

4. Adanya Faktor Lingkungan, dikatakan :

Terlaksana : Apabila seluruh sub indikator penelitian terealisasi dengan baik dan total skor seluruh jawaban responden untuk keseluruhan indikator variable 67%-100%

UNIVERSITAS
ISLAM RIAU

DOKUMEN INI ADALAH ARSIP MILIK :

PERPUSTAKAAN SOEMAN HS

UNIVERSITAS ISLAM RIAU



Cukup Terlaksana : Apabila seluruh sub indikator penelitian terealisasi dengan baik dan skor dari seluruh jawaban responden untuk keseluruhan indikator variable 34%-66%

Kurang Terlaksana : Apabila seluruh sub indikator penelitian terealisasi tidak cukup baik dan skor dari seluruh jawaban responden keseluruhan indikator variable 0%-33%

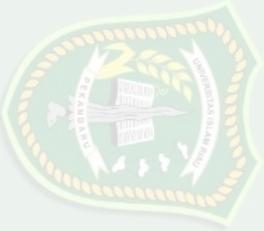


**UNIVERSITAS
ISLAM RIAU**

DOKUMEN INI ADALAH ARSIP MILIK :

PERPUSTAKAAN SOEMAN HS

UNIVERSITAS ISLAM RIAU



BAB III
METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini penelitian yang penulis gunakan ialah tipe survey deskriptif dengan pendekatan metode kuantitatif. Penelitian ini ini menarik dan menetapkan sejumlah sampel dari populasi yang dijadikan sumber data dan informasi, dimana sampel tersebut ditarik atau ditetapkan dari sejumlah populasi penelitian, dan mengutamakan alat pengumpulan data daftar kusioner dan daftar pedoman wawancara sebagai alat dasar untuk menjelaskan variabel penelitian dengan tujuan untuk memaparkan menjelaskan, dan menggambarkan kenyataan yang ada.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dipilih oleh penulis mengenai Analisis Pelaksanaan Program Bantuan Stimulant Perumahan Swadaya (BSPS) Dalam Penyediaan Rumah Bantuan Di Desa Koto Perambahan Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar. Lokasi ini tepatnya di Desa Koto Perambahan Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar. Lokasi ini penulis jadikan informasi mengenai bagaimana proses pelaksanaan Program Bantuan Stimulant Perumahan Swadaya (BSPS) Dalam Penyediaan Rumah Bantuan Di Desa Koto Perambahan Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar ini.

UNIVERSITAS
ISLAM RIAU



C. Populasi Dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah wilayah generasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. (sugiyono, 2009 : 173). Sedangkan menurut Arikunto (2010 : 273) populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. Apabila seseorang ingin meneliti semua elemen yang ada di wilayah penelitian, maka penelitiannya adalah penelitian populas.

Adapun yang menjadi populasi dipenelitian ini adalah Koordinator Kabupaten, asisten koordinator kabupaten, tenaga fasilitator lapangan ketua KPB , Kepala Desa, ketua kader BPS, kader BPS serta kepala keluarga yang mendapatkan rumah bantuan di Desa Koto Perambahan.

2. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Apabila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada dipopulasi, misalnya karena terbatasnya dana, tenaga, dan waktu (sugiyono, 2009:81). Selanjutnya sujawerni (2014:65) mengatakan sampel adalah bagian dari sejumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi yang digunakan untuk penelitian.

Adapun yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah 61 yaitu 1 orang koordinator lapangan, 1 orang asisten koordinator lapangan, 1 orang tenaga

fasilitator lapangan, 1 orang ketua KPB, 1 orang kepala desa, 1 ketua kader

BSPS, 2 Kader BSPS, serta 53 orang atau kepala keluarga yang mendapatkan rumah bantuan stimulant perumahan swadaya (BSPS).

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari pada I.V sebagai berikut :

Tabel III. 1, Tabel Populasi dan Sampel Tentang Pelaksanaan Program Bantuan Stimulant Perumahan Swadaya (BSPS) dalam Penyediaan Rumah Bantuan di Desa Koto Perambahan Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar.

No	Sub Populasi	Populasi	Sampel	Presentasi
1	2	3	4	5
1	Koordinator kabupaten	1	1	100%
2	Asisten koordinator lapangan	1	1	100%
3	Tenaga fasilitator lapangan	1	1	100%
4	Ketua KPB	1	1	100%
5	Kepala Desa Koto Perambahan	1	1	100%
6	Ketua Kader BSPS Koto Perambahan	1	1	100%
7	Kader BSPS Koto Perambahan	2	2	100%
8	Kepala Keluarga yang mendapatkan Bantuan Rumah	53	53	100%
	Jumlah	61	61	100%

Sumber : Data Olahan Penulis 2022

D. Teknik Penarikan Sampel

Teknik Penarikan Sampel dalam Penelitian ini untuk seluruh Kader Bantuan

Stimulant Perumahan Swadaya (BSPS) Desa Koto Perambahan adalah teknik

Sampling Jenuh (Sensus) yaitu teknik penentuan sampel yang menjadikan semua anggota Populasi sebagai Sampel, dikarenakan Jumlahnya kecil.

E. Jenis Dan Sumber Data

Data merupakan sangat penting dalam penelitian karena merupakan pencaharian data yang nantinya akan terinterpretasikan dan analisis, dan beberapa jenis data yang digunakan oleh peneliti diantaranya sebagai berikut:

1. Data primer

Data primer merupakan data yang penulis temukan secara langsung dari beberapa responden secara langsung, yaitu salah satu dengan menggunakan wawancara bebas terpimpin secara langsung dengan responden penelitian guna untuk mendapatkan jawaban dan informasi terhadap masalah dalam penelitian ini terkait dengan proses pelaksanaan Program Bantuan Stimulant Perumahan Swadaya (BSPS) Dalam Penyediaan Rumah Bantuan Di Desa Koto Perambahan Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar.

2. Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang resmi yang berasal dari kantor Desa Koto Perambahan yang berada di Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar dalam penelitian ini yang termasuk data sekunder adalah informasi mengenai sejarah, Daftar usulan pendamping pembangunan daerah, struktur organisasi, tugas dan fungsi tersebut.



F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan suatu langkah yang paling strategis dalam sebuah penelitian, dikarenakan merupakan tujuan yang utama dari sebuah penelitian agar mendapat data. Tanpa mengetahui teknik dan pengumpulan data maka sebuah penelitian tidak akan dapat berjalan dengan lancar. Mendapatkan data yang memenuhi standar yang telah ditetapkan sebelumnya (sugiyono 2014).

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi (pengamatan), merupakan salah satu bentuk pengamatan, pencacatan yang dilaksanakan oleh peneliti dilapangan agar dapat menggunakan pedoman observasi sebagai sebuah instrument pengamatan yang telah disusun dengan teratur sebelumnya.
2. Interview (wawancara), teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan wawancara secara mendalam, sesuai dengan jawaban apa yang dibutuhkan oleh penulis dalam penelitian ini. Teknik wawancara merupakan teknik untuk mengumpulkan data yang sering digunakan dapat penelitian kualitatif. Artinya teknik ini merupakan sebuah interaksi serta komunikasi secara langsung antara penulis dengan responden penelitian, agar dapat menjamin tingkat akurasi informasi yang penelitian dapatkan selama melakukan penelitian dilapangan.
3. Angket (*kuisisioner*) adalah teknik pengumpumpulan data dengan menyerahkan daftar pertanyaan untuk diisi oleh responden, berupa daftar pertanyaan tertulis



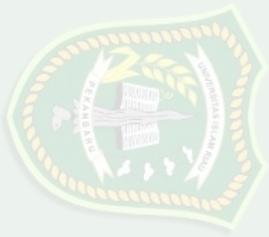
yang telah disusun, untuk dijawab dan menilai dengan menimbang bahwa responden adalah subjek yang dianggap mengetahui tugas dan pekerjaannya, dan apa yang dijawabnya adalah benar karena mereka terlibat langsung dengan kegiatan menyampaikan daftar pertanyaan yang diletakkan peneliti. Teknik ini ditujukan untuk Kepala Keluarga yang mendapatkan bantuan dengan sampel berjumlah 53 orang.

4. Dokumentasi adalah data yang dilakukan dengan mengadakan pencatatan atau pendokumentasian yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari responden yang dikumpulkan melalui teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini, selanjutnya data dikelompokkan dan diolah menurut jenisnya yang hasilnya disajikan dalam bentuk tabel, angka dan skor. Kemudian dianalisis dengan metode deskriptif, yaitu suatu cara yang dilakukan untuk menganalisis data dengan mendeskripsikan atau menggambarkan data yang terkumpul secara menyeluruh tentang suatu keadaan yang ada untuk kemudian mengambil kesimpulan serta disajikan dalam bentuk penelitian yang didasarkan secara metode ilmiah.

Dalam penelitian ini analisis yang digunakan melalui tiga kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penerikan



kesimpulan teknik analisis atau Verifikasi model Miles dan Huberman dalam (sugiyono 2016).

Menurut Miles dan Huberman dalam sugiyono (2016)

1. Reduksi data

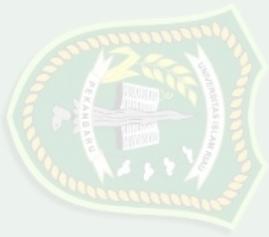
Reduksi data adalah proses dari analisis data yang dilakukan untuk mereduksi dan merangkum hasil-hasil penelitian dengan memfokuskan pada hal-hal yang dianggap penting oleh peneliti, reduksi data bertujuan untuk mempermudah pemahaman terhadap data yang sudah terkumpul sehingga data yang di reduksi memberikan gambaran lebih jelas.

2. Sajian data

Display Data adalah data-data dari hasil penelitian yang sudah disusun dengan rinci untuk memberikan gambaran penelitian secara terperinci dan menyeluruh selanjutnya dicari pola hubungannya untuk mengambil kesimpulan yang tepat. Penyajian data selanjutnya disusun dalam bentuk uraian atau laporan sesuai dengan hasil yang didapat.

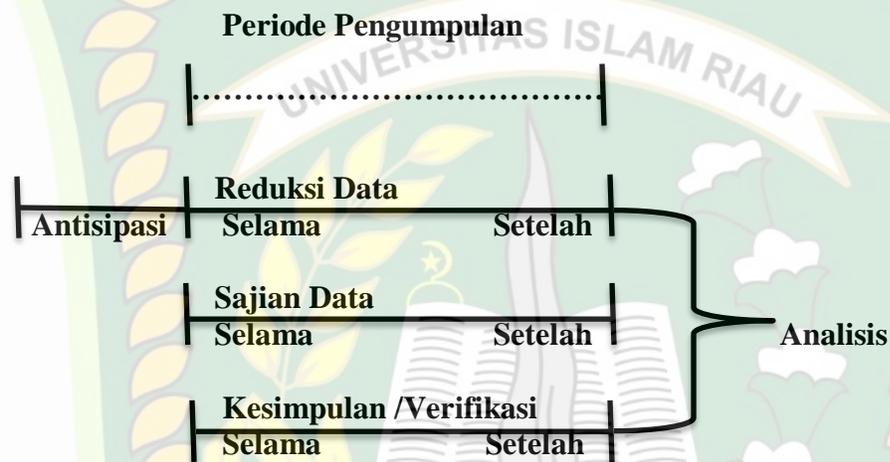
3. Penarikan kesimpulan

Kesimpulan merupakan tahap akhir dalam proses penelitian memberikan makna terhadap data yang telah dianalisis. Proses pengolahan data dimulai dengan penataan data langan (data mentah) kemudian direduksi dalam bentuk unifikasi dan kategori data.



Langkah-langkah analisis tersebut ditunjukkan pada gambar dibawah ini (ardianto, 2010)

Gambar III. 1: komponen dalam analisis data Model Miles dan Huberman (sugiyono, 2016).



**UNIVERSITAS
ISLAM RIAU**

DOKUMEN INI ADALAH ARSIP MILIK :

PERPUSTAKAAN SOEMAN HS

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

H. Jadwal Waktu Penelitian

Tabel III. 2 : Jadwal dan waktu Kegiatan Penelitian Mengenai Pelaksanaan program bantuan stimulant perumahan swadaya (BSPS) dalam rangka penyediaan Rumah Bantuan di Desa Koto Perambahan Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar

No	Keterangan	Bulan dan Minggu Tahun 2021-2022															
		Agus-Septem				ktober - Desembe				Januari - April				Mei -Agustus			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan UP																
2	Seminar UP																
3	Perbaikan UP																
4	Perbaikan Kuisisioner																
5	Pengurusan Rekomendasi penelitian																
6	Penelitian Lapangan																
7	Penelitian Analisis Data																
8	Penyusunan Laporan Penelitian																
9	Konsultasi Penelitian																
10	Ujian Skripsi																
11	Revisi dan Pengesahan Skripsi																
12	Penggandaan serta Penyerahan Skripsi																

Sumber : Olahan Penulis 2022

I. Rencana Sistematika Laporan Penelitian

Untuk memahami makna dalam penulisan skripsi ini penulis mengelompokan dalam enam bab yang mana masing-masing bab digambarkan secara umum sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini dibahas mengenai latar belakang, masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian.

BAB II : STUDI KEPUSTAKAAN

ISLAM RIAU

Dalam bab ini diuraikan tentang studi kepustakaan, kerangka pikir, konsep operasional, operasional variable, dan teknik pengukuran.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan mengenai tipe penelitian, lokasi penelitian, populasi dan sampel, Teknik penarikan sampel, jenis dan sumber data, Teknik pengumpulan data, Teknik analisis data, dan jadwal kegiatan penelitian.

BAB IV : DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

Bab ini menguraikan sejarah ringkas tempat penelitian, struktur organisasi, fungsi dan tugas organisasi, dan aktivitas yang dilakukan.

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan dibahas mengenai identitas responden, deskripsi data dan analisis data, serta interpretasi data.

BAB VI : PENUTUP

Bab ini menguraikan tentang kesimpulan dan saran-saran sebagai bahan masukan dari hasil penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

**UNIVERSITAS
ISLAM RIAU**



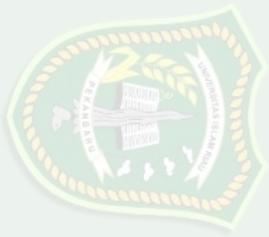


BAB IV DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Desa Koto Perambahan

1. Sejarah Singkat

Desa Koto Pertambahan adalah nama suatu wilayah di Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar. Menurut beberapa tokoh masyarakat, Desa Koto Perambahan dikenal karena dulu keberadaannya adalah sebuah wilayah kerajaan dengan Raja yang bernama Sultan Mahmud Adhli Syah atau lebih dikenali oleh Raja Koto, satu-satunya kerajaan yang ada di Kabupaten Kampar. Dengan bukti peninggalan yang sampai saat sekarang masih ada seperti : Stempel Kerajaan, Keris, Baju Kerajaan dan peninggalan lainnya. Dan pembangunan istana oleh pemerintah Kabupaten Kampar telah dibangun kembali yang sebelumnya sempat tergantikan oleh bangunan sekolah SD. Memang sebelumnya nama Desa ini adalah Desa Kampung panjang Kampar, tapi pada masa pemerintahan Desa Bapak Sudirman bersama masyarakat Tokoh Adat, Tokoh Agama, dan Tokoh Masyarakat mengganti nama Desa dengan nama Desa Koto Perambahan. Dengan alasan nama Desa Koto Perambahan diambil dari perkampungan yang pertama ada di Desa ini yang dikenali dengan nama Pomban atau Perambahan, maka digantilah nama Desa Kampung Panjang dengan Desa Koto Perambahan, alasan kedua mengapa nama Desa Kampung Panjang diganti dengan Desa Koto Perambahan, karena nama Desa Kampung Panjang sama dengan nama Desa yang berada di Air Tiris yaitu Desa Kampung Panjang Air Tiris.



Desa Koto Perambahan mulai terbentuk pada tahun 1978 melalui pemekaran Desa Kampar dan selanjutnya dilakukan pemilihan Kepala Desa yang pertama pada tahun 1978 dan terpilih bapak Nahar

2. Kondisi Geografi

Desa Koto Perambahan terletak didalam wilayah Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar Provinsi Riau yang berbatasan dengan :

1. Sebelah utara berbatasan dengan Sungai Kampar.
2. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Hidup Baru Kecamatan Kampar Kiri
3. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Tanjung Bungo dan Desa Kecamatan Kampa.
4. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Palung Raya dan Desa Kuapan Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar.

Luas wilayah Desa Koto Perambahan adalah 11 KM. dimana 75% berupa daratan yang berpotografi berbukit-bukit, dan 35% daratan dimanfaatkan sebagai lahan pertanian yang dimanfaatkan untuk persawahan tadah hujan. Iklim Desa Koto Perambahan sebagaimana desa-desa lain yang ada di Indonesia mempunyai iklim kemarau dan penghujan, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam pada lahan pertanian yang ada di Desa Koto Perambahan Kecamatan kampa.

Lalu lintas perhubungan di wilayah Desa Koto Perambahan ini adalah melalui jalur

ISLAM RIAU

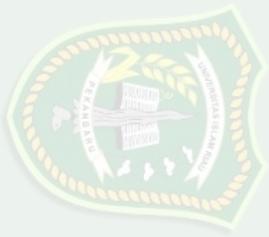
darat dengan sebagian besar jalan aspal dan seminisasi dan sebagian kecil jalan tanah. Jalan ini menghubungkan beberapa tempat di desa-desa lain bahkan yang menghubungkan antara Pekanbaru dan Sumatera Barat, karena jalan raya Pekanbaru Bangkinang melintasi wilayah Desa Koto Perambahan. Kantor Kepala Desa (Balai Desa) Koto Perambahan selaku pusat administrasi Desa terletak lebih kurang 3 KM dari kantor Camat Kampa, 26 KM dari ibu Kota Kabupaten Kampar dan 36 KM dari ibu Kota Provinsi Riau. Kondisi geografi Desa Koto Perambahan adalah bersifat homogeny dari berbagai aspek. Homogeny dalam bahasa, homogeny dalam adat istiadat, homogeny dalam beragama, dan lain-lain secara umum penduduk yang mendiami Desa Koto Perambahan.

Pada tahun 1979 Desa Koto Perambahan resmi menjadi sebuah desa dan dilaksanaknlah Pemilihan Kepala Desa Defenitif dengan cara pemilihan langsung yang dilaksanakan oleh seluruh warga desa pada saat itu. Setelah diadakan pemilihan tersebut maka terpilihlah Bapak Ramli sebagai Kepla Desa pertama Desa Koto Perambahan dan menjabat sampai tahun 1990. Pada tahun 1990 tersebut diadakanlah pemilihan Kepala Desa oleh seluruh masyarakat desa untuk pemilihan kedua kalinya dan pada tahun pemilihan langsung tersebut maka terpilihlah Bapak Mohd Yusuf sebagai Kepala Desa masa kerja 1991-2000. Masa kepemimpinan Mohd Yusuf tersebut atau yang disebut dengan Wali Muda pada saat itu dibantu oleh seseorang sekretaris Desa yang bernama Masri.



Tahun 2001 Kepala Desa Koto Perambahan Kecamatan Kampar dijabat oleh Bapak Sodierman masa kerja 2001-2006 dan dibantu oleh 1 orang Sekretaris Desa dan 3 orang perangkat Desa diantaranya Bapak Dasril menjabat sebagai Sekretaris Desa, Burhannudin sebagai kepala urusan Pemerintahan, Samsiram sebagai Kepala Urusan Pembangunan dan Wirdanis sebagai Kepala Urusan Umum. Pada masa kepemimpinan Soedirman tahun 2001 nama Desa Koto Perambahan yang sebelumnya bernama Desa Kampung Panjang resmi diganti oleh nama Desa Koto Perambahan Kecamatan Kampar, hal tersebut berawal dari adanya aspirasi tokoh adat dan tokoh Masyarakat Desa serta tokoh-tokoh dari kelembagaan yang ada didesa untuk mengembalikan nama Desa Kampung Panjang kepada nama asal muasal Desa atau nama Daerah pertama dijadikannya sebuah Desa yaitu Koto Pomban atau dikenal dengan Koto Perambahan.

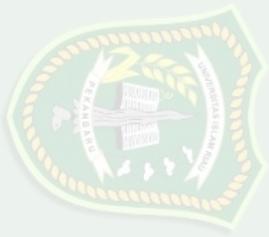
Pada tahun 2005 Kecamatan Kampar dipecah atau Mekar menjadi 5 Kecamatan yang diantaranya adalah Kecamatan Kampar, Kecamatan Kampar Utara, Kecamatan Rumbio Jaya, Kecamatan Kampar Timur dan kecamatan tambang dan Desa Koto Perambahan masuk dalam Wilayah Kecamatan Kampar Timur. Tahun 2007 Kepala Desa Koto Perambahan dijabat oleh Bapak Janizar yang sebagai Pelaksana Tugas Kepala Desa Koto Perambahan, beliau merupakan salah seorang kepala saksi (kasi) di Kecamatan Kampar Timur atau Staf/Kepegawaian Kecamatan Kampar Timur.



Akhir tahun 2007 pemilihan Kepala Desa masa kerja 2008-2014 pun diadakan, pada tahun ini terdapat 3 orang calon Kepala Desa yang bertarung dalam merebutkan hati masyarakat untuk duduk dikursi Kepala Desa diantar 3 calon tersebut adalah Burhanudin, Samsiram, dan Zainur dalam catur perebutan kursi Kepala Desa tersebut akhirnya masyarakat memberikan kepercayaan kepada Bapak Burhanudin selaku Kepala Desa masa kerja 2008-2014. Pemerintahan Burhanudin ini dibantu oleh 1 orang sekretaris Desa dan 4 orang Perangkat Desa diantaranya Hampami selaku Sekretaris Desa, Syafrizon, S.Pd.i sebagai kepala Urusan Pemerintahan, Lismawarni, S.Ag sebagai Kepala Urusan Keuangan, dan Wirdanis sebagai Kepala Urusan Umum.

Masa kepemimpinan Burhanudin ini hanya berlangsung sampai tahun 2010, hal ini disebabkan pada tahun tersebut Burhanudin keluar SK-PNS nya sebagai sekretaris Desa. Sejak saat itu maka Burhanudin pun terpaksa mundur dari kursi Kpela desa Koto Perambahan dan kembali menjabat sebagai Sekretaris desa Koto Perambahan dan Bupati Kampar mengeluarka SK Pejabat Kepala Desa Koto Perambahan sementara dijabat langsung oleh Bapak Camat Kampar Timur hingga tahun 2012.

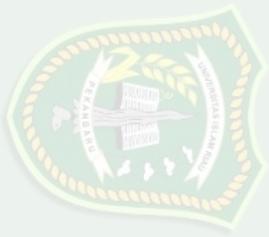
Maret 2012 Kepala Desa Koto Perambahan dijabat oleh Bapak Muhammad Yusuf ST, berdasarkan hasil pemilihan Kepala Desa langsung yang diadakan pada akhir tahun 2011. Masa kepemimpinan Muhammad Yusuf ST dibantu oleh Burhanudin sebagai Sekretaris Desa, Zulfahmi S.I.kom sebagai Kepala Urusan



Pemerintahan, Mardi Efendi sebagai Kepala Urusan Umum, Yusrizal Efendi sebagai Kepala Urusan Pembangunan, Lismawarni sebagai Kepala Urusan Keuangan dan Ririn Fitri Eles Zainal sebagai Bendahara Desa Serta Elisi Riri Anggraini sebagai Staf desa yang diangkat pada tahun 2014 dan baru pada tahun 2015 ia diangkat menjadi perangkat desa dengan jabatan Kepala Urusan Kesejahteraan Masyarakat (kestra). Februari 2016 nama Kecamatan Kampar Timur pun resmi berganti nama menjadi kecamatan kampa hingga sekarang.

Pada masa pemerintahan Muhammad Yusuf ST ini sering terjadi pergantian atau rooling jabatan perangkat desa sehingga diakhir masa kepemimpinannya tercatat Yusrzal Efendi yang sebelumnya menjabat Sebagai Kepala Urusan Pembangunan menjabat sebagai Kepala Urusan Umum, Hampami sebagai Kepala Urusan Pemerintahan, Titik Rahayu S,Pd menjabat sebagai Kpela Urusan Pembangunan sekaligus pwngganti dari Elisi Riri Anggraini yang mengundurkan diri dan Irma Pertmata Sari SE diangkat menjadi Kaur Kesra pada akhir tahun 2017 menggantikan Mardi Efendi. Masa kerja pemerintahan Muhammad Yusuf ST ini berakhir pada juli 2018.

Akhir 2017 terjadilah pemilihan Kepala Desa serentak dan salah satu diantaranya ada pemilihan Kepala Desa Koto Perambahan masa kerja 2018-2024. Pada masa tersebut antusias masyarakat untuk menjadi sosok Kepala Desa sangat banyak sekali, hal ini disebabkan karena banyaknya anggaran desa yang dikelola oleh desa setempat bahkan anggaran tersebut mencapai miliaran rupiah. Pada pemilihan

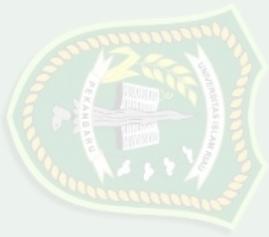


ini terdapat 5 orang calon Kepala Desa Koto Prerambahan yang bertarung menduduki kusi Kepala Desa diantaranya adalah, Sahrul, Muhammad Yusuf ST, Hampami, Yesi Anita S.Pd dan Azwardi. Pada pemilihan ini tercatat untuk yang pertama kalinya dalam sejarah pemilihan Kepala Desa Koto Perambahan keikutsertaan tokoh perempuan.

Setelah diadakannya pemilihan Kepala Desa Koto Perambahan Kecamatan Kampa pada ahad 19 november 2017 maka Sahrul terpilih sebagai Kepala Desa Koto Perambahan Kecamatan Kampa masa kerja 2018-2024 dengan perolehan suara sebanyak 816 suara dari total pemilihan 2.434 suara sah. Sementara Muhammad Yusuf ST yang merupakan Kepala Desa yang menjabat pada masa itu hanya memperoleh suara sebanyak 565 suara, kemudian Hampami 758 suara, Yesi Anita S.Pd sebanyak 114 suara dan Azwardi sebanyak 181 suara.

3. Visi dan Misi Desa Koto Perambahan

- VISI :
 - Mewujudkan Masyarakat yang sejahtera dan bermartabat dan mengembangkan sumber daya alam, sumber daya manusia yang agamis.
- MISI :
 - Menciptakan generasi muda yang Qur'ani melalui pembinaan Tilawatil Qur'an.



- Meningkatkan kepedulian social terhadap sesama warga masyarakat Desa
- Menciptakan suasana lingkungan yang kondusif dan harmonis di tengah-tengah masyarakat.
- Mendorong pelajar berprestasi dengan memberikan apresiasi.
- Menciptakan kegiatan-kegiatan pemberdayaan bagi masyarakat.
- Menciptakan lapangan pekerjaan, peluang usaha dan pengembangan usaha rumah tangga.
- Meningkatkan produksi pertanian dengan pelatihan, pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana produksi dan pemamfaatan teknologi pertanian modern.
- Meningkatkan kapasitas aparatur Desa dan kelembagaan Desa.
- Membangun infrastruktur sarana dan prasarana pemukiman dan olah raga.
- Menghidupkan tradisi adat istiadat dan kearifan local.

B. Latar Belakang (BSPS) Desa Koto Perambahan

Desa Koto Perambahan merupakan salah satu Desa yang ada di Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar Provinso Riau dengan jumlah penduduk Desa Koto Perambahan :

1. Kepala Keluarga : 1.649 KK



**UNIVERSITAS
ISLAM RIAU**

DOKUMEN INI ADALAH ARSIP MILIK:
PERPUSTAKAAN SOEMAN HS

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

2. Laki-laki : 3.056 orang

3. Perempuan : 3.200 orang

Dari jumlah penduduk tersebut diatas, terdapat ada beberapa kepala keluarga yang tidak memiliki rumah layak huni sebanyak 175 rumah yang ada di Desa Koto Perambahan.

Jumlah penduduk Desa Koto Perambahan yang tidak memiliki rumah layak huni ini membutuhkan penanganan yang serius, sebab kepala keluarga yang tidak memiliki rumah layak huni ini akan menjadi lapisan penduduk yang jika tidak diberdayakan dengan baik akan menjadi lapisan penduduk yang dianggap beban pembangunan. Agar masyarakat yang tidak memiliki rumah layak huni ini tidak menjadi beban pembangunan, maka diperlukan adanya program bantuan rumah.

Bantuan Stimulant Perumahan Swadaya atau disingkat dengan BSPS merupakan wadah kegiatan bagi keluarga yang tidak memiliki rumah dan keluarga yang memiliki rumah layak huni yang berusaha meningkatkan kegiatan atau membantu keluarga yang tidak memiliki rumah layak huni di Desa Koto Perambahan.

Bantuan Stimulant Perumahan Swadaya (BSPS) beroperasi berdasarkan SK Kepala Desa Koto Perambahan dan melaksanakan kegiatan-kegiatan di Desa Koto Perambahan Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar Provinsi Riau.

1. Sasaran

1. Masyarakat yang tidak mendapatkan rumah.

Masyarakat yang belum mendapatkan rumah di Desa Koto

Perambahan Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar guna untuk



mengangkat perekonomian masyarakat Desa Koto Perambahan supaya bisa mendapat kan rumah layak huni.

2. Kader Bantuan Stimulant Perumahan Swadaya (BSPS)

Informasi ini juga sangat penting bagi kader-kader bantuan stimulat perumahan swadaya (BSPS) sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kegiatan dimasa-masa yang akan datang .

3. Sasaran pembinaan lainnya

Sasaran lain yang secara tidak langsung mendukung program Bantuan Stimulant Perumahan Swadaya (BSPS) ini, seperti Pemerintah, Perangkat Desa, Tokoh Masyarakat, dan Masyarakat lainnya.

2. Tujuan

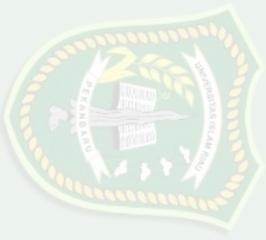
1. Tujuan umum

Memberikan informasi dan pemahaman tentang program bantuan stimulant perumahan swadaya (BSPS) Desa Koto Perambahan.

2. Tujuan khusus

Program rumah bantuan ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat desa Koto Perambahan kecanatan kampa kabupaten Kampar Provinsi Riau.

**UNIVERSITAS
ISLAM RIAU**



DOKUMEN INI ADALAH ARSIP MILIK :

PERPUSTAKAAN SOEMAN HS

UNIVERSITAS ISLAM RIAU



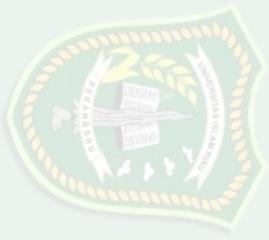
C. Profil (BSPS) Desa Koto Perambahan

- 1) Nama Organisasi : Bantuan Stimulant Perumahan Swadaya
- 2) Ketua : Jasri
- 3) Alamat kantor : komplek Perkantoran Desa Joto Perambahan
- 4) Visi : mewujudkan masyarakat sejahtera dan bermartabat dan mengembangkan sumber daya alam, sumber daya manusia yang agamis
- 5) Misi : meningkatkan peduli social terhadap sesama warga masyarakat desa dan menciptakan suasana lingkungan yang kondusif dan harmonis ditengah-tengah masyarakat.
- 6) Kegiatan yang dilaksanakan : menyediakan atau menyiapkan bahan – bahan apa saja yang perlu untuk membangun rumah.
- 7) Wilayah kegiatan : Desa Koto Perambahan dan sekitarnya
- 8) Fokus kegiatan : pembangunan rumah untuk masyarakat desa yang belum mendapatkan rumah layak huni

D. Kader-Kader (BSPS)

Adapun kader-kader BSPS di Desa Koto Perambahan terdiri dari 3 orang yaitu 1 Ketua Kader 1 Sekretaris Kader dan 1 lagi Bendahara Keder. Dalam Program Bantuan Stimulant Perumahan Swadaya Ini masing-masing Kader Meiliki fungsinya masing-masing yaitu :

**UNIVERSITAS
ISLAM RIAU**



1. Ketua Kader

1. Memimpin dan bertanggung jawab atas keberhasilan pelaksanaan program Bantuan Stimulant Perumahan Swadaya (BSPS).
2. Menyusun rencana kegiatan.
3. Membagi tugas kepada pengurus program Bantuan Stimulant Perumahan Swadaya (BSPS).
4. Melakukan pembinaan kepada kepala keluarga yang mendapatkan rumah bantuan
5. Melakukan kegiatan kemitraan
6. Melakukan pengembangan program untuk kegiatan
7. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan
8. Melaporkan kegiatan program BSPS kepada perwakilan dinas perumahan

2. Sekretaris Kader

1. Menyelenggarakan kegiatan yang bersifat administratif dan pencatatan kegiatan BSPS.
2. Menyiapkan dan mengirimkan lembar pencatatan dan pelaporan BSPS
3. Melaporkan kegiatan kepada ketua BSPS.
4. Membantu ketua dalam kegiatan kemitraan
5. Menginventarisasi aset kelompok BSPS
6. Menyimpan arsip-arsip dan dokumen penting

3. Bendahara Kader

1. Menyelenggarakan urusan kegiatan pelayanan keuangan kelompok BSPS

DOKUMEN INI ADALAH ARSIP MILIK :

PERPUSTAKAAN SOEMAN HS

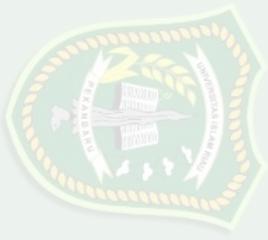
UNIVERSITAS ISLAM RIAU

UNIVERSITAS
ISLAM RIAU

2. Mencatat keluar masuknya uang
3. Membantu ketua dalam kegiatan kemitraan
4. Membantu dan melaporkan keuangan kepada ketua kelompok BSPS



**UNIVERSITAS
ISLAM RIAU**



DOKUMEN INI ADALAH ARSIP MILIK :

PERPUSTAKAAN SOEMAN HS

UNIVERSITAS ISLAM RIAU



BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Identitas Responden

Identitas responden merupakan keterangan yang diperoleh dari responden berupa data kuisioner yang disebarkan oleh penulis yang berisikan mengenai nama, umur, jenis kelamin dan tingkat pendidikan responden dari Pejabat Dinas Cipta Karya dan Pegawai/ Staff Desa Koto Perambahan. Untuk lebih jelasnya mengenai hal tersebut maka dapat dilihat pada keterangan dibawah ini sebagai berikut :

1. Jenis Kelamin

Jenis kelamin pada identitas responden Pejabat Dinas Cipta Karya dan Pegawai/ Staff Desa Koto Perambahan. Jenis kelamin juga mempengaruhi kinerja responden yang bersangkutan didalam bekerja.

Tabel V. 1: Distribusi Jumlah Responden Berdasarkan Jenis Kelamin Pelaksana Program Bantuan Stimulant Perumahan swadaya (BSPS) di Desa Koto Perambahan

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
1	Pria	7	88%
2	Perempuan	1	12%
	Jumlah	8	100%

Sumber: Data Olahan Penulis 2022

Pada tabel tersebut diketahui distribusi jumlah responden Pelaksana Program Bantuan Stimulant Perumahan swadaya (BSPS) di Desa Koto Perambahan yaitu Pria dengan jumlah 7 orang sedangkan pegawai perempuan berjumlah 1 orang.

Tabel V. 2: Distribusi Responden Menurut Status Petugas Pelaksana Program Bantuan Stimulant Perumahan swadaya (BSPS) di Desa Koto Perambahan

No	Status Petugas	Jumlah	Persentase
1	Kepala	1	12,5%
2	Pejabat Dinas Cipta karya	3	37,5%
3	Staff Desa / Pegawai	4	50%
	Jumlah	8	100%

Sumber: Data Olahan Penulis 2022

Dari data diatas diketahui bahwa Kepala Desa Koto Perambahan berjumlah 1 orang, Pejabat dinas Cipta Karya berjumlah 3 orang, yang terdiri dari Koordinator Kabupaten, asisten Koordinator Lapangan dan Tenaga Fasilitator Lapangan. Kemudian jumlah Staff Desa/ Pegawai berjumlah 4 orang.

Selain responden Staff desa dan Pejabat dinas Cipta karya, penulis juga melibatkan Kepala Keluarga Penerima Rumah sebagai subjek yang menerima pelayanan serta perlakuan dari Staff Desa Dan Pejabat Dinas Cipta Karya di Desa Koto Perambahan.

Tabel V. 3: Distribusi Responden Menurut Jenis Kelamin Kepala Keluarga Penerima Bantuan Rumah di Desa Koto Perambahan

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
1	Pria	45	85%
2	Wanita	8	15%
	Jumlah	53	100%

Sumber: Data Olahan Penulis 2022

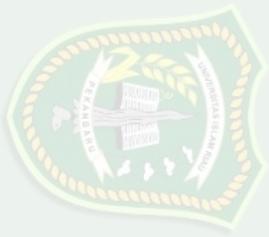
Dalam sebuah penelitian jenis kelamin Informan tidaklah berpengaruh terhadap hasil penelitian yang dilakukan selama infroman tersebut bersedia untuk memberikan jawaban yang memang benar adanya. Tidak berpengaruhnya jenis kelamininforman terhadap hasil penelitian dikarenakan jenis kelamin tidak bias menentukan pola pikir maupun pemahaman seseorang terhadap suatu masalah penelitian.

Dalam penelian ini jenis kelamin informan sangat didominasi oleh kaum laki-laki. Hal ini diakibatkan oleh pemahaman masyarakat dilokasi penelitian terkait dengan masalah terjadi memang lebih dimiliki oleh kaum laki-laki.

Selain itu Dari data diatas diketahui bahwa dominasi penerima rumah bantuan di dominasi dengan Kepala Keluarga jenis kelamin laki-laki berjumlah 45 orang dengan sebanyak 85% sedangkan Kepala Keluarga Wanita berjumlah 8 orang dengan sebanyak 15%.

2. Umur Responden

Usia merupakan suatu tingkat kematangan pikiran seseorang dalam rangka mengambil keputusan apa yang tidak dan harus dilakukan. Seperti diketahui bahwa petugas yang lebih tua umur nya akan lebih bijaksana dalam mengambil tindakan dari pada pegawai yang lebih muda, akan tetapi tidak dapat dipungkiri juga bahwa lebih tua umur seseorang maka kemampuan fisiknya akan lebih cepat mengalami kelelahan dalam melakukan pekerjaan jika dibandingkan dengan pegawai yang umur nya lebih muda.



Tabel V. 4: Distribusi Responden Berdasarkan Umur Petugas Pelaksanan Program Bantuan Stimulant Perumahan swadaya (BSPS) di Desa Koto Perambahan

No	Umur	Jumlah	Persentase
1	20-30	2	25%
2	31-40	3	37,5%
3	41-50	3	37,5%
4	>50	0	-
Jumlah		8	100%

Sumber: Data Olahan Penulis 2022

Dari data diatas diketahui bahwasanya umur Kepala Desa Koto Perambahan, Pejabat Dinas Cipta Karya dan Staff Desa Koto Perambahan didominasi 31-40 tahun dan 41-50 tahun yaitu sebanyak 37,5%, kemudian 20-30 tahun sebanyak 25%. Selain memengaruhi dalam pengambilan keputusan, umur yang lebih tua umumnya memiliki kemampuan yang lebih baik dalam hal berkomunikasi serta pengalaman dan ilmu yang dimiliki. Tetapi tidak dipungkiri juga bahwa umur yang lebih muda memiliki daya inovasi yang tinggi dan semangat bekerja sehingga dapat mencapai pekerjaan dengan baik.

Tabel V. 5. Distribusi Responden Menurut Umur Berdasarkan Status Pegawai pada Pelaksana Program Bantuan Stimulant Perumahan swadaya (BSPS) di Desa Koto Perambahan

No	Umur	Status Pegawai			Jumlah	Persentase
		Kepala	Pejabat Dinas Cipta karya	Pegawai		
1	20-30	-	-	2	2	25%
2	31-40	-	3	-	3	37,5%
3	41-50	1	-	2	3	37,5%
4	>50	-	-	-	-	-
Jumlah		1	3	4	8	100%

Sumber: Data olahan penulis 2022

Sedangkan untuk umur responden Masyarakat Kepala Keluarga penerima rumah bantuan Program Bantuan Stimulans Perumahan Swadaya (BSPS) di Desa Koto Pereambahan Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar sebagai berikut:

Tabel V. 6. Distribusi Responden Menurut Umur Kepala Keluarga Penerima Bantuan di Desa Koto Perambahan

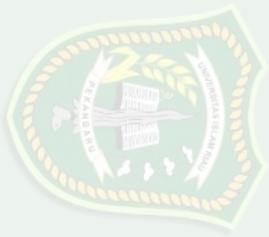
No	Umur	Jumlah	Persentase
1	21-30	4	8%
2	31-40	14	26%
3	41-50	27	51%
4	>50	8	15%
Jumlah		53	100%

Sumber: Data olahan penulis 2022

Dari data diatas diketahui bahwa dominasi umur Kepala Keluarga penerima bantuan adalah 21-30 tahun sebanyak 8% dan Kepala Keluarga yang berumur 31-40 tahun adalah sebanyak 26% serta Kepala Keluarga yang berumur 41-50 tahun adalah sebanyak 51%.

3. Pendidikan Responden

Semakin tinggi pendidikan seseorang maka semakin matang pola pikir seseorang dalam berbuat dan bertingkah laku dalam mengambil keputusan dalam rangka melaksanakan suatu pekerjaan. Pendidikan merupakan suatu usaha seseorang dalam rangka memberikan pengembangan terhadap pola fikir orang lain dalam memahami dan menilai sesuatu dimana dari tingkat pendidikan kita akan mengetahui kemampuan seseorang yang cenderung akan mempengaruhi pola fikir serta tingkah



laku setiap orang. Pendidikan tidak bisa didapat begitu saja melainkan melalui beberapa tahapan-tahapan baik dari sekolah, lingkungan maupun dari keluarga.

Berikut ini adalah table pendidikan responden Pejabat Pelaksana Program Bantuan Stimulant Perumahan swadaya (BSPS) di Desa Koto Perambahan:

Tabel V. 7: Distribusi Responden Menurut Jenjang Pendidikan Pejabat Pelaksana Program Bantuan Stimulant Perumahan swadaya (BSPS) di Desa Koto Perambahan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase
1	SLTP	-	-
2	SLTA	3	37,5%
3	DIPLOMA	-	-
4	S1	5	62,5%
5	S2	-	-
Jumlah		8	100%

Sumber: Data olahan penulis 2022

Dari data diatas diketahui bahwa tingkat pendidikan yang mendominasi adalah S1 berjumlah 5 orang dengan persentase 62,5% hal itu terlihat dari data yang di peroleh oleh penulis. Sedangkan untuk SLTA berjumlah 3 orang dengan persentase 37,5%.

Hasil pendidikan ikut membentuk pola berfikir, pola persepsi dan sikap pengambilan keputusan seseorang. Pendidikan seseorang yang meningkatkan mengajarkan individu mengambil keputusan yang terbaik untuk dirinya. Berdasarkan dari table diatas diketahui bahwa untuk identitas responden kalau dipandang dari tingkat pendidikan maka menjadi beragam mulai dari terendah sampai perguruan tinggi, namun jika dilihat dari table diatas. Tingkat pendidikan dari dinas Perumahan

Cipta Karya dan Desa Koto Perambahan terbilang memadai untuk kategori terpelajar dan terdidik. Oleh karena itu untuk para pegawai diharapkan bekerja dengan baik, efektif, efisien dan tanggung jawab dalam menjalankan tugasnya.

Tabel V. 8: Distribusi Responden Menurut Pendidikan Berdasarkan Status Pegawai Pelaksana Program Bantuan Stimulant Perumahan swadaya (BSPS) di Desa Koto Perambahan

No	Tingkat Pendidikan	Status Pegawai			Jumlah	Persentase
		Kepala	Pejabat Dinas Cipta Karya	Pegawai		
1	SLTP	-	-	-	-	-
2	SLTA	1	-	2	3	37,5%
3	Diploma	-	-	-	-	-
4	S1	-	3	2	5	62,5%
5	S2	-	-	-	-	-
	Jumlah	1	3	4	8	100%

Sumber: Data olahan penulis 2022

Berikut ini adalah table pendidikan responden pejabat Pelaksana Program Bantuan Stimulant Perumahan swadaya (BSPS) di Desa Koto Perambahan:

Tabel V. 9: Distribusi Responden Menurut Jenjang Pendidikan Kepala Keluarga Penerima Bantuan di Desa Koto Perambahan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase
1	TIDAK SEKOLAH	6	11%
2	SD	9	17%
3	SLTP	22	42%
4	SLTA	16	30%
5	DIPLOMA	-	-
	Jumlah	53	100%

Sumber: Data olahan penulis 2022



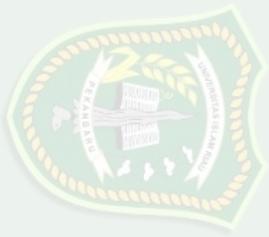
Dari data diatas diketahui bahwa tingkat pendidikan yang mendominasi penerima bantuan rumah di desa Koto Perambahan adalah tingkat pendidikan SLTP dengan berjumlah 22 orang dengan persentase 42%, untuk tingkat SLTA berjumlah 16 orang dengan persentase 30%, sedangkan untuk tingkat pendidikan SD berjumlah 9 orang dengan persentase 17% dan untuk yang tidak sekolah berjumlah 6 orang dengan persentase 11%.

Hasil pendidikan ikut membentuk pola berfikir, pola persepsi dan sikap pengambilan keputusan seseorang. Pendidikan seseorang yang meningkatkan mengajarkan individu mengambil keputusan yang terbaik untuk dirinya. Namun tingkat pendidikan yang rendah tidak selamanya akan menghambat seseorang untuk belajar dari media lain, seperti televisi, koran, radio dan pengalaman-pengalaman orang lain yang dijadikan reverensi bagi dirinya. Keadaan ini tercermin pada responden penelitian dimana tingkat pendidikan mayoritas rendah, namun responden masih mau mengikuti kegiatan Program Bantuan Stimulat Perumahan Swadaya (BSPS) dalam Penyediaan Rumah Bantuan di Desa Koto Perambahan Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar.

B. Pembahasan Pelaksanaan Program Bantuan Stimulat Perumahan Swadaya (BSPS) dalam Penyediaan Rumah Bantuan di Desa Koto Perambahan Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar

Dari setiap organisasi terdapat 3 tingkatan manajemen kelompok jabatan.

Berikut ini adalah kelomponk jabatan khususnya:



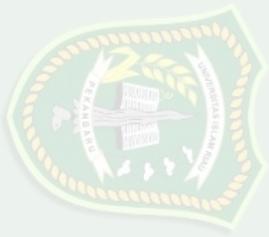
1. Kepala Desa sebagai manajemen puncak atau Top Management
2. Pejabat Dinas Cipta Karya atau dalam penelitian ini yaitu Koordinator Lapangan, Asisten Koordinator Lapangan dan Tenaga Fasilitator Lapangan sebagai kelompok pimpinan tingkat menengah atau Middle Management.
3. Staff Desa sebagai kelompok pimpinan tingkat bawah atau low management.

Dalam penempatan jabatan tersebut tentu saja seluruh pegawai telah ditetapkan di tempat yang sesuai dengan skil yang mereka miliki. Kemampuan berinteraksi juga merupakan hal yang penting karena dapat merangsang seluruh pegawai untuk mau bekerjasama dan diharapkan dapat menemukan inovasi baru sehingga dapat menunjang pencapaian tugas dengan baik serta penyelesaian tugas dengan tepat waktu.

Dengan adanya pembagian kelompok jabatan tersebut. Seluruh pejabat structural dan pegawai mengetahui akan koordinasi serta tugas yang akan dilaksanakan sehingga pelaksanaan suatu pekerjaan dan penyempurnaan pekerjaan yang terkait dapat berjalan dengan baik sesuai dengan tanggung jawab masing-masing personil sehingga dapat mencapai hasil sesuai dengan yang diharapkan.

1. Kebijakan yang dilaksanakan

Program (kebijakan) yang dilaksanakan, yakni proses pelaksanaan kebijakan berdasarkan tujuan yang digagas oleh rumus kebijakan untuk mendorong, mempengaruhi dan merangsang target group untuk melaksanakannya.dengan



rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak. Hal ini dapat dilihat dari tabel berikut ini :

Tabel V. 10: Distribusi Tanggapan Responden Petugas Tentang Pelaksanaan Program Bantuan stimulant perumahan swadaya (BSPS) dalam rangka Penyediaan Rumah Bantuan di Desa Koto Perambahan Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar

No	Item yang dinilai	Kategori Penilaian			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1	Partisipasi Masyarakat	4 (67%)	2 (33%)	-	6
2	Pengaruh Anggaran	6 (100%)	-	-	6
3	Keterlibatan Masyarakat	3 (50%)	3 (50%)	-	6
4	Transparansi pihak Desa	3 (50%)	3 (50%)	-	6
Jumlah		16	8	-	24
Rata-rata		4	2	-	6
Persentase		67%	33%	-	100%

Sumber: Data olahan penulis 2022

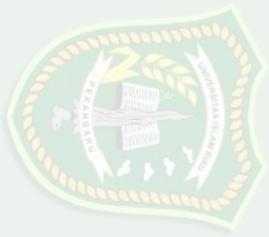
Berdasarkan tabel V.10 dapat dilihat di tabel terdapat 6 responden yang terdiri dari 4 responden dari Staff Desa/Pegawai dan 2 dari pejabat Dinas Cipta Karya tentang kebijakan yang dilaksanakan rumah bantuan yang diukur dengan empat item penilaian yaitu, partisipasi masyarakat, pengaruh anggaran, keterlibatan masyarakat, transparansi pihak desa.

Pada item penilaian pertama yaitu partisipasi masyarakat tanggapan responden kategori penilaian terlaksana adalah sebanyak 5 orang atau sama dengan

83% sedangkan kategori untuk cukup terlaksana sebanyak 1 orang atau sama dengan 17% sedangkan untuk kategori belum terlaksana tidak ada responden untuk menjawab kategori ini artinya seluruh staff desa/pegawai dan pejabat dinas cipta karya mengetahui tujuan program bantuan stimulant perumahan swadaya (BSPS) ini yang mana salah satu tujuan program rumah bantuan ini untuk menyejahterakan masyarakat dan memberikan rumah layak huni desa Koto Perambahan.

Untuk item penilaian kedua yaitu pengaruh anggaran tanggapan tanggapan responden kategori terlaksana adalah sebanyak 6 orang atau sama dengan 100% Kemudian untuk kategori cukup terlaksana dan kurang terlaksana adalah tidak ada tanggapan untuk kedua kategori ini. Artinya karna dengan adanya dana program bantuan stimulant perumahan swadaya (BSPS) ini masyarakat sangat terbantu dalam membangun tempat tinggal yang layak di desa Koto Perambahan.

Kategori item penilaian ketiga yaitu keterlibatan masyarakat terhadap program bantuan stimulant perumahan swadaya (BSPS) kategori terlaksana adalah sebanyak 3 orang atau sama dengan 50% kemudian untuk kategori cukup terlaksana adalah sebanyak 3 orang atau sama dengan 50% sedangkan untuk kategori belum terlaksana tidak ada responden untuk menjawab kategori ini. Artinya tidak semua masrakat ikut terlibat dalam mebantu kegiatan program bantuan stimulant perumahan swadaya (BSPS) ini, mungkin karna ada kesibukan atau tidak sempat untuk terlibat dalam memajukan program bantuan stimulant perumahan swadaya (BSPS) ini.



Untuk kategori penilaian keempat yaitu transparansi pihak desa terhadap program bantuan stimulant perumahan swadaya (BSPS) ini untuk kategori terlaksana adalah sebanyak 3 orang atau sama dengan 50% kemudian untuk kategori cukup terlaksana adalah sebanyak 3 orang atau sama dengan 50% kemudian untuk kategori belum terlaksana tidak ada yang menjawab. Artinya masih ada beberapa pihak desa hanya memaparkan uang keluar atau uang program bantuan stimulant perumahan swadaya (BSPS) ini dan tidak secara langsung melihat laporan keuangan secara hakikatnya.

Kesimpulan dari tanggapan responden terhadap indikator Kebijakan Yang Dilaksanakan dalam judul Pelaksanaan Program Bantuan Stimulant Perumahan Swadaya (BSPS) Dalam Penyediaan Rumah Bantuan di Desa Koto Perambahan Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar bahwa indikator Kebijakan Yang Dilaksanakan dari data tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa penelitian ini termasuk kedalam kategori Terlaksana dengan total persentase 67% sesuai dengan penjelasan sebelumnya tentang persentase 67-100% termasuk kedalam kategori Terlaksana, artinya semua indikator berjalan dengan baik.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Koto Perambahan Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar (Bapak Sahrul).

“dari program Bantuan Stimulant Perumahan Swadaya (BSPS) yang ada di Desa Koto Perambahan semua telah berjalan sesuai dengan yang diharapkan, terbukti



dengan adanya partisipasi masyarakat dalam melancarkan program Bantuan Stimulant Perumahan swadaya (BSPS”).

Selain itu berdasarkan hasil wawancara dengan Koordinator Kabupaten Dinas Perumahan Cipta Karya Kabupaten Kampar (Bapak Hendra Eka Putra, ST).

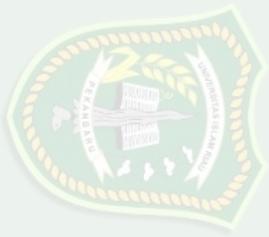
“Pelaksanaan Program Bantuan Stimulant Perumahan Swadaya (BSPS) telah berjalan sesuai dengan rencana dana anggaran, ini terbukti dari berjalannya program dan Transparansi masalah dana anggaran tentang pelaksanaan rumah bantuan di Desa Koto Perambahan Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar”.

Berdasarkan hasil Wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan Program Bantuan Stimulant Perumahan Swadaya (BSPS) di Desa Koto Perambahan Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar sudah berjalan dengan semestinya terbukti dari rencana program dan transparansi dana anggaran yang dilakukan.

Menurut Observasi penelitian di lapangan untuk kebijakan yang dilaksanakan oleh seluruh pelaksana penyedia rumah bantuan di Desa Koto Perambahan Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar telah berjalan sebagaimana semestinya tetapi pencairan dana penyedia rumah bantuan mengalami keterlambatan karena banyaknya kepala keluarga yang menerima rumah bantuan di Desa Koto Perambahan Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar.

Untuk melihat tanggapan dari masyarakat yang menerima rumah bantuan di Desa Koto Perambahan Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar dapat dilihat dari tabel dibawah ini :

UNIVERSITAS
ISLAM RIAU



Tabel V. 11: Distribusi Tanggapan Responden Masyarakat Penerima Rumah Bantuan Tentang Kebijakan Yang Dilaksanakan Program Bantuan Stimulant Perumahan Swadaya (BSPS) di Desa Koto Perambahan Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar

No	Item yang dinilai	Kategori Penilaian			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1	Partisipasi Masyarakat	30 (57%)	18 (34%)	5 (9%)	53
2	Pengaruh Anggaran	22 (42%)	26 (49%)	5 (9%)	53
3	Keterlibatan Masyarakat	18 (34%)	29 (55%)	6 (11%)	53
4	Transparansi pihak Desa	22 (42%)	27 (51%)	4 (7%)	53
Jumlah		92	100	20	212
Rata-rata		23	25	5	53
Persentase		43%	47%	10%	100%

Sumber: Data olahan penulis 2022

Berdasarkan tabel V.11 dapat dilihat bahwa terdapat 53 responden penerima rumah bantuan mengenai kebijakan yang dilaksanakan yang diukur dengan 4 item penilaian yaitu partisipasi masyarakat, pengaruh anggaran, keterlibatan masyarakat dan transparansi pihak desa.

Diketahui dari 53 responden pada item penilaian partisipasi masyarakat tanggapan atau jawaban responden pada kategori terlaksana adalah sebanyak 30 orang atau setara dengan 57% untuk kategori cukup terlaksana adalah sebanyak 18 orang atau setara dengan 34% sedangkan untuk kategori kurang terlaksana adalah sebanyak 5 orang atau setara dengan 9%. Artinya masyarakat menganggap partisipasi masyarakat terlaksana disebabkan adanya kerja sama yang dilakukan oleh pihak desa

dan masyarakat dalam percepatan pembangunan rumah bantuan yang dilakukan di Desa Koto Perambahan sehingga Program Bantuan Stimulant Perumahan Swadaya (BSPS) berjalan sesuai yang diharapkan.

Diketahui dari 53 responden pada item penilaian pengaruh anggaran tanggapan atau jawaban responden pada kategori terlaksana adalah sebanyak 22 orang atau setara dengan 42% untuk kategori cukup terlaksana adalah sebanyak 26 orang atau setara dengan 49% sedangkan untuk kategori kurang terlaksana adalah sebanyak 5 orang atau setara dengan 9%. Artinya masyarakat menganggap anggaran sangat berpengaruh terhadap kelancaran program ini karena sempat terjadi kendala terhadap pencairan dana program yang menyebabkan keberlangsungan program terhambat karena penerima rumah bantuan sangat banyak.

Diketahui dari 53 responden pada item penilaian keterlibatan masyarakat tanggapan atau jawaban responden pada kategori terlaksana adalah sebanyak 18 orang atau setara dengan 34% untuk kategori cukup terlaksana adalah sebanyak 29 orang atau setara dengan 55% sedangkan untuk kategori kurang terlaksana adalah sebanyak 6 orang atau setara dengan 11%. Artinya karna tidak semua masyarakat yang ikut berpartisipasi dalam membantu kegiatan tersebut. Mungkin dikarenakan kesibukan atau tidak sempat dalam berpartisipasi.

Diketahui dari 53 responden pada item penilaian transparansi pihak desa tanggapan atau jawaban responden pada kategori terlaksana adalah sebanyak 22



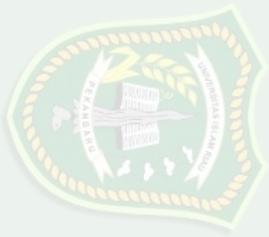
orang atau setara dengan 34% untuk kategori cukup terlaksana adalah sebanyak 27 orang atau setara dengan 55% sedangkan untuk kategori kurang terlaksana adalah sebanyak 4 orang atau setara dengan 11%. Artinya karena desa menyampaikan kepada masyarakat tidak seluruh pencatatan keuangan, ada yang harus diketahui dan tidak, tetapi dalam program Bantuan Stimulant Perumahan Swadaya (BSPS) Desa cukup transparan.

Kesimpulan dari tanggapan responden terhadap indikator Kebijakan Yang Dilaksanakan dalam judul Pelaksanaan Program Bantuan Stimulant Perumahan Swadaya (BSPS) Dalam Penyediaan Rumah Bantuan di Desa Koto Perambahan Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar bahwa indikator Kebijakan Yang Dilaksanakan dari data tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa penelitian ini termasuk kedalam kategori Cukup Terlaksana dengan total persentase 47% sesuai dengan penjelasan sebelumnya tentang persentase 34-66% termasuk kedalam kategori Cukup Terlaksana, artinya belum semua indikator berjalan dengan baik.

2. Kelompok sasaran

Kelompok sasaran adalah masyarakat yang menjadi sasaran dan diharapkan menerima manfaat dari kebijakan. Serta adanya dampak perubahan atau peningkatan yang dipengaruhi oleh kebijakan dan diharapkan dapat mengadopsi pola-pola interaksi sebagaimana yang diharapkan oleh rumus kebijakan. Hal ini dapat dilihat dari tabel berikut ini:

UNIVERSITAS
ISLAM RIAU



Tabel V. 12: Distribusi Tanggapan Responden Petugas Tentang kelompok sasaran Program Bantuan stimulant perumahan swadaya (BSPS) dalam rangka Penyediaan Rumah Bantuan di Desa Koto Perambahan Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar

No	Item yang dinilai	Kategori Penilaian			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1	Dampak perubahan yang dilaksanakan BSPS	4 (67%)	2 (33%)	-	6
2	Observasi petugas	6 (100%)	-	-	6
Jumlah		10	2	-	12
Rata-rata		5	1	-	6
Persentase		83%	17%	-	100%

Sumber: Data olahan penulis 2022

Berdasarkan tabel V.12 dapat dilihat di tabel terdapat 6 responden yang terdiri dari 4 responden dari staff Desa/Pegawai dan 2 dari pejabat Dinas Cipta Karya tentang kelompok sasaran rumah bantuan yang diukur dengan dua item penilaian yaitu dampak perubahan yang dilaksanakan program Bantuan Stimulant Perumahan Swadaya (BSPS) dan Observasi Petugas.

Pada item penilaian pertama yaitu dampak perubahan yang dilaksanakan program Bantuan Stimulant Perumahan Swadaya (BSPS) tanggapan responden kategori penilaian terlaksana adalah sebanyak 4 orang atau sama dengan 66% sedangkan kategori untuk cukup terlaksana sebanyak 2 orang atau sama dengan 34% sedangkan untuk kategori belum terlaksana tidak ada responden untuk menjawab kategori ini. Artinya karena yang pada awalnya atau pada dasarnya yang belum memiliki tempat tinggal bisa mendapatkan rumah yang layak huni dan program

Bantuan Stimulant Perumahan Swadaya (BSPS) sangat berdampak kepada masyarakat dan bisa memajukan Desa terkhususnya masyarakat yang ada di Desa Koto Perambahan Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar.

Untuk item penilaian kedua yaitu Observasi Petugas tanggapan responden kategori terlaksana adalah sebanyak 6 orang atau sama dengan 100% kemudian untuk kategori cukup terlaksana dan kurang terlaksana adalah tidak ada tidak ada tanggapan untuk kategori ini. Artinya karena petugas program Bantuan Stimulant Perumahan Swadaya (BSPS) selalu melakukan Observasi sebelum memberikan bantuan rumah ini guna untuk melihat apakah masyarakat yang menerima rumah bantuan ini layak atau tidak layak.

Kesimpulan dari tanggapan responden terhadap indicator Kelompok Sasaran dalam judul Pelaksanaan Program Bantuan Stimulant Perumahan Swadaya (BSPS) Dalam Penyediaan Rumah Bantuan di Desa Koto Perambahan Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar bahwa indicator Kelompok Sasaran dari data tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa penelitian ini termasuk kedalam kategori Terlaksana dengan total persentase 83% sesuai dengan penjelasan sebelumnya tentang persentase 67-100% termasuk kedalam kategori Terlaksana, artinya semua indikator berjalan dengan baik.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Koto Perambahan Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar (Bapak Sahrul).



“program ini sangat bagus karena meskipun dana yang diberikan tidak besar tapi karena bersifat stimulant bisa menggerakkan banyak hal mulai masyarakat dan perekonomiannya. Program ini telah meningkatkan semangat gotong royong dan bahu membahu membangun sehingga menciptakan kawasan hunian yang lebih baik.

Selain itu berdasarkan hasil wawancara dengan Koordinator Kabupaten Dinas Perumahan Cipta Karya Kabupaten Kampar (Bapak Hendra Eka Putra, ST).

“Untuk wilayah desa Koto Perambahan jumlah bantuan yang diberikan untuk setiap unit rumah yaitu mencapai Rp 17.000.000 per unit yang mana jumlah penerima berjumlah 53 kepala keluarga”.

Untuk melihat tanggapan dari masyarakat yang menerima rumah bantuan di Desa Koto Perambahan Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar dapat dilihat dari tabel dibawah ini :

Tabel V. 13: Distribusi Tanggapan Responden Masyarakat Penerima Rumah Bantuan Tentang kelompok sasaran Program Bantuan stimulant perumahan swadaya (BSPS) dalam rangka Penyediaan Rumah Bantuan di Desa Koto Perambahan Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar

No	Item yang dinilai	Kategori Penilaian			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1	Dampak perubahan yang dilaksanakan BSPS	45 (85%)	8 (15%)	-	53
2	Observasi petugas	27 (51%)	16 (30%)	8 (15%)	53
	Jumlah	72	24	8	106
	Rata-rata	36	12	4	53
	Persentase	68%	23%	9%	100%

Sumber: Data olahan penulis 2022

Berdasarkan tabel V.13 dapat dilihat bahwa terdapat 53 responden penerima rumah bantuan mengenai kebijakan yang dilaksanakan yang diukur dengan 2 item penilaian yaitu Dampak Perubahan yang dilaksanakan Bantuan Stimulant Perumahan Swadaya (BSPS) dan Observasi Petugas.

Pada item penilaian pertama yaitu dampak perubahan yang dilaksanakan program Bantuan Stimulant Perumahan Swadaya (BSPS) tanggapan responden kategori penilaian terlaksana adalah sebanyak 45 orang atau sama dengan 85% sedangkan kategori untuk cukup terlaksana sebanyak 8 orang atau sama dengan 15% sedangkan untuk kategori belum terlaksana tidak ada responden untuk menjawab kategori ini. Artinya masyarakat menganggap dampak perubahan yang dilaksanakan Program Bantuan Stimulant perumahan Swadaya (BSPS) ini memberikan dampak positif kepada masyarakat yang kurang mampu.

Untuk item penilaian kedua yaitu Observasi Petugas tanggapan responden kategori terlaksana adalah sebanyak 27 orang atau sama dengan 51% sedangkan untuk kategori cukup terlaksana adalah sebanyak 16 orang atau sama dengan 30% sedangkan untuk kategori kurang terlaksana adalah sebanyak 8 orang atau sama dengan 15%. Artinya adalah masyarakat ada yang menganggap pihak Desa tidak melakukan observasi seluruhnya di Desa Koto Perambahan hal ini terbukti dengan masih adanya masyarakat yang belum mendapatkan rumah layak huni di Desa Koto Perambahan Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar.



Kesimpulan dari tanggapan responden terhadap indicator Kelompok Sasaran dalam judul Pelaksanaan Bantuan Stimulant Perumahan Swadaya (BSPS) dalam rangka penyediaan rumah bantuan di Desa Koto Perambahan Yang Dilaksanakan Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar bahwa indicator Kelompok Sasaran dari data tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa penelitian ini termasuk kedalam kategori Terlaksana dengan total persentase 68% sesuai dengan penjelasan sebelumnya tentang persentase 67-100% termasuk kedalam kategori Terlaksana, artinya semua indikator berjalan dengan baik.

3. Oganisasi Pelaksana

Organisasi Pelaksana adalah Badan-Badan Pelaksana atau Unit-Unit Birokrasi Pemerintah baik Organisasi atau Perorangan, yang bertanggung jawab dari mulai proses Pengolaan, Pelaksanaan dan Pengawasan dari proses Implementasi Kebijakan. Hal ini dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel V. 14: Distribusi Tanggapan Responden Petugas Tentang Organisasi Pelaksana Program Bantuan stimulant perumahan swadaya (BSPS) dalam rangka Penyediaan Rumah Bantuan di Desa Koto Perambahan Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar

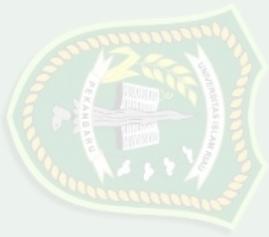
No	Item yang dinilai	Kategori Penilaian			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1	Pengamatan Perkembangan terhadap masyarakat	5 (83%)	1 (17%)	-	6
	Jumlah	5	1	-	6
	Rata-rata	5	1	-	6
	Persentase	83%	17%	-	100%

Sumber: Data olahan penulis 2022

Berdasarkan tabel V.14 dapat dilihat di tabel terdapat 6 responden yang terdiri dari 4 responden dari staff Desa/Pegawai dan 2 dari pejabat Dinas Cipta Karya tentang Organisasi Pelaksana yang dikur dengan satu item penilaian yaitu pengamatan dan perkembangan terhadap masyarakat penerima rumah bantuan dari Program Bantuan Stimulant Perumahan Swdaya (BSPS) di Desa Koto Perambahan Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar.

Pada item penilaian pertama ini yaitu Pengamatan dan Perkembangan Terhadap Masyarakat tanggapan responden untuk kategori penilaian terlaksana adalah sebanyak 5 orang atau sama dengan 83% sedangkan kategori untuk cukup terlaksana sebanyak 1 orang atau sama dengan 17% sedangkan untuk kategori belum terlaksana tidak ada responden untuk menjawab kategori ini. Artinya agar program Bantuan Stimulant Perumahan Swdaya (BSPS) ini tidak disalah gunakan oleh penerima bantuan rumah ini, karna itulah perlu adanya pengawasan baik Organisasi maupun Perorangan demi kelancaran Program Bantuan Stimulant Perumahan Swdaya (BSPS) di Desa Koto Perambahan kecamatan Kampa Kabupaten Kampar.

Kesimpulan dari tanggapan responden terhadap indicator Organisasi Pelaksana dalam judul Pelaksanaan Program Bantuan Stimulant Perumahan Swdaya (BSPS) Dalam Penyediaan Rumah Bantuan di Desa Koto Perambahan Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar bahwa indicator Organisasi Pelaksana dari data tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa penelitian ini termasuk kedalam kategori Terlaksana dengan total persentase 83% sesuai dengan penjelasan sebelumnya tentang persentase



67-100% termasuk kedalam kategori Terlaksana, artinya semua indikator berjalan dengan baik.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Koto Perambahan Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar (Bapak Sahrul).

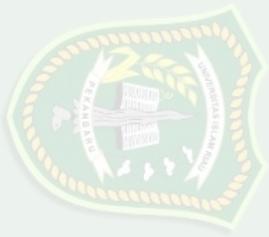
“pengamatan dilakukan bersama dengan coordinator lapangan untuk menjadi bahan evaluasi dan perbaiki kekurangan program yang dilaksanakan sehingga menjadi pembelajaran untuk kedepannya”.

Selain itu berdasarkan hasil wawancara dengan Koordinator Kabupaten Dinas Perumahan Cipta Karya Kabupaten Kampar (Bapak Hendra Eka Putra, ST).

“Artinya adanya tinjauan dari pelaksana program setelah program ini terlaksana oleh koordinator lapangan sebagai bahan evaluasi kinerja program bantuan stimulant perumahan swadaya (BSPS) di Desa Koto Perambahan Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar untuk menjadi lebih baik kedepannya”.

Untuk melihat tanggapan dari masyarakat yang menerima rumah bantuan di Desa Koto Perambahan Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar dapat dilihat dari tabel dibawah ini :

Tabel V. 15: Distribusi Tanggapan Responden Masyarakat Penerima Rumah Bantuan Tentang Organisasi Pelaksana Program Bantuan Stimulant Perumahan Swadaya (BSPS) dalam rangka Penyediaan Rumah Bantuan di Desa Koto Perambahan Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar



No	Item yang dinilai	Kategori Penilaian			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1	Pengamatan Perkembangan terhadap masyarakat	18 (34%)	28 (52%)	7 (14%)	53
	Jumlah	18	28	7	53
	Rata-rata	18	28	7	53
	Persentase	34%	53%	7	100%

Sumber: Data olahan penulis 2022

Berdasarkan tabel V.15 dapat dilihat bahwa terdapat 53 responden penerima rumah bantuan mengenai kebijakan yang dilaksanakan yang diukur dengan 1 item penilaian yaitu pengamatan dan perkembangan terhadap masyarakat penerima rumah bantuan Program Bantuan Stimulant Perumahan Swadaya (BSPS) di Desa Koto Perambahan Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar.

Pada item penilaian pertama ini yaitu Pengamatan dan Perkembangan Terhadap Masyarakat tanggapan responden untuk kategori penilaian terlaksana adalah sebanyak 18 orang atau sama dengan 34% sedangkan kategori untuk cukup terlaksana sebanyak 28 orang atau sama dengan 52% sedangkan untuk kategori belum terlaksana adalah sebanyak 7 orang atau sama dengan 14%. Artinya adanya tinjauan dari pelaksana program setelah program ini terlaksana oleh koordinator lapangan sebagai bahan evaluasi kinerja program bantuan stimulant perumahan swadaya (BSPS) di Desa Koto Perambahan Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar untuk menjadi lebih baik kedepannya.

Kesimpulan dari tanggapan responden terhadap indicator Organisasi Pelaksana dalam judul Pelaksanaan Program Bantuan Stimulant Perumahan Swadaya (BSPS) Dalam Penyediaan Rumah Bantuan di Desa Koto Perambahan Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar bahwa indicator Organisasi Pelaksana dari data tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa penelitian ini termasuk kedalam kategori Cukup Terlaksana dengan total persentase 53% sesuai dengan penjelasan sebelumnya tentang persentase 34-66% termasuk kedalam kategori Cukup Terlaksana, artinya belum semua indikator berjalan dengan baik.

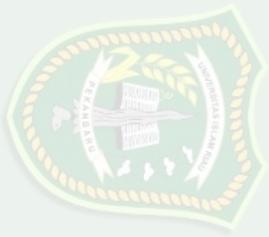
4. Faktor lingkungan

Faktor lingkungan adalah unsur-unsur dalam lingkungan yang mempengaruhi oleh implementasi kebijakan. Model ini proses implementasi kebijakan dari prespektif perubahan social politik. Dilakukan terhadap kebijakan yang bertujuan untuk mengadakan perubahan atau perbaikan pada kelompok sasaran.

Tabel V. 16: Distribusi Tanggapan Responden Petugas Tentang Faktor Lingkungan Program Bantuan stimulant perumahan swadaya (BSPS) dalam rangka Penyediaan Rumah Bantuan di Desa Koto Perambahan Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar

No	Item yang dinilai	Kategori Penilaian			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1	Adanya dukungan dari pihak Desa	4 (67%)	2 (33%)	-	6
2	Melibatkan Mitra Kerja	-	6 (100%)	-	6
	Jumlah	4	8	-	12
	Rata-rata	2	4	-	6
	Persentase	33%	67%	-	100%

Sumber: Data olahan penulis 2022



Berdasarkan tabel V.16 dapat dilihat di tabel terdapat 6 responden yang terdiri dari 4 responden dari staff Desa/Pegawai dan 2 dari pejabat Dinas Cipta Karya tentang kelompok sasaran rumah bantuan yang diukur dengan dua item penilaian yaitu adanya dukungan dari pihak Desa dan Melibatkan Mitra Kerja.

Pada item penilaian pertama yaitu adanya dukungan dari pihak Desa tanggapan responden kategori penilaian terlaksana adalah sebanyak 4 orang atau sama dengan 67% sedangkan kategori untuk cukup terlaksana sebanyak 2 orang atau sama dengan 33% sedangkan untuk kategori belum terlaksana tidak ada responden untuk menjawab kategori ini. Artinya pihak desa sangat mendukung program ini karena bisa membantu masyarakat sehingga rumah menjadi layak huni.

Untuk item penilaian kedua yaitu Melibatkan Mitra Kerja tanggapan responden kategori terlaksana tidak ada yang menjawab kategori ini kemudian untuk kategori cukup terlaksana adalah sebanyak 6 Orang atau sama dengan 100%. Dan kategori kurang terlaksana tidak ada yg menjawab untuk kategori ini. Artinya dalam melaksanakan program BSPS ini pihak Desa bekerja sama dengan toko bangunan dalam penyediaan bahan bangunan.

Kesimpulan dari tanggapan responden terhadap indicator Faktor Lingkungan dalam judul Pelaksanaan Program Bantuan Stimulant Perumahan Swadaya (BSPS) Dalam Penyediaan Rumah Bantuan di Desa Koto Perambahan Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar bahwa indicator Faktor Lingkungan dari data tersebut dapat



ditarik kesimpulan bahwa penelitian ini termasuk kedalam kategori Cukup Terlaksana dengan total persentase 66% sesuai dengan penjelasan sebelumnya tentang persentase 34-66% termasuk kedalam kategori Terlaksana, artinya belum semua indikator berjalan dengan baik.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Koto Perambahan Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar (Bapak Sahrul).

“pihak Desa sangat mendukung akan adanya program BSPS ini, karena dengan adanya program ini masyarakat yang tadi nya belum mempunyai rumah layak huni, karena adanya program BSPS mimpi masyarakat untuk mempunyai rumah layak huni bisa tercapai”.

Selain itu berdasarkan hasil wawancara dengan Koordinator Kabupaten Dinas Perumahan Cipta Karya Kabupaten Kampar (Bapak Hendra Eka Putra, ST).

“karena banyaknya penerima rumah bantuan dari program BSPS ini bahan untuk pembangunan rumah dibutuhkan sangat banyak jadi, untuk memperlancarkan dilakukan kerja sama dengan pihak toko bangunan sebagai penyedia bahan”.

Untuk melihat tanggapan dari masyarakat yang menerima rumah bantuan di Desa Koto Perambahan Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar dapat dilihat dari tabel dibawah ini :



Tabel V. 17: Distribusi Tanggapan Responden Masyarakat Penerima Rumah Bantuan Tentang Faktor Lingkungan Program Bantuan stimulant perumahan swadaya (BSPS) dalam rangka Penyediaan Rumah Bantuan di Desa Koto Perambahan Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar

No	Item yang dinilai	Kategori Penilaian			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1	Adanya dukungan dari pihak Desa	16 (30%)	29 (55%)	8 (15%)	53
2	Melibatkan Mitra Kerja	14 (26%)	31 (59%)	8 (15%)	53
	Jumlah	30	60	16	106
	Rata-rata	15	30	8	53
	Persentase	28%	57%	15%	100%

Sumber: Data olahan penulis 2022

Berdasarkan tabel V.17 dapat dilihat bahwa terdapat 53 responden penerima rumah bantuan mengenai kebijakan yang dilaksanakan yang diukur dengan 2 item penilaian yaitu adanya dukungan dari pihak Desa dan melibatkan Mitra Kerja

Pada item penilaian pertama yaitu adanya dukungan dari pihak Desa tanggapan responden kategori penilaian terlaksana adalah sebanyak 16 orang atau sama dengan 30% sedangkan kategori untuk cukup terlaksana sebanyak 29 orang atau sama dengan 55% sedangkan untuk kategori belum terlaksana adalah sebanyak 8 orang atau sama dengan 15%. Artinya pihak Desa terlibat dalam proses program BSPS ini baik sebelum maupun sesudah program dilaksanakan

Untuk item penilaian kedua yaitu melibatkan Mitra Kerja tanggapan responden kategori terlaksana adalah sebanyak 14 orang atau sama dengan 26%

sedangkan untuk kategori cukup terlaksana adalah sebanyak 31 orang atau sama dengan 57% sedangkan untuk kategori kurang terlaksana adalah sebanyak 8 orang atau sama dengan 15%. Artinya adalah kadang-kadang diperlukan mitra kerja dari luar untuk merealisasikan program BSPS tersebut sebagai model atau contoh.

Selanjutnya yang telah dipaparkan pada tabel dengan penjelasan per item penilaian pada halaman sebelumnya, maka dirasa perlu untuk menyimpulkan seluruh indikator kedalam sebuah tabel guna untuk mengetahui lebih jelas tentang hasil dari pelaksanaan Program Bantuan Stimulant Perumahan Swadaya (BSPS) dalam penyediaan Rumah Bantuan di Desa Koto Perambahan Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar.

Kesimpulan dari tanggapan responden terhadap indikator Faktor Lingkungan dalam judul Pelaksanaan Program Bantuan Stimulant Perumahan Swadaya (BSPS) Dalam Penyediaan Rumah Bantuan di Desa Koto Perambahan Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar bahwa indikator Faktor Lingkungan dari data tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa penelitian ini termasuk kedalam kategori Belum Terlaksana dengan total persentase 57% sesuai dengan penjelasan sebelumnya tentang persentase 34-66% termasuk kedalam kategori Cukup Terlaksana, artinya belum semua indikator berjalan dengan baik.

**UNIVERSITAS
ISLAM RIAU**



DOKUMEN INI ADALAH ARSIP MILIK :

PERPUSTAKAAN SOEMAN HS

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Tabel V. 18: Rekapitulasi Tanggapan Petugas Penerima Rumah Bantuan Tentag Bantuan stimulant perumahan swadaya (BSPS) dalam rangka Penyediaan Rumah Bantuan di Desa Koto Perambahan Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar

No	Item yang dinilai	Kategori Penilaian			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1	Kebijakan yang dilaksanakan	4 (67%)	2 (33%)	-	6
2	Kelompok sasaran	5 (83%)	1 (17%)	-	6
3	Organisasi Pelaksana	5 (83%)	1 (17%)	-	6
4	Faktor lingkungan	2 (33%)	4 (67%)	-	6
Jumlah		16	8	-	24
Rata-rata		4	2	-	6
Persentase		67%	33%	-	100%

Sumber: Data olahan penulis 2022

Dari table V.18 diketahui bahwa tanggapan responden petugas mengenai Indikator Pelaksanaan Bantuan Stimulant Perumahan Swadaya (BSPS) dalam rangka Penyediaan Rumah Bantuan di Desa Koto Perambahan Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar yang pertama yaitu kebijakan yang dilaksanakan kategori penilaian terlaksana adalah 4 orang atau setara 67%, untuk kategori cukup terlaksana adalah 2 orang atau setara 33% dan kategori kurang terlaksana tidak ada juga yang menjawab.

Untuk indikator Pelaksanaan Bantuan Stimulant Perumahan Swadaya (BSPS) dalam rangka Penyediaan Rumah Bantuan di Desa Koto Perambahan Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar yang kedua adalah Kelompok Sasaran dengan kategori

penilaian terlaksana adalah 5 orang atau setara 83%, untuk kategori cukup terlaksana adalah 1 orang atau setara dengan 17%. Dan kategori kurang terlaksana tidak ada yang menjawab.

Selanjutnya untuk indikator Pelaksanaan Bantuan Stimulant Perumahan Swadaya (BSPS) dalam rangka Penyediaan Rumah Bantuan di Desa Koto Perambahan Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar yang ketiga Organisasi Pelaksana adalah dengan kategori terlaksana 5 orang atau setara 83%, dan kategori cukup terlaksana adalah 1 orang atau setara 17%, selanjutnya kurang terlaksana tidak ada yang menjawab.

Selanjutnya untuk indikator Pelaksanaan Bantuan Stimulant Perumahan Swadaya (BSPS) dalam rangka Penyediaan Rumah Bantuan di Desa Koto Perambahan Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar yang keempat Faktor Lingkungan adalah dengan kategori terlaksana 2 orang atau setara 33%, dan kategori cukup terlaksana adalah 4 orang atau setara 67%, selanjutnya kurang terlaksana tidak ada yang menjawab.

Kesimpulan dari rekapitulasi tanggapan responden petugas terhadap indikator Pelaksanaan Bantuan Stimulant Perumahan Swadaya (BSPS) dalam rangka Penyediaan Rumah Bantuan di Desa Koto Perambahan Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar untuk kategori penilaian Terlaksana adalah sebesar 67%, untuk

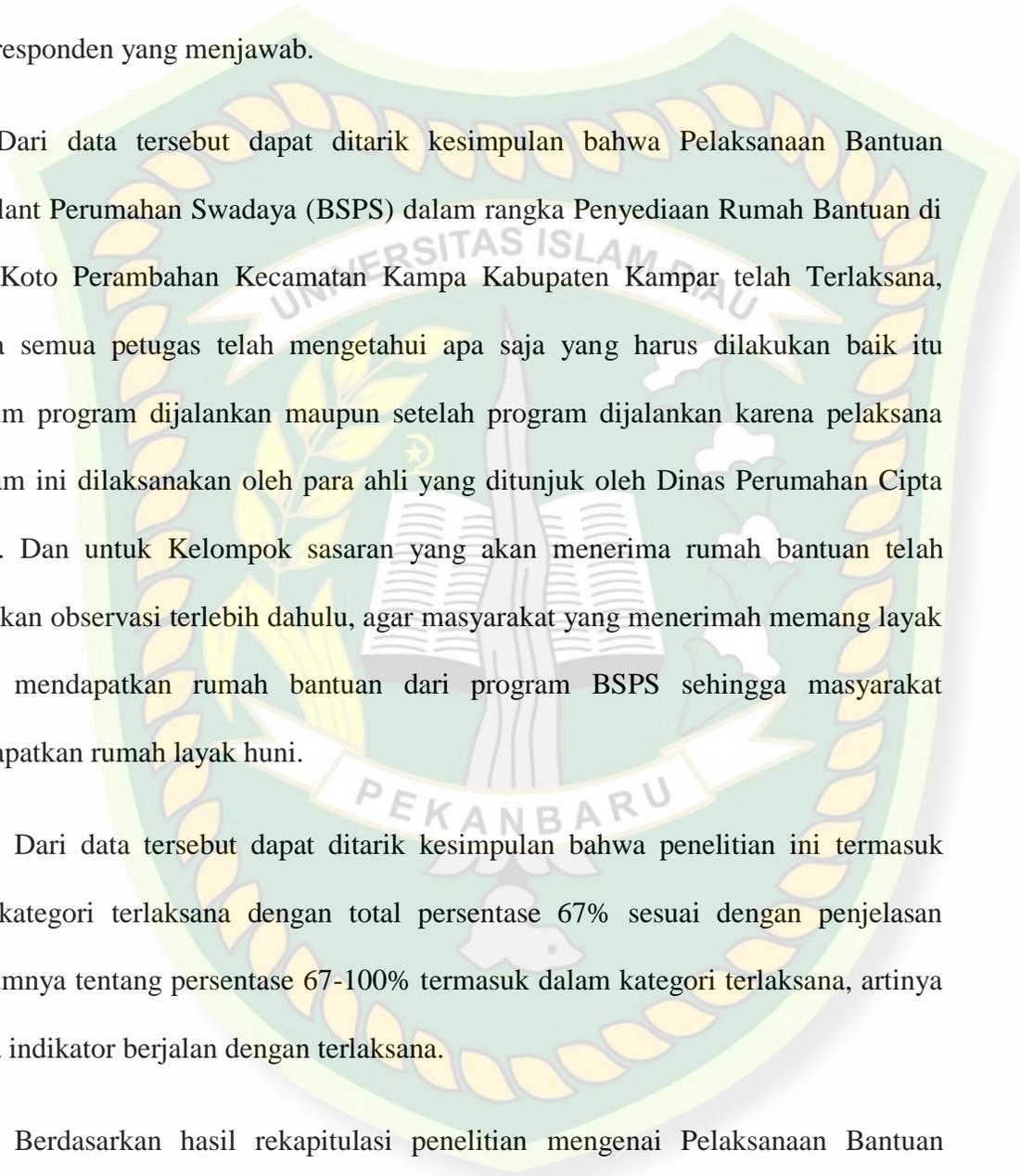


kategori cukup Terlaksana adalah sebesar 33% dan untuk kategori kurang Terlaksana tidak responden yang menjawab.

Dari data tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa Pelaksanaan Bantuan Stimulant Perumahan Swadaya (BSPS) dalam rangka Penyediaan Rumah Bantuan di Desa Koto Perambahan Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar telah Terlaksana, karena semua petugas telah mengetahui apa saja yang harus dilakukan baik itu sebelum program dijalankan maupun setelah program dijalankan karena pelaksana program ini dilaksanakan oleh para ahli yang ditunjuk oleh Dinas Perumahan Cipta Karya. Dan untuk Kelompok sasaran yang akan menerima rumah bantuan telah dilakukan observasi terlebih dahulu, agar masyarakat yang menerimah memang layak untuk mendapatkan rumah bantuan dari program BSPS sehingga masyarakat mendapatkan rumah layak huni.

Dari data tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa penelitian ini termasuk pada kategori terlaksana dengan total persentase 67% sesuai dengan penjelasan sebelumnya tentang persentase 67-100% termasuk dalam kategori terlaksana, artinya semua indikator berjalan dengan terlaksana.

Berdasarkan hasil rekapitulasi penelitian mengenai Pelaksanaan Bantuan Stimulant Perumahan Swadaya (BSPS) dalam rangka Penyediaan Rumah Bantuan di Desa Koto Perambahan Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar berada pada kategori “Terlaksana”. Hal ini berdasarkan tanggapan responden yang menilai bahwa peserta



UNIVERSITAS

ISLAM RIAU

anggota penerima rumah bantuan yang tergabung dalam program BSPS, karena kegiatan penyuluhan BSPS ini tidak dipungut biaya atau gratis, Kegiatan BSPS ini juga sangat bermanfaat karena membantu masyarakat agar memiliki rumah yang layak huni. Ini terlihat dari beberapa indikator yang terlaksana dalam kegiatan Pelaksanaan Bantuan Stimulant Perumahan Swadaya (BSPS) dalam rangka Penyediaan Rumah Bantuan di Desa Koto Perambahan Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar antara lain indikator “Kebijakan yang dilaksanakan, Kelompok Sasaran dan Organisasi Pelaksana” dengan kategori penilaian *Terlaksana. Hal ini terlihat dari indikator kebijakan yang dilaksanakan dengan terbangunnya semua rumah masyarakat yang memperoleh bantuan. Untuk Indikator Kelompok Sasaran terlihat dari masyarakat yang menerima rumah bantuan memang masyarakat yang kurang mampu yang mempunyai rumah yang kurang layak huni dan karena adanya bantuan ini masyarakat penerima bantuan bisa menempati rumah yang layak huni untuk ditempati. Dan untuk indikator Organisasi Pelaksana dilihat dari organisasi yang melaksanakan yaitu Dinas Perumahan Cipta Karya dengan melakukan pengawasan sehingga tidak disalah gunakan oleh penerima rumah bantuan. Untuk indikator Faktor Lingkungan mendapatkan kategori cukup Terlaksana karena saat program rumah bantuan dijalankan terdapat kendala yang alami yaitu lambatnya proses pembangunan rumah karena terdapat kendala pada bahan bangunan karena rumah.

Dibawah ini merupakan tabel rekapitulasi responden Masyarakat penerima rumah bantuan mengenai indikator Pelaksanaan Bantuan Stimulant Perumahan



**UNIVERSITAS
ISLAM RIAU**

Swadaya (BSPS) dalam rangka Penyediaan Rumah Bantuan di Desa Koto Perambahan Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar:

Tabel V. 19: Rekapitulasi Tanggapan masyarakat Penerima Rumah Bantuan Tentang Bantuan stimulant perumahan swadaya (BSPS) dalam rangka Penyediaan Rumah Bantuan di Desa Koto Perambahan Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar

No	Item yang dinilai	Kategori Penilaian			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1	Kebijakan yang dilaksanakan	23 (43%)	25 (47%)	5 (10%)	53
2	Kelompok sasaran	36 (67%)	12 (23%)	5 (10%)	53
3	Organisasi Pelaksana	18 (34%)	28 (53%)	7 (13%)	53
4	Faktor lingkungan	15 (28%)	30 (57%)	8 (15%)	53
Jumlah		92	95	25	212
Rata-rata		23	24	6	53
Persentase		43%	46%	11%	100%

Sumber: Data olahan penulis 2022

Dari tabel V.19 diketahui bahwa tanggapan responden masyarakat mengenai indikator pelaksanaan Bantuan Stimulant Perumahan swadaya (BSPS) di Desa Koto Perambahan Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar yang pertama yaitu kebijakan yang dilaksanakan kategori penilaian terlaksana adalah 23 orang atau setara dengan 43% untuk kategori cukup terlaksana adalah 25 orang atau setara dengan 47% sedangkan untuk kategori kurang terlaksana adalah 5 orang atau setara dengan 10%.

Untuk indikator Pelaksanaan Bantuan Stimulant Perumahan Swadaya (BSPS) dalam rangka penyediaan rumah bantuan di Desa Koto Perambahan Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar yang kedua adalah Kelompok Sasaran dengan kategori

penilaian terlaksana adalah 36 orang atau setara dengan 67% dan untuk kategori cukup terlaksana adalah 12 orang atau setara dengan 23% sedangkan untuk kategori kurang terlaksana adalah 5 orang atau setara dengan 10%.

Selanjutnya untuk kategori yang ketiga yaitu Organisasi Pelaksana dengan kategori terlaksana adalah 18 orang atau setara dengan 34% dan kategori cukup terlaksana adalah 28 orang atau setara dengan 53% selanjutnya untuk kategori kurang terlaksana adalah 7 orang atau setara dengan 13%.

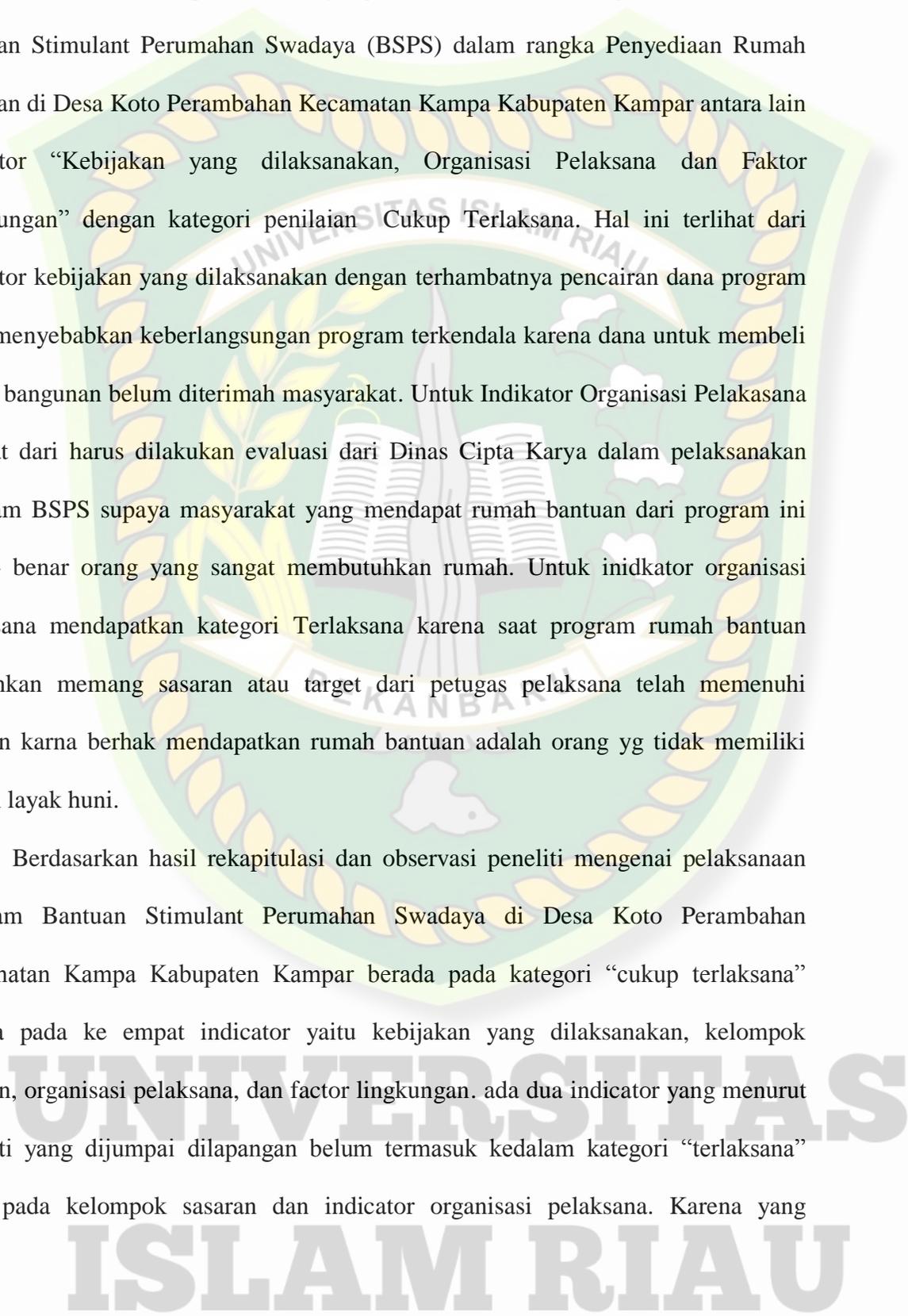
Dan untuk indikator yang terakhir yaitu Faktor Lingkungan dengan kategori terlaksana adalah 15 orang atau setara dengan 28% sedangkan untuk kategori cukup terlaksana adalah 30 orang atau setara dengan 57% selanjutnya untuk kategori kurang terlaksana adalah 8 orang atau setara dengan 15%.

Kesimpulan dari rekapitulasi tanggapan responden terhadap indikator Pelaksanaan Bantuan Stimulant Perumahan Swadaya (BSPS) dalam rangka penyediaan rumah bantuan di Desa Koto Peramabahan Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar untuk kategori penilaian terlaksana adalah sebesar 43% untuk kategori cukup terlaksana adalah sebesar 46% dan untuk kategori kurang terlaksana adalah sebesar 11% dari total keseluruhan hasil dari masyarakat penerima rumah bantuan, dari data tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa penelitian ini termasuk kedalam kategori cukup terlaksana dengan total persentase 46% sesuai dengan penjelasan sebelumnya tentang persentase 34-66% termasuk kedalam kategori cukup terlaksana, artinya belum semua indikator berjalan dengan baik.



terlihat dari keempat indicator yang dilaksanakan dalam kegiatan Pelaksanaan Bantuan Stimulant Perumahan Swadaya (BSPS) dalam rangka Penyediaan Rumah Bantuan di Desa Koto Perambahan Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar antara lain indicator “Kebijakan yang dilaksanakan, Organisasi Pelaksana dan Faktor Lingkungan” dengan kategori penilaian Cukup Terlaksana. Hal ini terlihat dari indicator kebijakan yang dilaksanakan dengan terhambatnya pencairan dana program yang menyebabkan keberlangsungan program terkendala karena dana untuk membeli bahan bangunan belum diterima masyarakat. Untuk Indikator Organisasi Pelaksana terlihat dari harus dilakukan evaluasi dari Dinas Cipta Karya dalam melaksanakan program BSPS supaya masyarakat yang mendapat rumah bantuan dari program ini benar- benar orang yang sangat membutuhkan rumah. Untuk inidkator organisasi pelaksana mendapatkan kategori Terlaksana karena saat program rumah bantuan dijalankan memang sasaran atau target dari petugas pelaksana telah memenuhi sasaran karna berhak mendapatkan rumah bantuan adalah orang yg tidak memiliki rumah layak huni.

Berdasarkan hasil rekapitulasi dan observasi peneliti mengenai pelaksanaan Prpgram Bantuan Stimulant Perumahan Swadaya di Desa Koto Perambahan Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar berada pada kategori “cukup terlaksana” karena pada ke empat indicator yaitu kebijakan yang dilaksanakan, kelompok sasaran, organisasi pelaksana, dan factor lingkungan. ada dua indicator yang menurut peneliti yang dijumpai dilapangan belum termasuk kedalam kategori “terlaksana” yaitu pada kelompok sasaran dan indicator organisasi pelaksana. Karena yang



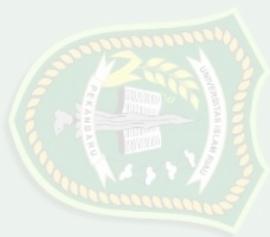
dijumpai dilapangan masih ada nya pihak desa atau petugas pelaksana program bantuan stimulant perumahan swadaya ini tidak melakukan pendataan dengan baik karna masih adanya masyarakat yg berpenghasilan tetap tetapi masyarakat tersebut mendapat rumah bantuan dari program bantuan stimulant perumahan swadaya (BSPS) ini. Bahwa pada dasarnya masyarakat yg berpenghasilan tetap tidak termasuk kedalam sasaran dari program bantuan stimulant perumahan swadaya (BSPS) ini yang ada di desa koto perambahan kecamatan kampa kabupaten kampar.

C. Hambatan Dalam Pelaksanaan Program Bantuan Stimulant Permahan Swadaya (BSPS) dalam rangka penyediaan rumah bantuan di Desa Koto Perambahan Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar

Hambatan adalah rintangan atau tantangan kesulitan yang dirasakan saat melaksanakan tugas atau tanggung jawab. Hambatan dapat memengeruhi lingkungan organisasi tersebut dapat tercapai atau tidak. Walaupun Pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dalam penyediaan Rumah Bantuan di Desa Koto Perambahan Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar berjalan sesuai dengan peraturan atau kebijakan yang telah ditetapkan, namun masih terdapat berbagai macam kendala-kendala yang penulis temukan dalam penelitian Pelaksanaan Program Bantuan Stimulant Perumahan Swadaya (BSPS) dalam rangka penyediaan rumah bantuan di Desa Koto Perambahan Kecamatan Kmpa Kabupaten Kampa. Adapun kendala-kendala tersebut yaitu:

5. Masih adanya masyarakat yang berpenghasilan tetap mendapatkan rumah bantuan dari program bantuan stimulant perumahan swadaya (BSPS) ini yang pada dasarnya masyarakat yang berpenghasilan tetap tidak termasuk kedalam sasaran pada program ini.
6. Lambatnya pencairan dana atau tidak tepak waktunya pencairan dana dari pihak desa atau petugas program bantuan stimulant perumahan swadaya (BSPS) ini. Karena pada dasarnya masyarakat penerima rumah bantuan atau yg mendapatkan rumah sudah mulai beransur-ansur merobohkan rumah lamanya menjadi terbengkalai karena terlambatnya pencairan dana keluar dari pihak desa atau pelaksana program bantuan stimulant perumahan swadaya (BSPS) ini yang ada di desa koto perambahan kecamatan kampa kabupaten Kampar.
7. Tidak semua masyarakat penerima rumah bantuan ini bermusyawarah/rapat di aula desa sehingga pihak pelaksana atau pihak desa kurang mengetahui kepala keluarga yg terdata untu mendapatkan rumah bantuan ini. Karena masyarakat rumah bantuan ini tidak semua nya hadir kedalam rapat mengenai pelaksanaan program bantuan stimulant perumahan swadaya (BSPS) ini.

**UNIVERSITAS
ISLAM RIAU**



DOKUMEN INI ADALAH ARSIP MILIK :

PERPUSTAKAAN SOEMAN HS

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

BAB VI PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah penulis lakukan mengenai Pelaksanaan Program Bantuan Stimulant Perumahan Swadaya (BSPS) dalam rangka penyediaan rumah bantuan di Desa Koto Perambahan Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar, maka dapat penulis ambil kesimpulan dan saran untuk bahan masukan bagi pihak terkait terutama bagi pegawai/staff Desa Koto Perambahan Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar sebagai berikut :

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Pelaksanaan Program Bantuan Stimulant Perumahan Swadaya (BSPS) dalam Penyediaan Rumah Bantuan Di Desa Koto Perambahan Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar maka dapat di ambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Untuk Indikator Kebijakan yang dilaksanakan termasuk kedalam kategori terlaksana menurut tanggapan petugas berdasarkan hasil dari Observasi dari penulis, karena dengan terbangunnya semua rumah masyarakat yang memperoleh bantuan. Untuk Indikator Kelompok Sasaran terlihat dari masyarakat yang menerima rumah bantuan memang masyarakat yang kurang mampu yang mempunyai rumah yang kurang layak huni dan karena adanya bantuan ini masyarakat penerima bantuan bisa menempati rumah yang layak huni

untuk ditempati. Sedangkan menurut tanggapan masyarakat indicator kebijakan yang dilaksanakan ini termasuk kedalam kategori cukup terlaksana. Hal ini terlihat dari indicator kebijakan yang dilaksanakan dengan terhambatnya pencairan dana program yang menyebabkan keberlangsungan program terkendala karena dana untuk membeli bahan bangunan belum diterima masyarakat. Untuk Indikator Organisasi Pelaksana terlihat dari harus dilakukan evaluasi dari Dinas Cipta Karya dalam melaksanakan program BSPS karena terdapat kendala yang terjadi dilapangan seperti pencairan dana yang lambat sehingga pelaksanaan program BSPS terhambat.

2. Untuk indicator Kelompok Sasaran termasuk kedalam kategori terlaksana menurut tanggapan petugas rumah bantuan dan penerima rumah bantuan berdasarkan hasil Observasi dari penulis. Hal ini terlihat dari masyarakat yang menerima rumah bantuan memang masyarakat yang kurang mampu yang mempunyai rumah yang kurang layak huni dan karena adanya bantuan ini masyarakat penerima bantuan bisa menempati rumah yang layak huni untuk ditempati.
3. Untuk indicator Organisasi Pelaksana termasuk kedalam kategori terlaksana menurut tanggapan petugas rumah bantuan berdasarkan hasil dari Observasi penulis dilapangan. dilihat dari organisasi yang melaksanakan yaitu Dinas Perumahan Cipta Karya dengan melakukan pengawasan sehingga tidak disalah gunakan oleh penerima rumah bantuan. Sedangkan menurut tanggapan masyarakat penerima rumah bantuan indicator Organisasi Pelaksana termasuk



UNIVERSITAS
ISLAM RIAU

DOKUMEN INI ADALAH ARSIP MILIK :

PERPUSTAKAAN SOEMAN HS

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

kedalam kategori cukup terlaksana, terlihat dari harus dilakukan evaluasi dari Dinas Cipta Karya dalam melaksanakan program BPS karena terdapat kendala yang terjadi dilapangan seperti pencairan dana yang lambat sehingga pelaksanaan program BPS terhambat.

4. Untuk indicator Faktor Lingkungan termasuk kedalam kategori kurang terlaksana menurut tanggapan petugas Rumah Bantuan dan tanggapan masyarakat penerima rumah bantuan berdasarkan hasil dari Observasi penulis dilapangan. karena saat program rumah bantuan dijalankan terdapat kendala yang alami yaitu lambatnya proses pembangunan rumah karena terdapat kendala pada bahan bangunan rumah.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah di lakukan, maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada tim pelaksana kegiatan dimulai dari tingkat pusat sampai Masyarakat agar menjalankan tugasnya masing-masing sesuai dengan apa yang telah ditetapkan sehingga tahapan-tahapan yang dilaksanakan sesuai dengan pedoman pelaksanaan program, pencairan dana bantuan serta upah harus tepat pada waktunya agar program terlaksana dengan baik dan program Rumah Layak Huni ini benar-benar menyentuh masyarakat miskin serta dapat mengentaskan kemiskinan pada masyarakat.



2. Terkait Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) seharusnya sebelum dilaksanakannya program masyarakat khususnya calon penerima bantuan diberikan pelatihan khusus agar masyarakat bisa mandiri dan tidak menyerahkan semua kepada pengurus.
3. Koordinasi dan komunikasi antara dinas perkim, fasilitator serta masyarakat agar bisa lebih terbuka lagi supaya tidak terjadi kesalah atau miss-komunikasi



**UNIVERSITAS
ISLAM RIAU**

DOKUMEN INI ADALAH ARSIP MILIK :

PERPUSTAKAAN SOEMAN HS

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

DAFTAR PUSTAKA

- Brantas, 2009. *Dasar-Dasar Manajemen*. Bandung. Alfabeta.
- Budiardjo, Miriam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta, Gramedia Pustaka Utama
- Fathoni, Abdurahmat. 2006. *Manajemen Sumber daya Manusia*. Jakarta; Rineka Cipta
- Gomes, Cardoso, Faustino, 2003. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta, Andi.
- Hakim, Lukman. 2011. *Pengantar Administrasi Pembangunan*. Yogyakarta : ArRuzz Media
- Hasibuan, 2012. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta, Bumi Aksara
- Hasibuan, Malayu S.P. 2005. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Edisi Revisi. Cetakan ke 5. Bumi Aksara, Jakarta
- M. Manullang, 2002. *Dasar-Dasar Manajemen*, Medan, Gadjah Mada University Press
- Reksohadiprojo, Sukanto, 2000. *Dasar-Dasar Manajemen*. Yogyakarta, BPFE UGM.
- Sarwono, Jonathan, 2010. *Pintar Menulis Karangan Ilmiah*. Yogyakarta, Andi Offset
- Sedarmayanti. 2009. *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*. Bandung; CV Mandar Maju
- Siagian, P. Sondang. 2019. *Filsafat Administrasi Edisi Revisi*. Jakarta: PT Bumi
- Siagian, Sondang P., 2010. *Filsafat Administrasi*. Jakarta, Offset Sapdodadi
- Sinambela, 2012. *Kinerja Pegawai Teori Pengukuran dan Implikasi*. Yogyakarta,
- Sugiyino, 2013. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta

Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung :

Alfabeta

Sule dan Sefullah, 2015. *Pengantar Manajemen*. Jakarta: Kencana Yogyakarta, Andi.

Zulkifli dan Numasari. 2015. *Pengantar Manajemen*. Pekanbaru: Marpoyan Tujuh Publishing

Zulkifli dan Yogia. 2014. *Fungsi-Fungsi Manajemen*. Pekanbaru.: Marpoyan Tujuh Publishing

Zulkifli, 2009. *Fungsi-Fungsi Manajemen*. Fispol Uir Pekanbaru

Samsudin, 2010. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Pustaka Setia.

Silalahi, Ulbert, 2009. *Study Tentang Ilmu Administrasi*. Bandung, Sinar Baru Aglesindo.



**UNIVERSITAS
ISLAM RIAU**

DOKUMEN INI ADALAH ARSIP MILIK :

PERPUSTAKAAN SOEMAN HS

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Peraturan dan Undang-Undang

Rencana Strategis Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tahun 2015-2019

Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional RI Nomor 13 tahun 2019 tentang Pengelolaan Kelompok Kegiatan BKL

Badan Pusat Statistik, 2018. *Kampar Dalam Angka 2018*. Kampar: Badan Pusat Statistik.

Jurnal Online

Pebi Julianto,” *Partisipasi Masyarakat Dalam Program Bantuan Stimulant Perumahan Swadaya (BSPS) di Desa Koto Baru Kecamatan Koto Baru 2020*.

Anderson Mamankey, Johny Lumolos, and Fanley Pengemanan. “ *Pelaksanaan Program Bantuan Stimulant Perumahan Swadaya (BSPS) di Kecamatan Amurang Timur Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2019*.

Ida Farida. “ *Implementasi Kebijakan Bantuan Stimulant Perumahan Swadaya (BSPS) pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kabupaten Subang Tahun 2020*.

Suhardi Mukhlis. “ *Evaluasi Program Bantuan Stimulant Perumahan Swadaya (BSPS) pada Kelurahan Tanjung Unggat Tahun 2019*.

UNIVERSITAS
ISLAM RIAU



LAMPIRAN

Lampiran I: Dokumentasi Wawancara Penelitian Tentang Pelaksanaan Program Bantuan Stimulant Perumahan Swadaya (BSPS) dalam Penyediaan Rumah Bantuan di Desa Koto Perambahan Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar.



Keterangan : Dokumentasi foto Wawancara bersama Kepala Desa Koto Perambahan Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar.

**UNIVERSITAS
ISLAM RIAU**





Keterangan : Penyerahan Wawancara kepada Kepala Desa Koto Perambahan Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar Bapak Sahrul

**UNIVERSITAS
ISLAM RIAU**

DOKUMEN INI ADALAH ARSIP MILIK :

PERPUSTAKAAN SOEMAN HS

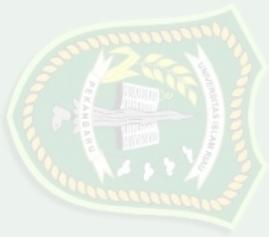
UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Lampiran II: Dokumentasi Dengan Petugas Program Bantuan Stimulant Perumahan Swadaya (BSPS) dalam Penyediaan Rumah di Desa Koto Perambahan Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar



Keterangan : Foto bersama Petugas Pelaksanaan Program Bantuan Stimulant Perumahan Swadaya (BSPS) dalam Penyediaan Rumah Bantuan di Desa Koto Perambahan Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar.

**UNIVERSITAS
ISLAM RIAU**





DOKUMEN INI ADALAH ARSIP MILIK :

PERPUSTAKAAN SOEMAN HS

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Keterangan : Dokumentasi Penyerahan Kusiner kepada salah satu Masyarakat penerima Rumah Bantuan di Desa Koto Perambahan Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar.

UNIVERSITAS
ISLAM RIAU



Keterangan : Dokumentasi Foto Rumah sebelum direhab – setelah di rehab



UNIVERSITAS
ISLAM RIAU

DOKUMEN INI ADALAH ARSIP MILIK :

PERPUSTAKAAN SOEMAN HS

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

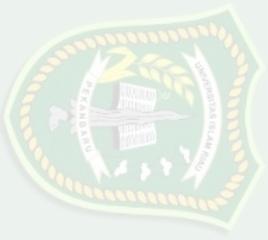


DOKUMEN INI ADALAH ARSIP MILIK :

PERPUSTAKAAN SOEMAN HS

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

**UNIVERSITAS
ISLAM RIAU**



Kondisi : Sebelum direhab



Kondisi : Setelah direhab

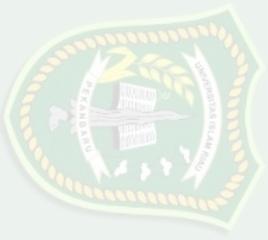
DOKUMEN INI ADALAH ARSIP MILIK :

PERPUSTAKAAN SOEMAN HS

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

**UNIVERSITAS
ISLAM RIAU**

Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin



Kondisi Sebelum direhab



Kondisi Setelah direhab

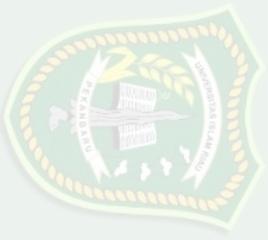
DOKUMEN INI ADALAH ARSIP MILIK :

PERPUSTAKAAN SOEMAN HS

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

**UNIVERSITAS
ISLAM RIAU**

Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin



DOKUMEN INI ADALAH ARSIP MILIK :

PERPUSTAKAAN SOEMAN HS

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

**UNIVERSITAS
ISLAM RIAU**

Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin



DOKUMEN INI ADALAH ARSIP MILIK :

PERPUSTAKAAN SOEMAN HS

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

**UNIVERSITAS
ISLAM RIAU**

Lampiran III: Daftar Kusioner untuk Petugas Program Bantuan Stimulant Perumahan Swadaya (BSPS) dalam Penyediaan Rumah Bantuan di Desa Koto Perambahan Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar.

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**KUSIONER PENELITIAN
TENTANG
PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN STIMULANT PERUMAHAN
SWADAYA (BSPS) DALAM PENYEDIAAN RUMAH BANTUAN DI DESA
KOTO PERAMBAHAN KECAMATAN KAMPA KABUPATEN KAMPAR**



Rozi Alpendra

NPM : 167110858

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
PEKANBARU**

2022

ISLAM RIAU

**DAFTAR KUESIONER PENELITIAN TENTANG
PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN STIMULANT PERUMAHAN
SWADAYA (BSPS) DALAM PENYEDIAAN RUMAH BANTUAN DI DESA
KOTO PERAMBAHAN KECAMATAN KAMPA KABUPATEN KAMPAR**

No. Responden
(di isi oleh peneliti)

I. Pengantar Kuesioner

Kepada Yth : Kepala Desa Koto Perambahan

Dengan Hormat,

Dalam rangka penulisan skripsi di Universitas Islam Riau, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk ujian Kesarjanaan Strata Satu (S1) Program Studi Administrasi Publik, maka saya mohon dengan segala hormat kepada Bapak/ Ibu untuk bersedia memberikan penjelasan secara ringkas.

Kuesioner ini ditujukan semata- mata untuk mengumpulkan data dan informasi sehubungan dengan penyusunan skripsi. Maka dari itu, informasi yang Bapak/Ibu berikan akan dirahasiakan, saya harap Bapak/Ibu dalam memberikan jawaban yang sejujurnya dan informasi yang diberikan sesuai dengan kondisi yang terjadi selama ini.

Setiap jawaban yang diberikan merupakan bantuan yang tidak ternilai harganya bagi peneliti, atas perhatian dan bantuannya saya mengucapkan ribuan terimakasih.

Pekanbaru, 12 juni 2022
Hormat Peneliti

Rozi Alpendra

**UNIVERSITAS
ISLAM RIAU**





II. Identitas Peneliti

Nama : Rozi Alpendra
 NPM : 167110858
 Jurusan : Administrasi Publik
 Fakultas : Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
 Perguruan Tinggi : Universitas Islam Riau
 Judul Skripsi : Pelaksanaan Program Bantuan Stimulant Perumahan Swadaya (BSPS) dalam Penyediaan Rumah Bantuan di Desa Koto Perambahan Kecamatan kampa kabupaten Kampar

III. Identitas Responden

Nama :
 Jenis Kelamin : a. Laki-laki b. Perempuan
 Umur :
 Pendidikan Terakhir :
 Pekerjaan :

IV. Petunjuk Pengisian

1. Diharapkan data responden di isi sesuai dengan identitas Bapak/ Ibu dan data yang telah di isi dijamin kerahasiaannya sesuai dengan etika penulisan ilmiah.
2. Berilah tanda silang (x) pada salah satu jawaban Bapak/Ibu yang dianggap benar dan isilah titik- titik (.....) yang tersedia bila dianggap perlu.
3. Pengisian kuesioner ini semata- mata hanya untuk mendapatkan data peneliti yang akurat dalam rangka penyusunan skripsi dan tidak berpengaruh pada responden.
4. Terima kasih kepada Bapak/Ibu yang telah mengisi kuesioner ini

V. Daftar Pertanyaan Per Indikator Variabel

Indikator variabel dari Pelaksanaan Program Bantuan Stimulant Perumahan Swadaya (BSPS) dalam Penyediaan Rumah Bantuan di Desa Koto Perambahan Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar peneliti menggunakan Teori dari Smith Tachjan (2006 : 37-38), dan penilaian secara menyeluruh terhadap *kebijakan yang dilaksanakan, kelompok sasaran, organisasi pelaksana, factor lingkungan.*

A. Kebijakan yang dilaksanakan

ISLAM RIAU



Kebijakan yang dilaksanakan adalah proses pelaksanaan kebijakan berdasarkan tujuan yang digagas oleh rumus kebijakan untuk mendorong mempengaruhi dan merangsang target group untuk melaksanakannya.

1. Menurut Bapak/Ibu apakah ada partisipasi masyarakat penerima rumah bantuan terhadap kegiatan (BSPS) ?
 - a. Ada
 - b. beberapa
 - c. Tidak ada

Alasannya:

.....

.....

.....

.....

2. Menurut Bapak/Ibu apakah dana anggaran mempengaruhi program (BSPS) ?
 - a. Ada
 - b. Kadang – kadang
 - c. Belum

Alasannya:

.....

.....

.....

.....

3. Menurut Bapak/Ibu bagaimana partisipasi masyarakat dalam membantu mewujudkan tercapainya program (BSPS) ?
 - a. Ada
 - b. Kadang-kadang
 - c. Belum

Alasannya:

.....

.....

.....

.....

4. Menurut Bapak/Ibu Apakah pihak desa transparansi dalam laporan atau pencatatan keuangan program (BSPS) ?
 - a. Ada
 - b. Kadang-kadang
 - c. Belum

Alasannya:

.....

.....

.....

**UNIVERSITAS
ISLAM RIAU**



B. Kelompok Sasaran

Kelompok sasaran adalah kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan diharapkan menerima manfaat dari kebijakan. Serta adanya dampak perubahan atau peningkatan yang dipengaruhi oleh kebijakan dan diharapkan dapat mengadopsi pola-pola interaksi sebagaimana yang diharapkan oleh rumus kebijakan.

1. Menurut Bapak/Ibu apakah program BSPS memberikan dampak perubahan langsung kepada masyarakat yang menerima rumah bantuan ?

a. Ada b. Kadang-kadang c. Tidak ada

Alasannya:

.....

.....

.....

.....

2. Menurut Bapak/Ibu apakah pihak desa melakukan observasi sebelum memberikan bantuan terhadap masyarakat yang menjadi sasaran program BSPS ?

a. Ada b. Kadang-kadang c. Tidak ada

Alasannya:

.....

.....

.....

.....

C. Organisasi Pelaksana

Organisasi pelaksana adalah badan-badan pelaksana atau unit-unit birokrasi pemerintah baik organisasi atau perorangan, yang bertanggung jawab dari mulai proses pengolaan, pelaksanaan dan pengawasan dari proses implementasi kebijakan

1. Apakah bapak / ibu ada melakukan pengamatan perkembangan terhadap masyarakat yang menjadi sasaran penerimaan rumah bantuan program BSPS ?

a. Ada b. Kadang-kadang c. Tidak ada

Alasannya:

.....

.....

ISLAM RIAU



.....
.....

D. Factor lingkungan

Factor lingkungan adalah unsur-unsur dalam lingkungan yang mempengaruhi oleh implementasi kebijakan. Model ini proses implementasi kebijakan dari perspektif perubahan social politik. Dilakukan terhadap kebijakan yang bertujuan untuk mengadakan perubahan atau perbaikan pada kelompok sasaran (berdimensi target group).

- Menurut Bapak/Ibu pernahkah pihak desa memberikan dukungan moral atau moril terhadap masyarakat penerima rumah bantuan dari program BSPS ?
 - Pernah
 - Kadang-kadang
 - Tidak pernah

Alasannya:

.....
.....
.....

- Menurut Bapak/Ibu apakah pihak desa melakukan atau melibatkan mitra kerja luar agar program BSPS terealisasikan sesuai target ?
 - Ada
 - Kadang-Kadang
 - Tidak ada

Alasannya:

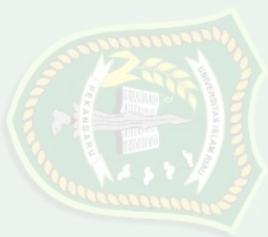
.....
.....
.....

Apa Saran Bapak/Ibu terhadap Pelaksanaan Pogram Bantuan Stimulant Perumahan Swadaya (BSPS) dalam Penyediaan Rumah Bantuan di Desa Koto Perambahan Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar.

.....
.....
.....

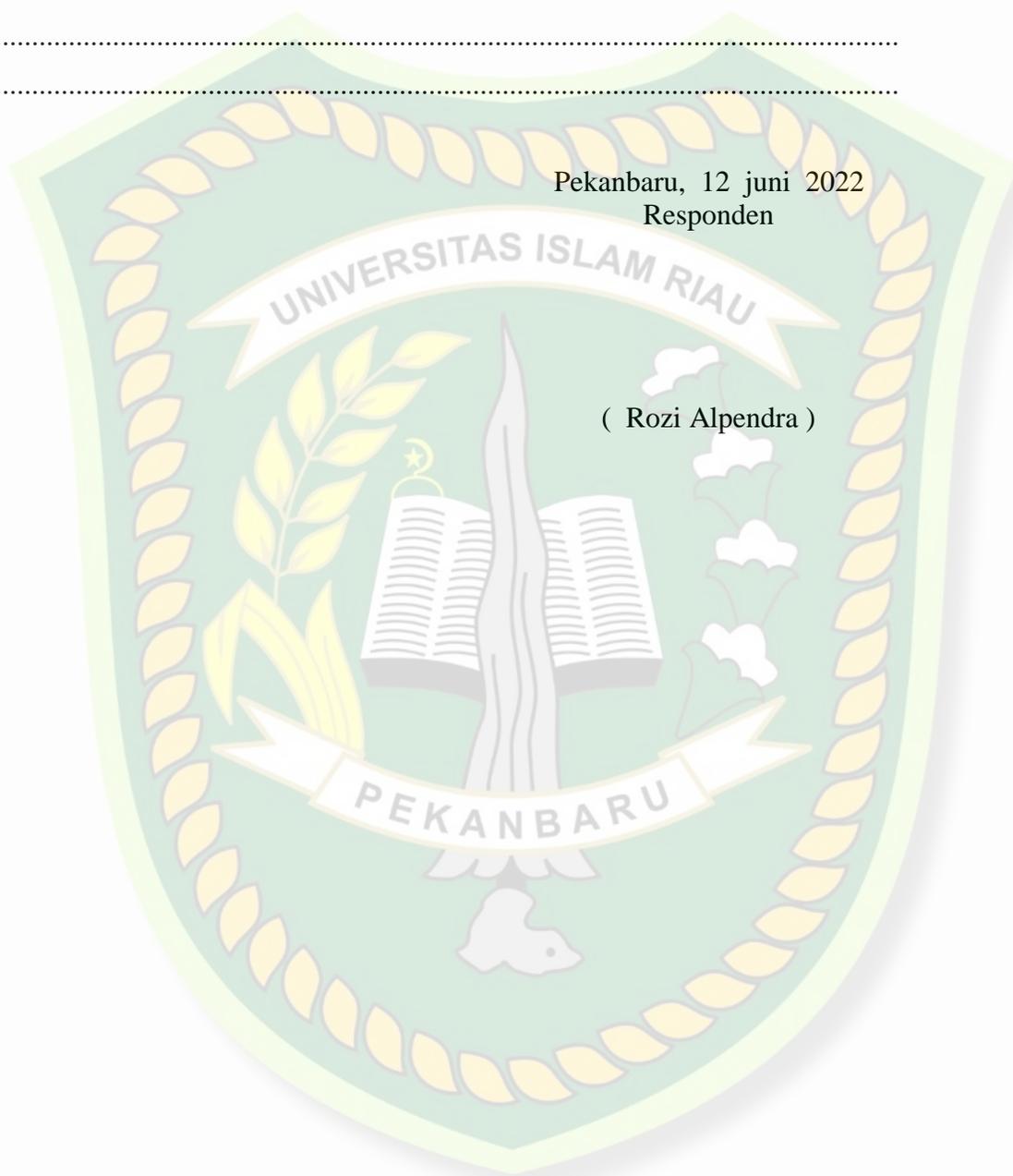
UNIVERSITAS

ISLAM RIAU



Pekanbaru, 12 juni 2022
Responden

(Rozi Alpendra)



**UNIVERSITAS
ISLAM RIAU**

DOKUMEN INI ADALAH ARSIP MILIK :

PERPUSTAKAAN SOEMAN HS

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Lampiran IV: Daftar Kusiner untuk Masyarakat Tentang Pelaksanaan Program Bantuan Stimulant Perumahan Swadaya (BSPS) dalam Penyediaan Rumah Bantuan di Desa Koto Perambahan Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar.

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**KUSIONER PENELITIAN
TENTANG
PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN STIMULANT PERUMAHAN
SWADAYA (BSPS) DALAM PENYEDIAAN RUMAH BANTUAN DI DESA
KOTO PERAMBAHAN KECAMATAN KAMPA KABUPATEN KAMPAR**



Rozi Alpendra

NPM : 167110858

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
PEKANBARU**

2022

ISLAM RIAU

**DAFTAR KUESIONER PENELITIAN TENTANG
PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN STIMULANT PERUMAHAN
SWADAYA (BSPS) DALAM PENYEDIAAN RUMAH BANTUAN DI DESA
KOTO PERAMBAHAN KECAMATAN KAMPA KABUPATEN KAMPAR**

No. Responden
(di isi oleh peneliti)

VI. Pengantar Kuesioner

Kepada Yth : Kepala Desa Koto Perambahan

Dengan Hormat,

Dalam rangka penulisan skripsi di Universitas Islam Riau, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk ujian Kesarjanaan Strata Satu (S1) Program Studi Administrasi Publik, maka saya mohon dengan segala hormat kepada Bapak/ Ibu untuk bersedia memberikan penjelasan secara ringkas.

Kuesioner ini ditujukan semata- mata untuk mengumpulkan data dan informasi sehubungan dengan penyusunan skripsi. Maka dari itu, informasi yang Bapak/Ibu berikan akan dirahasiakan, saya harap Bapak/Ibu dalam memberikan jawaban yang sejujurnya dan informasi yang diberikan sesuai dengan kondisi yang terjadi selama ini.

Setiap jawaban yang diberikan merupakan bantuan yang tidak ternilai harganya bagi peneliti, atas perhatian dan bantuannya saya mengucapkan ribuan terimakasih.

Pekanbaru, 12 juni 2022
Hormat Peneliti

UNIVERSITAS
(Rozi Alpendra)
ISLAM RIAU



VII. Identitas Peneliti

Nama : Rozi Alpendra
 NPM : 167110858
 Jurusan : Administrasi Publik
 Fakultas : Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
 Perguruan Tinggi : Universitas Islam Riau
 Judul Skripsi : Pelaksanaan Program Bantuan Stimulant Perumahan Swadaya (BSPS) dalam Penyediaan Rumah Bantuan di Desa Koto Perambahan Kecamatan kampa kabupaten Kampar

VIII. Identitas Responden

Nama :
 Jenis Kelamin : a. Laki-laki b. Perempuan
 Umur :
 Pendidikan Terakhir :
 Pekerjaan :

IX. Petunjuk Pengisian

5. Diharapkan data responden di isi sesuai dengan identitas Bapak/ Ibu dan data yang telah di isi dijamin kerahasiaannya sesuai dengan etika penulisan ilmiah.
6. Berilah tanda silang (x) pada salah satu jawaban Bapak/Ibu yang dianggap benar dan isilah titik- titik (.....) yang tersedia bila dianggap perlu.
7. Pengisian kuesioner ini semata- mata hanya untuk mendapatkan data peneliti yang akurat dalam rangka penyusunan skripsi dan tidak berpengaruh pada responden.
8. Terima kasih kepada Bapak/Ibu yang telah mengisi kuesioner ini

X. Daftar Pertanyaan Per Indikator Variabel

Indikator variabel dari Pelaksanaan Program Bantuan Stimulant Perumahan Swadaya (BSPS) dalam Penyediaan Rumah Bantuan di Desa Koto Perambahan Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar peneliti menggunakan Teori dari Smith Tachjan (2006 : 37-38), dan penilaian secara menyeluruh terhadap *kebijakan yang dilaksanakan, kelompok sasaran, organisasi pelaksana, factor lingkungan.*





E. Kebijakan yang dilaksanakan

Kebijakan yang dilaksanakan adalah proses pelaksanaan kebijakan berdasarkan tujuan yang digagas oleh rumus kebijakan untuk mendorong mempengaruhi dan merangsang target group untuk melaksanakannya.

5. Menurut Bapak/Ibu apakah ada partisipasi masyarakat penerima rumah bantuan terhadap kegiatan (BSPS) ?

- b. Ada b. beberapa c. Tidak ada

Alasannya:

.....

.....

.....

6. Menurut Bapak/Ibu apakah dana anggaran mempengaruhi program (BSPS) ?

- a. Ada b. Kadang – kadang c. Belum

Alasannya:

.....

.....

.....

7. Menurut Bapak/Ibu bagaimana partisipasi masyarakat dalam membantu mewujudkan tercapainya program (BSPS) ?

- b. Ada b. Kadang-kadang c. Belum

Alasannya:

.....

.....

.....

8. Menurut Bapak/Ibu Apakah pihak desa transparansi dalam laporan atau pencatatan keuangan program (BSPS) ?

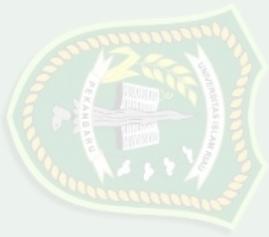
- b. Ada b. Kadang-kadang c. Belum

Alasannya:

.....

.....

ISLAM RIAU



F. Kelompok Sasaran

Kelompok sasaran adalah kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan diharapkan menerima manfaat dari kebijakan. Serta adanya dampak perubahan atau peningkatan yang dipengaruhi oleh kebijakan dan diharapkan dapat mengadopsi pola-pola interaksi sebagaimana yang diharapkan oleh rumus kebijakan.

3. Menurut Bapak/Ibu apakah program BSPS memberikan dampak perubahan langsung kepada masyarakat yang menerima rumah bantuan ?

b. Ada b. Kadang-kadang c. Tidak ada

Alasannya:

.....

.....

.....

.....

4. Menurut Bapak/Ibu apakah pihak desa melakukan observasi sebelum memberikan bantuan terhadap masyarakat yang menjadi sasaran program BSPS ?

b. Ada b. Kadang-kadang c. Tidak ada

Alasannya:

.....

.....

.....

.....

G. Organisasi Pelaksana

Organisasi pelaksana adalah badan-badan pelaksana atau unit-unit birokrasi pemerintah baik organisasi atau perorangan, yang bertanggung jawab dari mulai proses pengolaan, pelaksanaan dan pengawasan dari proses implementasi kebijakan

3. Apakah bapak / ibu ada melakukan pengamatan perkembangan terhadap masyarakat yang menjadi sasaran penerimaan rumah bantuan program BSPS ?

b. Ada b. Kadang-kadang c. Tidak ada

Alasannya:

ISLAM RIAU



.....
.....
.....

H. Factor lingkungan

Factor lingkungan adalah unsur-unsur dalam lingkungan yang mempengaruhi oleh implementasi kebijakan. Model ini proses implementasi kebijakan dari perspektif perubahan social politik. Dilakukan terhadap kebijakan yang bertujuan untuk mengadakan perubahan atau perbaikan pada kelompok sasaran (berdimensi target group).

2. Menurut Bapak/Ibu pernahkah pihak desa memberikan dukungan moral atau moril terhadap masyarakat penerima rumah bantuan dari program BSPS ?

- b. Pernah
- b. Kadang-kadang
- c. Tidak pernah

Alasannya:

.....
.....
.....

4. Menurut Bapak/Ibu apakah pihak desa melakukan atau melibatkan mitra kerja luar agar program BSPS terealisasi sesuai target ?

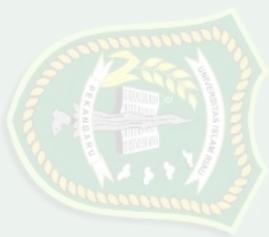
- b. Ada
- b. Kadang-Kadang
- c. Tidak ada

Alasannya:

.....
.....
.....

Apa Saran Bapak/Ibu terhadap Pelaksanaan Pogram Bantuan Stimulant Perumahan Swadaya (BSPS) dalam Penyediaan Rumah Bantuan di Desa Koto Perambahan Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar.

.....
.....



.....
.....
.....
.....

Pekanbaru, 12 juni 2022

Responden

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

(Rozi Alpendra)

PEKANBARU

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

DOKUMEN INI ADALAH ARSIP MILIK :

PERPUSTAKAAN SOEMAN HS

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin

Lampiran V: Daftar Wawancara untuk Petugas Program Bantuan Stimulant Perumahan Swadaya (BSPS) dalam Penyediaan Rumah Bantuan di Desa Koto Perambahan Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar.

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**WAWANCARA PENELITIAN
TENTANG
PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN STIMULANT PERUMAHAN
SWDAYA (BSPS) DALAM PENYEDIAAN RUMAH BANTUAN DI DESA
KOTO PERAMBANGAN KECAMATAN KAMPA KABUPATEN KAMPAR**



Rozi alpendra

NPM : 167110858

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
PEKANBARU**

2021

ISLAM RIAU

**DAFTAR WAWANCARA PENELITIAN TENTANG
PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN STIMULANT PERUMAHAN
SWADAYA (BSPS) DALAM PENYEDIAAN RUMAH BANTUAN DI DESA
KOTO PERAMBAHAN KECAMATAN KAMPA KABUPATEN KAMPAR**

No. Responden
(di isi oleh peneliti)

I. Pengantar Wawancara

Dengan Hormat,

Kepada Yth : Kepala Rudenim dan

Dalam rangka penulisan skripsi di Universitas Islam Riau, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk ujian Kesarjanaan Strata Satu (S1) Program Studi Administrasi Publik, maka saya mohon dengan segala hormat kepada Bapak/ Ibu untuk bersedia memberikan penjelasan secara ringkas.

Wawancara ini ditujukan semata- mata untuk mengumpulkan data dan informasi sehubungan dengan penyusunan skripsi. Maka dari itu, informasi yang Bapak/Ibu berikan akan dirahasiakan, saya harap Bapak/Ibu dalam memberikan jawaban yang sejujurnya dan informasi yang diberikan sesuai dengan kondisi yang terjadi selama ini.

Setiap jawaban yang diberikan merupakan bantuan yang tidak ternilai harganya bagi peneliti, atas perhatian dan bantuannya saya mengucapkan ribuan terimakasih.

Pekanbaru, 12 juni 2022
Hormat Peneliti

UNIVERSITAS
(Rozi Alpendra)
ISLAM RIAU





II. Identitas Peneliti

Nama : Rozi Alpendra
 NPM : 167110858
 Jurusan : Administrasi Publik
 Fakultas : Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
 Perguruan Tinggi : Universitas Islam Riau
 Judul Skripsi : Pelaksanaan Program Bantuan Stimulant Perumahan Swadaya (BSPS) dalam penyediaan Rumah Bantuan di Desa koto Perambahan Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar.

III. Identitas Responden

Nama :
 Jenis Kelamin : a. Laki-laki b. Perempuan
 Umur :
 Pendidikan Terakhir :
 Pekerjaan :

IV. Petunjuk Pengisian

- Pernyataan ini berkaitan dengan
- Wawancara ini semata- mata hanya untuk mendapatkan data dalam rangka penyusunan skripsi peneliti, dan tidak berpengaruh terhadap jabatan ataupun posisi Bapak/Ibu sekarang ini.
- Terimakasih kepada Bapak/Ibu yang telah mengisi wawancara ini.

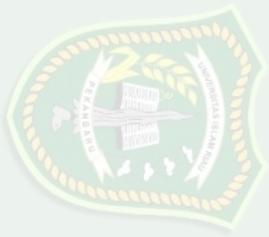
V. Daftar Pertanyaan Wawancara

- Menurut Bapak/Ibu apakah ada partisipasi masyarakat penerima rumah bantuan terhadapap kegiatan (BSPS) ?
- Menurut Bapak/Ibu apakah dana anggaran mempengaruhi program (BSPS) ?
- Menurut Bapak/Ibu bagaimana partisipasi masyarakat dalam membantu mewujudkan tercapainya program (BSPS) ?

ISLAM RIAU

4. Menurut Bapak/Ibu Apakah pihak desa transparansi dalam laporan atau pencatatan keuangan program (BSPS) ?
5. Menurut Bapak/Ibu apakah program BSPS memberikan dampak perubahan langsung kepada masyarakat yang menerima rumah bantuan ?
6. Menurut Bapak/Ibu apakah pihak desa melakukan observasi sebelum memberikan bantuan terhadap masyarakat yang menjadi sasaran program BSPS ?
7. Apakah bapak / ibu ada melakukan pengamatan perkembangan terhadap masyarakat yang menjadi sasaran penerimaan rumah bantuan program BSPS ?
8. Menurut Bapak/Ibu pernahkah pihak desa memberikan dukungan moral atau moril terhadap masyarakat penerima rumah bantuan dari program BSPS ?
9. Menurut Bapak/Ibu apakah pihak desa melakukan atau melibatkan mitra kerja luar agar program BSPS terealisasi sesuai target ?

**UNIVERSITAS
ISLAM RIAU**



DOKUMEN INI ADALAH ARSIP MILIK :

PERPUSTAKAAN SOEMAN HS

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Lampiran VI: Daftar Nama Responden Petugas Program Bantuan Stimulant Perumahan Swadaya (BSPS) dalam Penyediaan Rumah di Desa Koto Perambahan Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar.

NO	Identitas Responden			
	Nama	Jenis Kelamin	Umur	Tingkat Pendidikan
1	HENDRA EKA PUTRA ,ST	L	39	S1
2	RAIS ADLI, S.Pt	L	40	S1
3	DARLIS,S.Pd.i	L	37	S1
4	HAMPAMIi, SE	L	30	S1
5	PUTRA RANDANIEL, SE	L	27	S1
6	SAHRUL	L	49	SLTA
7	JASRIYANTO	L	44	SLTA
8	IRNA DARMA YANTI	P	41	SLTA

**UNIVERSITAS
ISLAM RIAU**



Lampiran VII: Daftar Nama Masyarakat Penerima Rumah Bantuan Program Bantuan Stimulant Perumahan Swadaya (BSPS) dalam Penyediaan Rumah Bantuan di desa Koto Perambahan Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar.

NO	Identitas Responden			
	Nama	Jenis Kelamin	Umur	Tingkat Pendidikan
1	ZULFAHMI	L	28	SLTA
2	RUSLI YUNUS	L	42	SLTA
3	ZAMZULIS	L	47	SLTA
4	HAIRUL	L	34	SLTA
5	DARMAN	L	37	SLTA
6	SARKAWI	L	45	SLTA
7	TIANTAU	L	58	SLTA
8	SANIBAR	L	54	SLTA
9	YUSNI	P	31	SLTA
10	BOY SARTIKA	P	30	SLTA
11	SOLIHIN	L	46	SLTA
12	HARYANTO	L	46	SLTA
13	SUWADI	L	41	SLTA
14	PONIMAN	L	59	SLTA
15	MUJI WIDODO	L	49	SLTA
16	TUKIMIN	L	55	SLTA

ISLAM RIAU



17	ERNI MELINA	P	32	SLTP
18	KASAMAN	L	42	SLTP
19	HARTONO	L	47	SLTP
20	ZULPENDRI	L	32	SLTP
21	NURHAYATI	P	27	SLTP
22	ZAMZULIS	L	41	SLTP
23	NURILAL	P	41	SLTP
24	MISDARINA	P	36	SLTP
25	SRI WAHYUNI	P	30	SLTP
26	DARIUS	L	47	SLTP
27	DODI GUSMARNO	L	36	SLTP
28	ASMAN EFENDI	L	33	SLTP
29	ZAMZAMI	L	35	SLTP
30	FIRDAUS	L	35	SLTP
31	DUKI RIANTO	L	52	SLTP
32	SLAMET RIYADI	L	56	SLTP
33	HASANUDIN	L	42	SLTP
34	SURAHMAN	L	43	SLTP
35	ABDURRAHMAN	L	48	SLTP
36	JUMANTO	L	51	SLTP
37	SIGIT WIJAYA	L	36	SLTP
38	SAPRIL	L	44	SLTP

ISLAM RIAU

49	SUPRIONO	L	44	SD
40	HERMAN NURKHOLIS	L	47	SD
41	M. TAMRIN	L	38	SD
42	SYAFRIYAL	L	36	SD
43	ZAINAL ARIFIN	L	49	SD
44	ROSNAWATI	P	45	SD
45	ABDUL LATIF	L	50	SD
46	RAHMAT WIJAYA	L	35	SD
47	ARIF NURYADI	L	43	SD
48	FITRA HADI	L	43	TIDAK SEKOLAH
49	JURNALIS YURISMAN	L	41	TIDAK SEKOLAH
50	AHMAD SYAHRONI	L	44	TIDAK SEKOLAH
51	AGUNG SITINJAK	L	41	TIDAK SEKOLAH
52	HARIS ISKANDAR	L	48	TIDAK SEKOLAH
53	ALMAYUDIN	L	45	TIDAK SEKOLAH

**UNIVERSITAS
ISLAM RIAU**



Lampiran VIII: Surat Riset dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Islam Riau untuk Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Wilayah Riau



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
 FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 الجامعة الإسلامية الریونتیة

Alamat: Jalan Kahrudin Nasution No. 113 Marjayan Pekanbaru, Riau, Indonesia 28284
 Telp. +62 761 674674 Fax. +62 761 674934 E-mail: fipol@iir.ac.id Website: www.iir.ac.id

SURAT RISET

Nomor: 633/E-UIR/27-FS/2022

Hal : Mohon Rekomendasi Riset
 Kepada Yth : Bapak / Ibu Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 Di -
 Tempat

Assalamu'alaikum,Wr.Wb.

Dengan hormat, bersama ini datang menghadap Bapak/Ibu, mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau atas nama :

Nama : Rozi Alpendra
 NIM : 167110858
 Program Studi : Administrasi Publik
 Jenjang Pendidikan : Strata satu
 Semester : Dua Belas
 Alamat : Jalan Karya 1

Dengan harapan untuk mendapatkan rekomendasi pelaksanaan penelitian (Penulisan Skripsi) dengan judul :

"Pelaksanaan Program Bantuan Stimulans Perumahan Swadaya (Bsps) Dalam Penyediaan Rumah Bantuan di Desa Koto Perambahan Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar "

Demikian atas bantuan dan kerjasama yang Ibu berikan kami ucapkan terima kasih.



UNIVERSITAS
ISLAM RIAU



Lampiran IX: Surat Keputusan Dekan Fisipol Universitas Islam Riau Tentang Penetapan Dosen Pembimbing.

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU NOMOR: 0394/UIR-Fs/Kpts/2022 TENTANG PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang : 1. Bahwa untuk mengarahkan mahasiswa dalam penulisan skripsi perlu difasilitasi oleh Dosen Pembimbing.
2. Bahwa Dosen Pembimbing dimaksud perlu ditetapkan dalam bentuk surat keputusan Dekan
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang - Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Presiden Nomor 08 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
5. Permenristek & Dikti 50 tahun 2014 tentang Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi;
6. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2019;
7. SK Rektor No. 344/UIR/ Kpts/2015 tentang Kurikulum Fisipol UIR;
8. SK Rektor No. 258/UIR/ Kpts /2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana UIR masa bakti 2020-2024.
- Memperhatikan : Rekomendasi Ketua Program Studi dan Wakil Dekan I tentang usulan Dosen Pembimbing penulisan skripsi mahasiswa;

- Menetapkan : 1. Dosen yang identitasnya tertera berikut ini:

MEMUTUSKAN

Nama : Lilis Suryani, S.Sos., M.Si
NIP/NPK : 980602272
Pangkat/ Jabatan : III/c- Lektor
Kedudukan : Pembimbing

Sebagai Pembimbing pada proses penulisan skripsi mahasiswa yang identitasnya tertera berikut ini :

Nama : Rozi Alpendra
NPM : 167110858
Program Studi : Administrasi Publik
Judul Skripsi : Analisis Pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Dalam Penyediaan Rumah Bantuan Di Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar Desa Koto Perambahan

2. Pelaksanaan tugas Pembimbingan berpedoman kepada Peraturan Akademik Universitas Islam Riau Nomor 1 Tahun 2018 Pasal 39 tentang Kualifikasi Dosen Pembimbing dan Penguji Program Diploma dan Sarjana dan Pasal 42 tentang Tugas Dan Tanggung Jawab Dosen Pembimbing.
3. Kepada Dosen Pembimbing diberikan honorarium sesuai ketentuan yang berlaku di UIR;
4. Keputusan ini mulai berlaku selama 6 bulan dihitung dari tanggal 27 Mei 2022 s/d 27 Oktober 2022, akan ditinjau kembali apabila melebihi waktu yang telah ditetapkan..
- Kutipan : Surat Keputusan ini disampaikan Kepada Dosen bersangkutan untuk dilaksanakan secara baik dan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 27 Mei 2022
Dekan,

Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si
NPK. 080102337

- Tembusan, disampaikan kepada :
1. Yth. Bapak Rektor UIR
 2. Yth. Ketua Prodi AP
 3. Yth. Ka. Labor AP
 4. Arsip SK Pembimbing

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

ISLAM RIAU

Lampiran X : Surat Keterangan Riset/Pra Riset Dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU
 Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMTSP/NON IZIN-RISET/47880
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau, Nomor : 633/E-UIR/27-FS/2022 Tanggal 21 Mei 2022**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

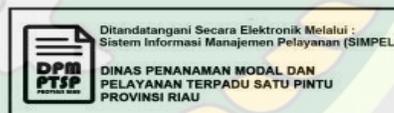
- | | | |
|----------------------|---|---|
| 1. Nama | : | ROZI ALPENDRA |
| 2. NIM / KTP | : | 167110858 |
| 3. Program Studi | : | ADMINISTRASI PUBLIK |
| 4. Jenjang | : | S1 |
| 5. Alamat | : | PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : | PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN STIMULANT PERUMAHAN SWADAYA (BSPS) DALAM PENYEDIAAN RUMAH BANTUAN DI DESA KOTO PERAMBAHAN KECAMATAN KAMPA KABUPATEN KAMPAR |
| 7. Lokasi Penelitian | : | DESA KOTO PERAMBAHAAN KECAMATAN KAMPA KABUPATEN KAMPAR |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan dihitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 30 Mei 2022



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Kampar
Up. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik di Bangkinang
3. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Lampiran VIII: Surat Izin Penelitian dari Desa Koto Perambahan Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar.



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR

DESA KOTO PERAMBAHAN

KECAMATAN KAMPA

Alamat : Jl. Sultan Pengeran Mahmud Adhli Syah KM. 36 Pekanbaru – Bangkinang
Kode Pos 28461

Koto Perambahan, 09 februari 2021

Nomor : 145 /K-PEM/X/2021-207

Lamp : -

Hal : BALASAN IZIN PENELITIAN

KEPADA YTH :

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS ISLAM RIAU

DI-

TEMPAT

Berdasarkan Surat Permohonan Yang Kami Terima Dari Bapak /Ibu Dengan Nomor 739/E-UIR/27-FS/2021, Perihal Mohon Rekomendasi Pra Riset Pada Tanggal 04 Februari 2021, Maka Dengan Ini Menyatakan Bahwa Mahasiswa/i Universitas Islam Riau, Berikut Ini:

Nama : ROZI ALPENDRA
NIM : 167110858
Program Studi : ADMINISTRASI PUBLIK
Semester : X (SEPULUH)

Telah diizinkan untuk melakukan penelitian di desa koto perambahan mengenai pelaksanaan kegiatan dan pengumpulan data dengan judul : "PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA (BSPS) DALAM PENYEDIAAN RUMAH BANTUAN DI DESA KOTO PERAMBAHAN DI KECAMATAN KAMPA KABUPATEN KAMPAR".

Demikian surat izin kami buat dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan terima kasih.

KEPALA DESA KOTO PERAMBAHAN



UNIVERSITAS
ISLAM RIAU

DOKUMEN INI ADALAH ARSIP MILIK :

PERPUSTAKAAN SOEMAN HS

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Lampiran XII: Surat Keterangan Jurnal Online



UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK الجامعة الإسلامية الريوية

Alamat : Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 Marpoyan, Pekanbaru, Riau, Indonesia 28284
Telp. +62761674674 Fax. +62761674834 Email: fisipol@uir.ac.id Website : www.uir.ac.id

SURAT KETERANGAN JURNAL ONLINE MAHASISWA

Nomor : 2688/IA_UIR/5-FS/2022

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau menerangkan bahwa :

Nama : Rozi Alpendra
NPM : 167110858
Program Studi : Administrasi Publik
Judul Jurnal : Pelaksanaan Program Bantuan Stimulans Perumahan Swadaya (BSPS) dalam Penyediaan Rumah Bantuan di Desa Koto Perambahan Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar.

Sudah mengunggah dan diterima oleh Editor Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik pada tanggal **22/11/2022**.

Demikianlah surat keterangan ini di buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 23/11/2022.

Hormat Kami,
Wakil Dekan Bid. Akademik

Indra Safri, S.Sos., M.Si
NPK. 970702230

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

DOKUMEN INI ADALAH ARSIP MILIK :
PERPUSTAKAAN SOEMAN HS
UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Lampiran XIII: Surat Keterangan Lulus Plagiasi Skripsi



UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK الجامعة الإسلامية البرونزية

Alamat : Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 Marpoyan, Pekanbaru, Riau, Indonesia 28284
Telp. +62761674674 Fax. +62761674834 Email: fisipol@uir.ac.id Website: www.uir.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI SKRIPSI

Nomor: 163 /A_UIR/FS-5/2022

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau menerangkan bahwa :

Nama : Rozi Alpendra
NPM : 167110858
Program Studi : Administrasi Publik
Judul Skripsi : Pelaksanaan Program Bantuan Stimulant Perumahan Swadaya (BSPS) dalam Penyediaan Rumah Bantuan di Desa Koto Perambahan Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar
Persentase Plagiasi : 30% (116 Halaman) Abstrak s/d Daftar Pustaka
Status : **Lulus**

Adalah benar-benar sudah lulus pengecekan plagiasi dari Naskah Publikasi Skripsi, dengan menggunakan aplikasi *Turnitin* (terlampir).

Demikianlah surat keterangan ini di buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 23 Agustus 2022
Hormat Kami,
Wakil Dekan Bid. Akademik



Indra Safri, S.Sos., M.Si
NPK 970702230

UNIVERSITAS ISLAM RIAU



ROZI_ALPENDRA_167110858.docx

ORIGINALITY REPORT

30% SIMILARITY INDEX
29% INTERNET SOURCES
4% PUBLICATIONS
12% STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.uin-suska.ac.id Internet Source	8%
2	repository.uir.ac.id Internet Source	6%
3	Submitted to Universitas Islam Riau Student Paper	4%
4	ppid.riau.go.id Internet Source	3%
5	repository.uinsu.ac.id Internet Source	2%
6	core.ac.uk Internet Source	2%
7	mysinau.blogspot.com Internet Source	2%
8	nahp.pu.go.id Internet Source	1%
9	repositori.usu.ac.id Internet Source	1%

UNIVERSITAS
ISLAM RIAU

DOKUMEN INI ADALAH ARSIP MILIK :

PERPUSTAKAAN SOEMAN HS

UNIVERSITAS ISLAM RIAU



10	www.researchgate.net Internet Source	1%
11	jurnal.uinsu.ac.id Internet Source	1%
12	repository.radenintan.ac.id Internet Source	1%

Exclude quotes On
Exclude bibliography On

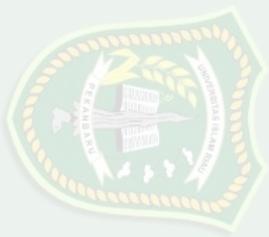
Exclude matches < 1%

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

DOKUMEN INI ADALAH ARSIP MILIK :

PERPUSTAKAAN SOEMAN HS

UNIVERSITAS ISLAM RIAU



Lampiran IX: Sertifikat Baca Al-Qur'an



DOKUMEN INI ADALAH ARSIP MILIK :
PERPUSTAKAAN SOEMAN HS
UNIVERSITAS ISLAM RIAU

UNIVERSITAS
ISLAM RIAU

Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin